



Penyunting:  
Dr. Handewi P. Saliem

# ANALISIS KEBUTUHAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENDUKUNG MP3EI

Penyunting:  
Dr. Handewi P. Saliem

ANALISIS KEBUTUHAN INSTRUMEN  
KEBIJAKAN PENDUKUNG

MP3EI

Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.

MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Buku ini bersisi sembilan tulisan tentang analisis kebutuhan instrumen kebijakan yang mendukung pelaksanaan MP3EI. Kesembilan tulisan itu: *pertama*, menelaah kebijakan MP3EI sektor pertambangan; *kedua*, menelaah kebijakan pengembangan SDM dan IPTEK dalam mendukung implementasi MP3EI; *ketiga* melihat peran MP3EI dalam konteks pembangunan daerah tertinggal; *keempat*, mengkaji kebijakan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan MP3EI; *kelima*, menelaah reformulasi kebijakan pertanian Indonesia: program pertanian dalam Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi; *keenam*: mengkaji kebijakan pengelolaan kelautan dalam rangka MP3EI; *ketujuh*: menelaah pengembangan koridor ekonomi Indonesia sebagai pendukung kemajuan perekonomian Indonesia; *kedelapan*, mengkaji investasi asing dalam kerangka masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia: peluang dan tantangan; *kesembilan*, menelaah kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam penguatan konektivitas nasional.



Diterbitkan atas kerjasama:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika



ISBN 978-979-9052-79-7



9 789799 052797



# **ANALISIS KEBUTUHAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENDUKUNG MP3EI**

**Penyunting:**  
Dr. Handewi P. Saliem



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia  
dan Azza Grafika



**Judul:**

Analisis Kebutuhan Instrumen Kebijakan Pendukung MP3EI

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

vi+167 hlm.; 17x24 cm

Cetakan Pertama, 2012

ISBN: 978-979-9052-79-7

**Penulis:**

Ariesy Tri Mauleny

Asep Ahmad Saefuloh

Edmira Rivani

Hilma Meilani

Lukman Adam

Nidya Waras Sayekti

Niken Paramita Purwanto

Sony Hendra Permana

T. Ade Surya

**Penyunting:**

Dr. Handewi P. Saliem

**Desain Sampul:**

Fery C. Syifa

**Penata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/ DIY/ 2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7 - 9 persen per tahun secara berkelanjutan.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan *breakthrough* yang didasari oleh semangat "*Not Business As Usual*", melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi (*debottlenecking*). Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Kemudian untuk melihat bagaimana program MP3EI dapat dipastikan bekerja sesuai harapan, maka perlu didukung dengan berbagai instrumen pendukung. Untuk itu diperlukan kajian-kajian terhadap berbagai hal yang mungkin dibutuhkan dalam implementasi MP3EI. P3DI sebagai unsur penunjang keahlian kepada DPR menyadari kebutuhan analisis tersebut, sehingga di tahun 2012 ini menerbitkan kembali sebuah buku yang terkait dengan MP3EI ini berjudul, "Analisis Kebutuhan Instrumen Kebijakan Pendukung MP3EI".

Pada akhirnya buku ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR dalam mengawasi pelaksanaan MP3EI.

Jakarta, Desember 2012

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Bagian 1: Kebijakan MP3EI Sektor Pertambangan; Upaya Memperkuat Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia</b>	
<i>oleh: Ariesy Tri Mauleny</i> .....	1
I. Pendahuluan.....	3
II. Pembahasan .....	8
III. Kesimpulan dan Saran .....	21
Daftar Pustaka.....	22
<b>Bagian 2: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Mendukung Implementasi <i>MasterPlan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia</b>	
<i>oleh: Asep Ahmad Saefuloh</i> .....	25
I. Pendahuluan.....	27
II. Pembahasan .....	31
III. Kesimpulan dan Saran .....	37
Daftar Pustaka.....	38
<b>Bagian 3: Peran <i>MasterPlan</i> Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Pembangunan Daerah Tertinggal</b>	
<i>oleh: Edmira Rivani</i> .....	41
I. Pendahuluan.....	43
II. Pembahasan .....	50
III. Kesimpulan dan Saran .....	55
Daftar Pustaka.....	57
<b>Bagian 4: Kebijakan Insentif Fiskal untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri dan Mendukung MP3EI</b>	
<i>oleh: Hilma Meilani</i> .....	59
I. Pendahuluan.....	61
II. Pembahasan .....	66
III. Kesimpulan dan Saran .....	76
Daftar Pustaka.....	77

<b>Bagian 5: Reformulasi Kebijakan Pertanian Indonesia: Program Pertanian dalam <i>MasterPlan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi</b>	
<i>oleh: Lukman Adam</i> .....	79
I. Pendahuluan.....	81
II. Pembahasan .....	85
III. Kesimpulan dan Saran .....	95
Daftar Pustaka.....	97
<b>Bagian 6: Kebijakan Pengelolaan Kelautan dalam Rangka MP3EI</b>	
<i>oleh: Nidya Waras Sayekti</i> .....	99
I. Pendahuluan.....	101
II. Pembahasan .....	104
III. Kesimpulan dan Saran .....	112
Daftar Pustaka.....	113
<b>Bagian 7: Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia sebagai Pendukung Kemajuan Perekonomian Indonesia</b>	
<i>oleh: Niken Paramita Purwanto</i> .....	115
I. Pendahuluan.....	117
II. Pembahasan .....	126
III. Kesimpulan dan Saran .....	129
Daftar Pustaka.....	131
<b>Bagian 8: Investasi Asing dalam Kerangka <i>MasterPlan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Peluang dan Tantangan</b>	
<i>oleh: Sony Hendra Permana</i> .....	133
I. Pendahuluan.....	135
II. Pembahasan .....	140
III. Kesimpulan dan Saran .....	148
Daftar Pustaka.....	149
<b>Bagian 9: Kebijakan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam Penguatan Konektivitas Nasional</b>	
<i>oleh: T. Ade Surya</i> .....	153
I. Pendahuluan.....	155
II. Pembahasan .....	158
III. Kesimpulan dan Saran .....	162
Daftar Pustaka.....	163
Biografi Penulis.....	165

BAGIAN 1

**KEBIJAKAN MP3EI SEKTOR PERTAMBANGAN;  
UPAYA MEMPERKUAT STRATEGI PEMBANGUNAN  
EKONOMI INDONESIA**

*oleh: Ariesy Tri Mauleny\**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara penting dalam bidang pertambangan karena kedudukannya sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia, tembaga terbesar keempat, nikel terbesar ke lima, emas terbesar ke tujuh dan produksi batubara terbesar ke delapan di dunia. Namun demikian, dampak positif dari kekayaan alam yang dimiliki belum terlihat. Hingga kini, belum terbebas dari beban utang yang tidak sedikit dan rasio orang miskinnya pun masih mencapai 17 juta jiwa. Kekayaan tambang Indonesia yang sudah dikeruk puluhan tahun ternyata baru sebatas menghasilkan 11 persen dari pendapatan ekspor dan menyumbang 2,5 dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).<sup>1</sup>

Selama semester I/2012, terjadi penurunan harga komoditas akibat berkurangnya permintaan ekspor yang menyebabkan sejumlah emiten tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merasakan dampak negatifnya. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor batubara turun 19% menjadi 137 juta ton pada semester pertama tahun ini. Angka tersebut setara dengan 74,4% dari produksi batu bara nasional yang mencapai 184 juta ton. Perusahaan batubara termasuk PT Adaro Energy Tbk, harus merevisi target produksi tahunan sebesar 5% akibat volume penjualan paruh pertama tahun ini merosot ke 23,69 juta ton dibandingkan 24,02 juta ton pada periode sama 2011.<sup>2</sup>

Penurunan target produksi disebabkan suplai melimpah tidak sebanding dengan permintaan ekspor menjadi pilihan strategis dibanding bila dipaksakan penjualan dengan harga rendah.<sup>3</sup> Walau demikian harga batubara acuan (HBA) yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral juga tercatat mengalami penurunan selama 6 bulan pertama tahun ini. HBA Juli ditetapkan pada US\$ 87,56, merosot hampir 20% dibandingkan US\$ 109,29 pada Januari.<sup>4</sup>

Kinerja kurang memuaskan dari perusahaan batubara karena penurunan laba bersih yang disebabkan penumpukan pasokan batubara yang membengkak hingga 8 kali lipat dan harga komoditas yang lebih rendah lebih dipicu oleh menurunnya permintaan global yang dipicu oleh krisis Eropa dan perlambatan

<sup>1</sup> Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan), Program Kerja Inisiatif Tahun 2006: "Peningkatan Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemetaan Sektor Ekonomi" Bank Indonesia.

<sup>2</sup> <http://www.bisnis.com/articles/kinerja-emiten-sektor-tambang-merosot-karena-harga-anjlok>, diunduh 16 Agustus 2012 pk.09.45

<sup>3</sup> Nicholson, W dan Snyder, C, "Microeconomic Theory; Basic Principles and Extensions", Tenth Edition, Thompson Learning Academic Resource Center, 2008.

<sup>4</sup> <http://www.bakrie-brothers.com/mediarelation/detail/2332/harga-komoditas-tekan-emiten-tambang>, diunduh tanggal 16 Agustus 2012 pk. 14.40.

ekonomi Cina. Dampak negatif juga dirasakan oleh emiten tambang mineral lain yang tidak hanya mengalami penurunan harga jual, tetapi juga terkena imbas regulasi pembatasan ekspor material mentah. Tidak mengherankan jika defisit neraca perdagangan Indonesia terus membesar dalam tiga bulan berturut-turut.<sup>5</sup>

Angka defisit itu bakal lebih besar lagi bila kondisi ekonomi Eropa memburuk dan harga komoditas berjatuh. Kondisi tersebut jelas akan memukul kinerja ekspor Indonesia yang selama ini bergantung kepada komoditas perkebunan dan pertambangan. Tanpa ada langkah terobosan dan akselerasi dari dalam negeri, defisit neraca perdagangan bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas dan fokus, dengan tolok ukur dan pola manajemen yang jelas melalui pengembangan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* yang dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) dan bukan "*Business As Usual*" sehingga ekonomi dapat tumbuh makin tinggi, lapangan pekerjaan akan tersedia dan kemiskinan akan berkurang menuju kedudukan sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025 dan enam negara besar dunia pada tahun 2050.<sup>6</sup>

Masterplan ini memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan. diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.<sup>7</sup> Ditambah lagi saat ini, banyak aktivitas ekonomi yang menghancurkan sumberdaya alam termasuk sektor pertambangan dan energi, restorasi lahan dan reklamasi lahan pada periode pasca penambangan dilakukan secara tidak layak sehingga menyebabkan kerusakan lahan.<sup>8</sup>

Namun apakah target yang dicanangkan dapat berhasil mengingat teori produksi dalam ilmu ekonomi senantiasa berupaya memaksimalkan output dan meminimalkan biaya? Lalu bagaimanakah korelasi dengan kebijakan lainnya? Sejauh manakah kinerja sektor pertambangan memiliki peluang dalam menghadapi tantangan kedepan?

---

<sup>5</sup> <http://www.bisnis.com/articles/kinerja-emiten-sektor-tambang-merosot-karena-harga-anjlok>, diunduh tanggal 16 Agustus 2012 pk. 14.30 wib.

<sup>6</sup> <http://www.investor.co.id/tajuk/defisit-sebagai-cambuk/41919>, diunduh tanggal 16 Agustus 2012, Pk. 08.30.

<sup>7</sup> Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

<sup>8</sup> Analisis SNREA bagi RPJMN Tahun 2010-2014, Laporan Antara Tim Analis SEA

## B. Perumusan Masalah

Operasi pertambangan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun budaya masyarakat lokal. Ongkos produksi rendah yang dibangga-banggakan perusahaan dalam laporan tahunannya dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan sosial. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*) di mana ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible damage*).

Dampak negatif yang dihasilkan oleh operasi pertambangan dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori.<sup>9</sup> *Pertama*, dampak ekologis. Pertambangan yang selama ini beroperasi di sejumlah wilayah terbukti telah membawa kerusakan terhadap lingkungan dalam skala yang besar. Hal ini menyangkut kerusakan terhadap tanah, rusaknya ekosistem hutan, tercemarnya air, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem sekitar lokasi tambang, terutama laut yang menjadi tempat pembuangan limbah dan efek bahan-bahan peledak yang dipakai. Selain itu, menyusul pula akibat-akibat lain, seperti banjir, longsor, kemarau panjang, dan kebakaran hutan.

*Kedua*, dampak kesehatan masyarakat. Kehadiran pertambangan justru menjadi cerita pilu bagi masyarakat, terutama warga yang ada di sekitar lokasi pertambangan. Debu-debu mangan menyebar ke mana-mana, hingga menutupi rumah, tanaman, dan mencemari air minum warga. Bahkan, ada beberapa kejadian kematian warga yang disinyalir karena pencemaran debu mangan, terutama karena menyerang saluran pernapasan.

*Ketiga*, dampak sosial-budaya. Kehadiran pertambangan terbukti menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah setempat, dan juga kemungkinan konflik antara masyarakat lokasi tambang dengan pihak perusahaan, atau juga antara pihak perusahaan dengan karyawan. Selain itu, ada masalah sosial besar lain yang muncul secara nyata dari industri pertambangan, yakni eksploitasi buruh secara besar-besaran. Tidak diragukan lagi bahwa praktik ketidakadilan terjadi di sana. Para buruh dan karyawan kerap kali diperlakukan secara tidak layak untuk sebuah standar karyawan di perusahaan tambang yang penuh resiko. Misalnya, peralatan kerja (seperti masker dan sepatu) tidak disediakan oleh pihak perusahaan, padahal ini sangat riskan bagi kesehatan mereka.

*Keempat*, dampak ekonomis. Dari segi ekonomi, hadirnya industri pertambangan ternyata tidak membawa perubahan apa-apa bagi keadaan ekonomi masyarakat. Sebab, pertambangan tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal. Bahkan, upah para buruh pun (yang kebanyakan orang-orang lokal)

<sup>9</sup> <http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/14/kebijakan-pertambangan-dan-problem-keadilan-sosial/>, diunduh tanggal 18 April 2012 pk.11.00.

tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi, secara ekonomis, pertambangan seringkali tidak memberikan keuntungan, tetapi masih membawa kerugian yang tidak sedikit. Melihat dari masih banyaknya dampak negatif yang terjadi di lapangan dari berjalannya operasi pertambangan, perlu dilakukan sinergisme antara kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjembatani pengalokasian sumber-sumber daya yang ada sehingga efisien dan benar-benar dapat memakmurkan masyarakat bahkan mengantarkan Indonesia ke dalam sepuluh Negara besar dunia pada Tahun 2025.

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan persoalan di atas, tulisan ini diharapkan dapat menguraikan sinergisme antara kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada sehingga dapat menjawab bagaimana seharusnya pengelolaan sektor pertambangan dilakukan, khususnya melalui MP3EI.

Tulisan ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tantangan dan peluang MP3EI sektor pertambangan dalam rangka memperkuat strategi pembangunan ekonomi Indonesia.

### **D. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan bersifat kajian pustaka atau *library research* dimana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif yang disertai dengan uraian dan analisis untuk memperkuat argumen dan menjawab permasalahan yang ada. Penggunaan metode penulisan deskriptif kualitatif ini menekankan pada ketersediaan data dan informasi baik yang bersumber dari buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, maupun internet.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Produksi dan Eksternalitas**

Perbedaan standar dan kualitas hidup di berbagai negara ditentukan oleh produktivitas negara-negara tersebut, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari satu jam kerja seorang pekerja. Di negara-negara dimana pekerja dapat menghasilkan jumlah barang dan jasa yang banyak per satu satuan waktu, sebagian besar masyarakatnya menikmati standar hidup yang tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengambil keputusan yang melatarbelakangi penawaran pada pasar kompetitif. Meskipun perusahaan bekerja berdasarkan teori produksi dimana perusahaan mengubah input menjadi output dengan tujuan utama memaksimalkan laba.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Mankiw, N.Gregory, "Principles of Economics", Third Edition, South Western of Thompson Learning, South Western, 2004.

Meskipun pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi, namun seringkali pasar tidak mampu mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien, pasar tidaklah sempurna dan pemerintah terkadang dapat memperbaiki kegagalan pasar. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah sumber daya milik bersama dan eksternalitas, dampak tindakan atau kegiatan ekonomi suatu pihak terhadap kemakmuran orang-orang disekitarnya.<sup>11</sup>

### **Teori Keunggulan Mutlak dan Komparatif**

Manfaat perdagangan internasional dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak atas barang tertentu apabila negara tersebut mampu memproduksinya dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain.

Sementara teori keunggulan komparatif mengatakan bahwa selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara satu negara dengan negara lain berbeda, selalu ada potensi keunggulan yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional, meskipun salah satu negara memiliki keunggulan mutlak dalam semua barang. Menurut teori keunggulan komparatif, dua negara masih bisa melakukan perdagangan meskipun salah satunya mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, asalkan biaya relatif untuk memproduksi barang di kedua negara tersebut berbeda.<sup>12</sup>

Spesialisasi dan perdagangan dapat menguntungkan semua mitra dagang, bahkan mereka yang mungkin merupakan produsen yang tidak efisien dalam arti yang absolute. Dalil Heckscher-Ohlin, suatu teori yang menjelaskan keberadaan keunggulan komparatif suatu Negara berdasarkan faktor alamnya: Sebuah Negara mempunyai keunggulan komparatif dibidang produksi suatu produk jika Negara itu relatif terbantu karena kekayaan alam atas input/faktor produksi yang digunakan secara intensif untuk memproduksi output tersebut.<sup>13</sup>

### **Kutukan Sumber Daya (*Resource Curse/Paradox of Plenty*)**

*Resource Curse* adalah teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana negara-negara yang memiliki sumber daya alam, tidak mampu mengembangkan sumber daya alam tersebut secara baik dan bahkan gagal berkembang di sektor lain. Argumen untuk teori kutukan sumber daya pada ilmu ekonomi pembangunan yaitu suatu negara cenderung tenggelam dan mengerahkan semua energi dan sumber daya ke dalam pengembangan industri sumber daya alam tertentu tersebut

<sup>11</sup> Jehle, A.Geoffrey dan Reny, J. Philip, "Advanced Microeconomic Theory", Third Edition, Ashford Colour Press Ltd. Gosport, Hampshire, 2011.

<sup>12</sup> [http://ilerning.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=984:teori-keunggulan-mutlak-dan-komparatif&catid=66:ekonomi-internasional&Itemid=86](http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=984:teori-keunggulan-mutlak-dan-komparatif&catid=66:ekonomi-internasional&Itemid=86), diunduh tanggal 16 Juli 2012, pk.10.15.

<sup>13</sup> Case, Karl E & Ray C. Fair, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro", Edisi 5, Jakarta. PT. Indeks, Kelompok Gramedia, 2004.

dengan mengabaikan pengembangan pada sektor lainnya, yang menyebabkan serangkaian reaksi berantai yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.<sup>14</sup>

Bahkan cenderung menghasilkan kinerja ekonomi yang buruk, menurunkan rata-rata pertumbuhan, karena tingginya tingkat korupsi, pemerintahan yang efektif dan kekerasan politik yang lebih besar serta tidak adanya upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian sumber daya alam, untuk kebanyakan negara miskin dan berkembang dianggap lebih dari sebuah 'kutukan' dari 'berkah'.

### **Pembangunan Berkelanjutan Konteks Pertambangan**

Filosofi pembangunan berkelanjutan menyebutkan bahwa pembangunan tidak semata-mata untuk era sekarang tapi harus memperhitungkan kepentingan generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, pembangunan sektor tambang sudah seharusnya mengahiri semangat keruk cepat yang akhir-akhir ini sering disinyalir oleh berbagai kalangan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tentu saja pemerintah harus sejalan dengan masyarakat, dimana sudah saatnya dipikirkan manfaat yang seoptimal mungkin dari kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan rakyat banyak dan itupun dalam konteks berkelanjutan.

Apabila masih terjadi operasi pertambangan yang hanya bersemangat keruk cepat dengan keuntungan sepihak alias pada pengusahanya saja tapi sangat sedikit kontribusi untuk negara dan masyarakat, maka hal ini harus segera diakhiri. Ada berbagai persyaratan di dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah partisipasi publik baik dari sisi perusahaan, pemantauan dan pemanfaatannya. Di dalam kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), kepentingan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan sudah harus dipikirkan sejak proyek pertambangan baru akan dimulai, saat dikerjakan dan setelah selesai. Saat sebelum dilaksanakan perlu di pertimbangkan dampak negatif dan positifnya.<sup>15</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kinerja Ekonomi Sektor Pertambangan dan Ketidakefisienan Sumber Daya**

Perkembangan pertumbuhan tahunan sektor pertambangan dan penggalian sangat berfluktuasi dan pada umumnya cenderung tumbuh lebih rendah

<sup>14</sup> Jonathan Di John, "The Resource Curse, Theory and Evidence", 2010 Elcano Royal Institute of International Studies dan Strategis, Madrid, Spanyol.

<sup>15</sup> [http://www.djmbp.esdm.go.id/modules/news/index.php?\\_act=detail&sub=news\\_minerbapabum&news\\_id=3075](http://www.djmbp.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail&sub=news_minerbapabum&news_id=3075), diunduh tanggal 16 Agustus 2012 pk.15.00.

dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian terutama dipengaruhi oleh fluktuasi pertumbuhan pada subsektor pertambangan migas. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tertinggi terjadi pada tahun 1968, yakni sebesar 36,53%. Pertumbuhan sektor pertambangan & penggalian pada tahun 2003 dan 2004 mengalami pertumbuhan negatif (-1,37% dan -4,48%) dan pada tahun 2005 tumbuh sebesar 1,59%. Korelasi pertumbuhan antara PDB sektor pertambangan terhadap total PDB sebesar 0,45.<sup>16</sup>

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Sektor Pertambangan (1961-2005)**



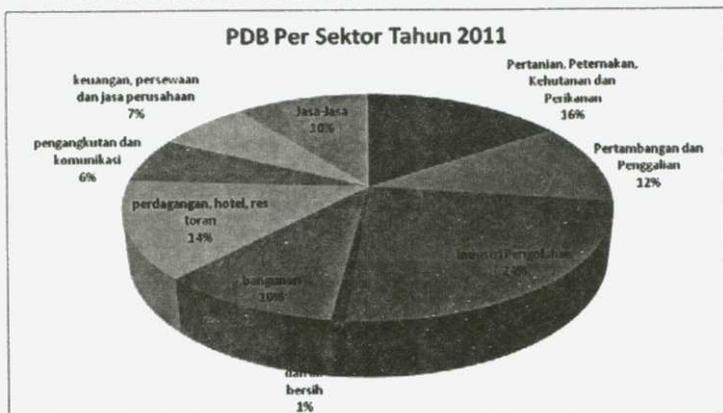
Sumber: Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan), Bank Indonesia

Pertumbuhan tahunan sektor pertambangan dan penggalian memiliki pola 10 tahunan dengan titik pertumbuhan yang hampir sama pada tahun 1978, 1988 dan 1998, yakni rata-rata tumbuh negatif sebesar -2,81%, kecuali pertumbuhan pada tahun 1968 yang mengalami lonjakan yang sangat tinggi sebesar 36,53%. Hal tersebut mengindikasikan adanya tahapan eksplorasi-eksploitasi sampai dengan produksi memerlukan waktu sekitar 10 tahun atau adanya pembaharuan kontrak penambangan baru.

Perkembangan sumbangan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi relatif rendah, rata-rata sebesar 10,55% dari pertumbuhan ekonomi. Sumbangan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1968 mencapai 21,31%.

<sup>16</sup> Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, "Peningkatan Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemetaan Sektor Ekonomi", Bank Indonesia, 2006.

**Gambar 2. PDB Indonesia Per Sektor Tahun 2011**



Sumber: BPS

Nilai bersih total perdagangan (*trade balance*) Indonesia menunjukkan peningkatan sejak tahun 1997, sedangkan nilai bersih total perdagangan migas cenderung mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada tahun 2005. Trend total nilai ekspor dan impor cenderung mengalami peningkatan, sedangkan trend nilai ekspor migas cenderung mengalami tetap dan trend impor migas mulai menunjukkan peningkatan. Pangsa ekspor migas terhadap total ekspor menunjukkan tren penurunan, sedangkan pangsa impor migas terhadap total impor cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2005, pangsa impor migas terhadap total impor mengalami peningkatan melebihi pangsa ekspor migas terhadap total ekspor.

**Tabel 1. Struktur Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan (2005-2011\*)**

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
A	Ekspor	85.660,00	100.798,60	114.100,90	137.020,50	116.510,00	157.778,50	215.488,70
1	Migas	19.231,60	21.209,50	22.088,60	29.126,30	19.018,30	28.039,00	43.579,30
2	Non Migas	66.428,40	79.589,10	92.012,30	107.894,20	97.491,70	129.739,50	171.909,40
	a. Industri	55.567,00	64.990,30	76.429,60	88.351,70	73.435,80	98.015,10	132.198,30
	b. Pertambangan dan Lainnya	7.954,60	11.200,30	11.893,70	14.916,10	19.703,10	26.722,50	34.198,10
	c. Pertanian	2.906,80	3.398,50	3.689,00	4.626,40	4.352,80	5.001,90	5.513,00
B	Impor	57.700,90	61.065,50	74.473,40	129.197,40	96.829,20	135.663,30	178.881,30
1	Migas	17.457,70	18.962,90	21.932,80	30.552,90	18.980,70	27.412,70	41.464,50
2	Non Migas	40.243,20	42.102,60	52.540,60	98.644,50	77.848,50	108.250,60	137.416,80
	a. Industri	37.300,30	38.624,60	48.084,10	91.800,70	72.398,10	101.115,40	125.977,20
	b. Pertambangan dan Lainnya	528,60	559,00	565,10	1.231,80	698,00	947,30	1.110,70
	c. Pertanian	2.414,30	2.919,00	3.891,40	5.612,00	4.752,40	6.187,90	10.328,90

C	Neraca	27.959,10	39.733,10	39.628,40	7.823,10	19.680,90	22.115,80	36.607,20
1	Migas	1.773,90	2.246,60	155,70	-1.426,60	37,60	626,90	2.114,80
2	Non Migas	26.185,20	37.486,50	39.472,70	9.249,70	19.643,30	21.488,90	34.492,40
	a. Industri	18.266,70	26.365,70	28.346,50	-3.449,00	1.037,80	-3.100,30	6.221,00
	b. Pertambangan dan Lainnya	7.426,00	10.641,30	11.328,60	13.684,30	19.005,10	25.775,20	33.087,40
	c. Pertanian	492,50	479,50	-202,40	-985,60	-399,60	-1.186,00	-4.816,00

Sumber: BPS dan Kemenperin

Ekspor dalam bentuk bahan mentah memberikan pendapatan yang sangat rendah. Hal tersebut dapat lebih efisien jika diekspor dalam bentuk bahan setengah jadi. Kegiatan pertambangan menyebabkan degradasi sumber daya lahan (penambangan dan pasca) karena biasanya eksploitasi sumber energi batubara melalui pertambangan terbuka yang menyebabkan terjadinya perubahan lansekap, terlebih lagi jika pertambangan berada di wilayah kawasan lindung.

**Tabel 2. Struktur Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan (2005-2011\*)**



Pertumbuhan sektor dikaji melalui analisa proses produksi sektor tersebut, analisa daya dukung SDA (input), dan analisa kepastian pasokan (output). Keberlanjutan kegiatan ekonomi energi dan mineral dipengaruhi oleh kondisi stok energi dan mineral tak terbarukan yang akan mendukung aktifitas kegiatan ekonomi. Tetapi jika ekstraksi tinggi, penipisan sumber daya akan berjalan cepat. Degradasi lingkungan biasanya terjadi secara tidak konsisten pada saat paska penambangan. Berbagai kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan dapat menghasilkan pengurangan stok dan degradasi lingkungan. Penggunaan energi dapat menambah emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim global yang selanjutnya menghasilkan perubahan suhu dunia, naiknya pasang surut dan suhu laut. Semua menjadi bagian dari eksternalitas negatif yang harus ditanggulangi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan teori produksi, produk pertambangan merupakan bagian penting yang menyokong masyarakat dan ekonomi modern. Industri tambang menjadi penyedia bahan dasar utama yang tak tergantikan. Akan tetapi mengejar keuntungan ekonomi semata dengan mengabaikan dampak pada lingkungan dan masyarakat sosial hanya akan menimbulkan konflik dan gesekan dengan

masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain, disinilah seharusnya peran pemerintah dengan regulasi dan kebijakannya dapat mengatasi persoalan yang muncul sebagai akibat dari kegiatan pertambangan sesuai teori eksternalitas.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

## **B. Regulasi dan Kebijakan Pertambangan Nasional**

Krisis tata ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan.

Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah (a) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang, (b) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (c) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.<sup>17</sup>

Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena

<sup>17</sup> Kuncoro, Mudrajad, "Antisipasi Resesi dan Gejolak Ekonomi Global", *Majalah GATRA*, No.12 Tahun XIV, 31 Januari-06 Februari 2008.

berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian nasional ke arah lebih maju dan lebih kokoh pada era globalisasi.

Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri.

Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarnya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif.<sup>18</sup>

Dalam lima tahun terakhir ini, investasi pertambangan umum mengalami pasang surut, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kurang mendukungnya iklim investasi sebagai akibat adanya konflik fungsi lahan dan ketidakpastian regulasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan RPJPN dan RPJMN, sejumlah peta dan informasi geologi mengenai potensi sumber daya mineral dan energi telah diselesaikan, baik pemetaan geologi bersistem, gaya berat bersistem, geologi dasar laut bersistem, peta geologi kelautan regional dan hidrogeologi bersistem maupun pemetaan geokimia mineral serta inventarisasi sumber daya alam lainnya termasuk penaksiran cadangan batubara. Saat ini cadangan batubara Indonesia, yaitu sebesar 20,98 miliar ton dengan sumber daya sebesar 104,8 miliar ton. Cadangan tersebut terutama tersebar di Pulau Sumatera sebesar 60% dan Pulau Kalimantan 35%, sedangkan sisanya tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Papua.

Pembangunan peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (i) meningkatnya produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri; (ii) terwujudnya penambangan

<sup>18</sup> Kuncoro, Mudrajad, "Keamanan Energi dan Pangan", *Investor Daily*, [http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=53698](http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53698), 14 April 2008.

yang efisien dan produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan; (iv) meningkatnya peran serta masyarakat, terutama melalui wadah koperasi, dalam pengusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat; (v) meluasnya kegiatan pengusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia; (vi) tersedianya pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.<sup>19</sup>

Pada bulan Desember 2008, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan mendasar menurut UU ini adalah berubahnya bentuk pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan, dan pengakuan adanya kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Di samping itu, UU ini juga mengamanatkan adanya peningkatan nilai tambah dari bahan tambang dengan mewajibkan perusahaan tambang yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri.

Regulasi mensyaratkan dilakukannya kegiatan pasca tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dengan demikian terdapat perubahan definisi pertambangan menjadi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Selain itu juga perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan memperhatikan aspirasi daerah.

Dari sisi isi dibandingkan UU 11/1967, UU No 4/2009 jelas lebih lengkap dan komprehensif. Paling tidak ada 22 pasal yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Berbagai prinsip mendasar telah dimasukkan di dalam perundang-undangan ini, termasuk prinsip pembangunan yang berkelanjutan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

<sup>20</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

PP No. 23 Tahun 2010 juga mengatur mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri yang ditetapkan Menteri meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.

Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri yang tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri. Pengendalian produksi mineral dan batubara dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan aspek lingkungan, melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara, dan mengendalikan harga mineral dan batubara.

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat. Bahkan masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sanksi administratif yang diberikan berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau c. pencabutan IUP atau IUPK.

### **C. MP3EI Sektor Pertambangan: Percepatan Transformasi Ekonomi**

MP3EI yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai komplementer bukan "mengganti" dokumen RPJMN dan RPJP Nasional memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dengan lokus dan indikator yang terukur. MP3EI tidak saja berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan perluasan dan percepatan bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota terkait, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi dunia usaha/ investor dalam menanam modal di Indonesia.

Hal terpenting dari MP3EI ini adalah berproses dengan prinsip *business as not usual* dan bertindak *out of the box*. Di segala lini, membutuhkan perubahan *mind set*, yang menitik beratkan pada pendekatan solutif, bukan terkonsentrasi pada pendekatan masalah yang dihadapi. Titik berat pada percepatan transformasi ekonomi dengan segala taktik yang strategis. Misalnya, meningkatkan *value added*, mendorong inovasi, mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional, dan memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator yang mempercepat proses agar mampu melompat lebih jauh.

Arah MP3EI tidak pernah bergeser, tetap berpatokan pada Visi Indonesia 2025 mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>21</sup> Posisi geo-strategis Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunikan yang khas menempatkan gugusan pulau-pulau besar sebagai pilar utama dalam mengkategorikan 6 koridor ekonomi itu sesuai teori keunggulan mutlak dan komparatif. Seluruh koridor ekonomi tersebut harus terintegrasi dengan baik, tidak terpisah-pisah, untuk memaksimalkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi secara merata.

Dalam dokumen MP3EI telah teridentifikasi pengembangan dan penguatan sektor pertambangan berada pada koridor Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan rencana investasi dan aspek-aspek yang diperlukan guna mendukung investasi, terutama aspek regulasi, konektivitas/infrastruktur dan SDM/Iptek. Dokumen MP3EI disusun sebagai bagian dari upaya Indonesia menjadi negara terbesar ke 12 di dunia pada tahun 2025 dengan PDB USD 3,8-4,5 T dan pendapatan perkapita USD 13.000 – 16.000. Untuk Tahun 2011 sampai tahun 2014 ditargetkan pertumbuhan ekonomi riil nasional sebesar 6,4 – 7,5%.

**Gambar 1. Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia**



Sumber: MP3EI

<sup>21</sup> <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/12545-spirit-business-as-not-usual-dalam-mp3ei.html>

Hal ini merupakan tantangan bagi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 mencapai 4,95%, yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Selain itu Kalimantan Timur juga dihadapkan tantangan fundamental ekonomi lainnya yaitu mengurangi ketergantungan perekonomiannya pada sumberdaya yang tidak terbarukan. Pada Tahun 2010, PDRB Kalimantan Timur sebesar 72,5% masih bersumber dari sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan.

Pemerintah Provinsi berupaya mendapatkan *Participating Interest* sebesar 10% sesuai UU No 22 Tahun 2001 dan PP 35 Tahun 2004 dan juga mendorong penerapan Domestic Market Obligation bagi Migas sebagaimana diatur dalam UU 22/2001 dan Keputusan MK No 002/PUU-I/2003 yang terutama akan digunakan untuk mendorong pembangunan Industri, seperti Pabrik Pupuk Kaltim V di Bontang maupun Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Sebagai sebuah dokumen, MP3EI telah disusun dengan komprehensif dan memenuhi unsur-unsur integralitas yang didukung oleh kebijakan atau peraturan lanjutan untuk menjamin dapat terlaksana diseluruh koridor ekonomi, perangkat pengawasan yang ditetapkan sangat rentan dengan kendala birokrasi. Perpres 32 tahun 2011 telah mengamanatkan dibentuknya Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian. Selanjutnya untuk setiap Koridor dibentuk Tim Kerja.

Pemantauan pelaksanaan MP3EI dilaksanakan melalui mekanisme laporan KP3EI Provinsi mengenai pelaksanaan project MP3EI setiap 2 minggu sekali untuk selanjutnya dilaporkan oleh Ketua Tim Kerja Koridor kepada Ketua Harian KP3EI setiap bulan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

#### **D. Tantangan Percepatan dan Perluasan Sektor Pertambangan**

Permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan diantaranya adalah rendahnya minat berinvestasi untuk perusahaan mineral dan batubara yang disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan. Berbagai kegiatan

usaha pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan hasil tambang memerlukan dana yang besar, dan oleh karena itu pembangunan di bidang pertambangan ini masih sangat tergantung kepada investor skala besar, termasuk investor asing. Investasi asing, di samping akan membawa modal, umumnya juga memasukkan kemampuan teknologi, manajemen, dan saluran pemasaran. Namun, persaingan untuk menarik investasi tersebut, baik antar negara maupun antar sektor ekonomi di dalam negeri, semakin ketat di tahun-tahun mendatang.

Di samping itu, pembangunan di bidang pertambangan dihadapkan pada masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan pada masa mendatang cenderung menghadapi tantangan yang mengarah ke daerah yang lebih sulit dan terpencil. Hal ini menuntut upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan yang lebih maju.

Sampai saat ini keterkaitan usaha pertambangan dengan industri pengolahan dan sektor-sektor lainnya belum optimal berkembang. Hal ini berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh nilai tambah yang potensial, serta ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku hasil tambang. Dalam kaitan itu, peningkatan industri pengolahan hasil tambang, pengembangan serta penerapan standarisasi produk dan jasa pertambangan, merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pengembangan keterkaitan usaha pertambangan dengan sektor industri secara efisien.

Permintaan akan komoditi tambang, terutama batubara, dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, terutama apabila harga minyak mentah dunia meningkat. Peningkatan permintaan ini diikuti dengan peningkatan produksi dan ekspor batubara. Namun di lain pihak, kebutuhan batubara di dalam negeri meningkat dengan tajam, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik. Ke depan, *Domestic Market Obligation* (DMO) bagi pengusaha batubara menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk dalam negeri.<sup>22</sup>

Amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, memberikan peran lebih besar kepada daerah belum diikuti dengan peningkatan kemampuan teknis/managerial aparat Pemerintah Daerah. Karakteristik industri pertambangan yang unik dan khusus memerlukan pemahaman yang mendalam, baik dari segi teknis penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/lingkungan dari kegiatan penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi. Rendahnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan serta kurang harmonisnya peraturan perundangan lintas sektor,

---

<sup>22</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, Kementerian Bidang Perekonomian

menyebabkan timbulnya permasalahan dalam perijinan, pengawasan eksploitasi, produksi, serta pengendalian dampak lingkungan dan konflik lahan.

Indonesia selain memiliki cadangan mineral berskala besar juga memiliki cadangan mineral berskala kecil dan tersebar di banyak tempat. Cadangan mineral tersebut sering tidak efisien jika diusahakan secara modern dan menggunakan teknologi canggih, tetapi masih ekonomis jika diusahakan oleh pertambangan rakyat. Pertambangan jenis ini sering diusahakan oleh rakyat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha pertambangan rakyat secara tradisional tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang secara berarti. Dengan demikian sangat mungkin dikatakan kegiatan pertambangan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi. Kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan, baik oleh swasta maupun Pemerintah, menuntut tersedianya data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan rinci. Dewasa ini upaya pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemanfaatan informasi geologi dan sumber daya mineral belum sepenuhnya mampu memberikan informasi secara cepat, lengkap dan efisien. Sistem informasi geologi dan sumber daya mineral perlu dipadukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir.

Belum terpadunya konsep penataan ruang juga menjadi kendala dalam pengembangan usaha pertambangan karena sering mengakibatkan tumpang tindih dalam pemberian hak pemanfaatan lahan dan ruang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawasan hutan lindung/konservasi telah menghambat laju pertumbuhan investasi eksplorasi tambang. Sebagian besar kawasan tambang yang sudah dikeluarkan ijin penambangannya berada di kawasan hutan lindung, yang umumnya ditetapkan kemudian. Konflik fungsi peruntukan lahan ini telah mengurangi jaminan hukum dalam pengusahaan pertambangan. Untuk itu perlu ada harmonisasi yang lebih efektif antara pemanfaatan potensi mineral dan batubara dengan pelestarian jasa lingkungan kawasan hutan dengan mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan kepedulian atas lingkungan, sosial, dan sistem pemerintahan.<sup>23</sup>

Pembiayaan menjadi salah satu kunci keberhasilan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Karena itu, sejak awal pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan pembiayaan untuk proyek-proyek dalam MP3EI dan tidak mungkin mengandalkan Anggaran Pendapatan

<sup>23</sup> Analisis SNREA bagi RPJMN 2010-2014, Laporan Antara Tim Analisa SEA, November 2008.

dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai proyek-proyek MP3EI. Sebagian besar investasi dalam MP3EI senilai Rp4.000 triliun akan diarahkan ke luar Jawa dan hanya 28% yang dialokasikan untuk proyek-proyek di Jawa. Banyaknya investasi yang ditanamkan ke luar Jawa menunjukkan terwujudnya perluasan pembangunan ekonomi.

Tantangan terberat nanti adalah pemerintah harus melakukan negosiasi ulang kontrak terkait mineral dan bahan tambang dengan mengedepankan konsep untuk mengembangkan industri hilir, atau bahan tambang yang memiliki nilai tambah. Masalahnya, kebijakan yang bagus seringkali tidak dibarengi komitmen dan langkah konkret dalam implementasinya. Kita tentu tidak ingin kebijakan hilirisasi industri hanya bersifat parsial tanpa dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya.

Selain itu juga pemerintah harus berupaya menyiapkan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk menarik minat investor turut serta terlibat dalam konsep MP3EI. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat untuk memperkuat keterhubungan regional dan nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai regulator. Salah satu daya tarik investor adalah pemberian insentif dari pemerintah, salah satunya tax holiday yang diyakini dapat menarik banyak investor yang masuk ke Indonesia. Bentuk lain dari keringanan yang diberikan pemerintah kepada investor adalah dana penjamin proyek-proyek potensial.

Dengan asumsi struktur impor didominasi barang modal dan bahan baku, diharapkan nilai impor segera turun dalam beberapa bulan ke depan dan nilai ekspor akan melonjak kembali seiring dengan peningkatan hasil produksi dalam negeri dan membaiknya kondisi ekonomi negara tujuan ekspor. Dan yang terpenting pemerintah harus menjaga pasar domestik dengan cara memperketat masuknya produk jadi dari luar negeri. Dua menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu mulai memotori rencana penerapan bea keluar untuk ekspor bahan mentah mineral dan tambang sebesar 25%.<sup>24</sup>

Untuk mengimplementasikan berbagai peluang tersebut Pemerintah Daerah perlu merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan nilai tambah pertambangan yang memprioritaskan penggunaan sumberdaya lokal secara optimal untuk aspek tenaga kerja, potensi sumberdaya alam daerah setempat, kemitraan dengan pengusaha lokal serta keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal dalam konsultasi dan perencanaan.<sup>25</sup>

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporat dan masyarakat madani (*civil society*) perlu duduk bersama

<sup>24</sup> <http://www.duniaindustri.com/berita-industri-dunia/1049-komoditas-tambang-indonesia-akan-dikenai-bea-keluar-ekspor-25.html>

<sup>25</sup> Kuncoro, Mudrajad, "Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global", UPP STIM YKPN Yogyakarta, Cetakan Pertama Agustus 2009.

untuk mendorong keterbukaan, transparansi dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pascatambang menjadi sebuah diskursus terbuka sebagaimana cerita sukses Norwegia yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan industri ekstraktifnya.

Pemangku kepentingan secara bersama-sama diharapkan dapat mempersiapkan kebijakan pembangunan daerah pascatambang dalam dokumen resmi perencanaan, kebijakan CSR dan program pemberdayaan masyarakat serta perbaikan perencanaan dokumen tutup tambang bagi perusahaan sehingga hasil-hasil pertambangan berupa dampak beragam (*multiplier effect*) dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam wujud berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan IPM masyarakat yang tercermin dengan membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat pada daerah yang kaya sumberdaya mineral sehingga pertambangan yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan bukan menjadi kutukan sumber daya.<sup>26</sup>

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sebagai sebuah dokumen, MP3EI merupakan dokumen perencanaan strategis bagi tercapainya visi dan misi dalam RPJPN dan RPJMN yang komprehensif dan terarah serta mengintegrasikan seluruh elemen yang ada untuk mewujudkannya.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertambangan pada percepatan ekonomi nasional, ekspor dalam bentuk produk antara ketimbang bahan mentah dengan terlebih dahulu mengedepankan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
3. Pada energi dan industri pertambangan, restorasi lahan dan reklamasi lahan pada periode pasca penambangan dilakukan dan dievaluasi secara berkala dan mengacu pada pendekatan kapasitas daya dukung dan memperhatikan konversi lahan.
4. Daerah penghasil sumberdaya mineral perlu mempunyai prespektif baru kedepan dengan merumuskan *grand strategy* dan peta jalan (*road map*) yang merupakan *exit strategy* pengelolaan pertambangan yang mengarah pada transformasi perubahan struktur perekonomian dari dominasi pertambangan ke sumberdaya lokal terbarukan seperti pertanian dalam arti luas, infrastruktur, dan sumberdaya manusia unggul sebagai langkah

<sup>26</sup> Majalah Free Trade Watch, colaps Pertambangan Indonesia dan Alternatif Kebijakan, DR Lukman Malanuag, Desember 2011

antisipasi atas habisnya pertambangan dengan kendala masa operasi tambang yang relatif pendek dan cadangan yang terus menipis.

5. Pemerintah harus menjamin ketersediaan regulasi dan implementasinya untuk memastikan daya dukung lahan dan infrastruktur, pelaksanaan teknis penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/ lingkungan dari kegiatan penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi serta harmonisasi peraturan perundangan lintas sektor.

## B. Saran

Pemangku kepentingan secara bersama-sama diharapkan dapat mempersiapkan kebijakan pembangunan daerah pra dan pasca tambang dalam dokumen resmi perencanaan, kebijakan CSR dan program pemberdayaan masyarakat serta perbaikan perencanaan dokumen tutup tambang bagi perusahaan sehingga hasil-hasil pertambangan berupa dampak beragam (*multiplier effect*) dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam wujud berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan IPM masyarakat yang tercermin dengan membaiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat pada daerah yang kaya sumberdaya mineral sehingga pertambangan yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan bukan menjadi kutukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Case, Karl E & Ray C. Fair, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*", Edisi 5, Jakarta. PT. Indeks, Kelompok Gramedia, 2004.
- Blancard, Olivier, "*Macroeconomics*", Fifth Edition, Pearson International Edition, 2009.
- Jehle, A.Geoffrey dan Reny, J. Philip, "*Advanced Microeconomic Theory*", Third Edition, Ashford Colour Press Ltd. Gosport, Hampshire, 2011.
- Kuncoro, Mudrajad, "Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global", UPP STIM YKPN Yogyakarta, Cetakan Pertama Agustus 2009.
- Mankiw, N.Gregory, "*Principles of Economics*", Third Edition, South Western of Thompson Learning, South Western, 2004.

- Nicholson, W dan Snyder, C, "*Microeconomic Theory; Basic Principles and Extensions*", Tenth Edition, Thomson Learning Academic Resource Center, 2008.
- Scarth, M. William, "*Macroeconomics: An Introduction to Advanced Methods*", Third Edition, Mc Master University Bookstore, 2009.
- Salim, HS, "*Hukum Pertambangan di Indonesia*", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Revisi ke-4, 2008.
- Todaro, P. Michael dan Smith, C. Stephen, "*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*", Edisi Kedelapan, PT. Gelora Aksara Pertama, 2003.
- Yusgiantoro, Purnomo, "*Ekonomi Energi: Teori dan Praktek*", Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.

### **Dokumen Resmi**

- Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, "*Peningkatan Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemetaan Sektor Ekonomi*", Bank Indonesia, 2006.
- Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan), Program Kerja Inisiatif Tahun 2006 : "Peningkatan Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemetaan Sektor Ekonomi" Bank Indonesia.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, Kementerian Bidang Perekonomian
- Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.
- Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, BPS, Jakarta
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
- Undang-Undang No.23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Analisis SNREA bagi RPJMN 2010-2014, Laporan Antara Tim Analisa SEA, November 2008.

### **Makalah / Jurnal**

- Jonathan Di John, "*The Resource Curse, Theory and Evidence*", 2010 Elcano Royal Institute of International Studies dan Strategis, Madrid, Spanyol.
- Analisis SNREA bagi RPJMN Tahun 2010-2014, Laporan Antara Tim Analisis SEA
- Kuncoro, Mudrajad, "Antisipasi Resesi dan Gejolak Ekonomi Global", *Majalah GATRA*, No.12 Tahun XIV, 31 Januari-06 Februari 2008.

Kuncoro, Mudrajad, "Keamanan Energi dan Pangan", *Investor Daily*, [http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=53698](http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53698), 14 April 2008.

Malanuang, Lukman, "Colaps Pertambangan Indonesia dan Alternatif Kebijakan", *Majalah Free Trade Watch*, Desember 2011.

### **Internet**

"Kinerja Emiten Sektor Tambang Merosot Karena Harga Anjlok", diunduh 16 Agustus 2012 pk.09.45, <http://www.bisnis.com/articles/kinerja-emiten-sektor-tambang-merosot-karena-harga-anjlok>.

"Harga Komoditas Tekan Emiten Tambang", diunduh tanggal 16 Agustus 2012 pk. 14.40, <http://www.bakrie-brothers.com/mediarelation/detail/2332/harga-komoditas-tekan-emiten-tambang>.

"Defisit sebagai Cambuk", diunduh tanggal 16 Agustus 2012, Pk. 08.30.  
<http://www.investor.co.id/tajuk/defisit-sebagai-cambuk/41919>.

"Kebijakan Pertambangan dan Problem Keadilan Sosial", diunduh tanggal 18 April 2012 pk.11.00. <http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/14/kebijakan-pertambangan-dan-problem-keadilan-sosial/>

"Teori keunggulan mutlak dan komparatif", diunduh tanggal 16 Juli 2012, pk.10.15 [http://ilerning.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=984:teori-keunggulan-mutlak-dan-komparatif&catid=66:ekonomi-internasional&Itemid=86](http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=984:teori-keunggulan-mutlak-dan-komparatif&catid=66:ekonomi-internasional&Itemid=86),

"Komoditas Tambang Indonesia akan Dikenai Bea Keluar Ekspor", diunduh tanggal 16 Agustus 2012 pk.15.00. <http://www.duniaindustri.com/berita-industri-dunia/1049-komoditas-tambang-indonesia-akan-dikenai-bea-keluar-ekspor-25.html>

BAGIAN 2

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM  
MENDUKUNG IMPLEMENTASI MASTER PLAN PERCEPATAN DAN  
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

*oleh: Asep Ahmad Saefuloh\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia secara resmi telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan MP3EI adalah target Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$3,5 triliun pada tahun 2025 sekaligus dapat menjadi kekuatan nomor 12 di dunia dengan pendapatan per kapita menembus US\$14,9 ribu. Kemudian target tersebut meningkat menjadi sebesar US\$16,6 triliun di tahun 2045 dan dapat menjadi kekuatan nomor 7 atau 8 di dunia dengan pendapatan per kapita menembus US\$46,9 ribu.

Pencapaian target tersebut akan dititikberatkan kepada tiga pilar pembangunan di mana ketiga pilar tersebut diharapkan akan mampu menjawab masalah-masalah yang menghambat pergerakan ekonomi selama ini. Adapun ketiga pilar yang dimaksudkan adalah: *Pertama*, peningkatan nilai (*value added*) terhadap komoditi yang tersedia. Caranya adalah dengan menekan kegiatan ekspor barang mentah yang selama ini berakibat pada *income* nilai yang kurang memadai. Pilar ini menjadi penting karena rendahnya pendalaman industri sehingga ekspor lebih didominasi oleh barang mentah. Hal ini muncul dikarenakan ketiadaan dukungan yang kuat dari pemerintah dalam pemanfaatan teknologi yang berbasis inovasi dan efisiensi, termasuk dukungan anggaran penelitian dan pengembangan. Padahal, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi<sup>1</sup> secara konsisten dan berkelanjutan. *Kedua*, konektivitas atau keterhubungan (*connectivity*) antara 6 kawasan ekonomi nasional, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua-Maluku, di mana di 6 koridor tersebut diantaranya akan dikembangkan *cluster* dan kawasan ekonomi khusus (*sub-concept*). Pilar ini akan memicu dan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan secara bersamaan dan wilayah-wilayah di Indonesia harus terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. *Ketiga*, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang ada melalui 6 koridor ekonomi.

Adanya pilar ketiga tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah sehingga untuk mempercepat kemampuan SDM dan Iptek pemerintah akan mengembangkan elemen utamanya dengan:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama yang terkait dengan pengembangan program utama;

---

<sup>1</sup> Banyak pihak mempertanyakan, berapa besar sumbangan hasil Iptek terhadap pembangunan ekonomi. Untuk melihat sumbangan bagi Iptek, laporan UNESCO menyebutkan sumbangan riset dan pengembangan terhadap ekonomi dunia tumbuh dari 27,9% pada 1997 menjadi 31,5% pada 2002 dengan kontribusi yang sangat besar dipegang Cina (Subagyo, 2008).

2. Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/keahlian tenaga kerja;
3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan baik oleh pemerintah maupun swasta, melalui pemberian insentif, peningkatan anggaran, dan mengundang keahlian serta teknologi dari luar; dan,
4. Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

Arti penting SDM tersebut dikarenakan untuk mendukung program MP3EI khusus koridor Jawa, untuk tahun 2012 saja akan dibangun kurang lebih 120 industri.<sup>2</sup> Tentu saja ini akan menciptakan lapangan kerja baru untuk ±5000 tenaga kerja. Bahkan untuk 2012-2014 untuk sektor kegiatan utama akan membutuhkan 4.731.770 tenaga kerja dengan rencana investasi senilai Rp2,22 triliun.<sup>3</sup> Begitu juga kebutuhan tenaga kerja baru diberbagai bidang pada tahun 2025 akan mencapai ±18 juta tenaga kerja baru. Kebutuhan pada tahun tersebut mengacu pada visi 2025 yang ditetapkan dalam MP3EI 2011-2025 yang memuat sekitar 22 proyek ekonomi di 6 koridor, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku.<sup>4</sup>

Sementara yang terkait dengan Iptek, perannya akan semakin penting karena dalam kerangka MP3EI akan terdapat proyek-proyek yang menuntut pemanfaatan Iptek, seperti: Proyek Pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Sumatera; Proyek Pertambahan dan Pengolahan Nikel dan Kobal dengan tenaga hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, di provinsi Maluku Utara; Proyek Pembangunan Pabrik Baja Modern yang merupakan *joint operation* antara PT Krakatau Steel dan POSCO Korea Selatan; Pencanaan Proyek FSRU atau *Floating Storage and Regasification Unit* Jawa Barat; Proyek *Chemical Grad Aluminium* (CGA) berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; Proyek *Broadband Access* dan *Through Broadband Access Plan* oleh PT. Telkom yang merupakan pemerataan *Access Broadband* untuk seluruh wilayah Indonesia; dan beberapa proyek lainnya. Berdasarkan hal di atas maka menarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai SDM dan Iptek ini dengan fokus bahasan adalah bagaimana mempersiapkan SDM dan Iptek dalam menghadapi MP3I.

## B. Perumusan Masalah

Dalam rangka mendukung kesiapan SDM dan Iptek dalam melaksanakan MP3EI, maka dalam program MP3EI untuk tahun 2014 pemerintah berjanji akan menambah 7.000-10.000 SDM jenjang S3 bidang Iptek. Namun kondisi itu diperkirakan sulit tercapai karena semakin tinggi jenjang pendidikan semakin

<sup>2</sup> "Pemerintah Akan Bangun 120 Industri Dukung MP3EI," Selasa, 13 Desember 2011 ([www.antaraneews.com/ekonomi/makro/22](http://www.antaraneews.com/ekonomi/makro/22), diakses 3 Maret 2012).

<sup>3</sup> Suara Pembaharuan, "Indonesia Membutuhkan 1,9 Juta Tenaga Kerja Baru," 16 Mei 2012.

<sup>4</sup> "Kadin dan Pemerintah Upayakan Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan," 15 September 2011 11:27 ([www.kadin-in.donesia.or.id/.../Kadin-dan-Pemerintah-Upayakan-](http://www.kadin-in.donesia.or.id/.../Kadin-dan-Pemerintah-Upayakan-), diakses 12 Maret 2012).

sedikit siswa yang mampu memasukinya. Hal ini didasarkan hasil penelitian Nani Grace Berliana dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa SDM Iptek di Indonesia hanya sekitar 5 persen dari total siswa pendidikan dasar yang dapat lulus di perguruan tinggi. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua siswa pendidikan dasar dapat meneruskan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Penjelasan lebih lanjut memperlihatkan bahwa data SDM berpendidikan S3 khususnya di bidang Iptek menunjukkan bahwa selama periode tiga tahun rata-rata lulusan dalam negeri S3 setiap tahun sekitar 2.000 orang untuk semua bidang, sementara lulusan luar negeri kurang dari 500. Kemudian jika sampai tahun 2014 keadaan tidak berubah maka penambahan jumlah lulusan S3 bidang iptek maksimal hanya 2.000.<sup>5</sup> Karena itu untuk mencapai target pelaksanaan MP3EI diperlukan strategi dan program yang tepat, komitmen dan kerja keras. Dengan demikian pokok permasalahannya adalah bagaimana kebijakan harus disusun agar dapat mempersiapkan SDM untuk mendukung MP3EI?

### C. Tinjauan Pustaka

Tidak ada yang menyangkal bahwa SDM memegang peran penting dalam pembangunan.<sup>6</sup> Bahkan SDM menjadi penting dan pembeda dari lainnya.<sup>7</sup> Karena itu jika ingin mempercepat perubahan ekonomi maka perlu diimbangi dengan perubahan terhadap kemampuan (*skill*) pekerja.<sup>8</sup> Asumsinya adalah SDM sebagai modal terbesar untuk penggerak pembangunan adalah sebagai mata rantai di mana jika manusia terdidik maka produktivitas meningkat dan semakin tinggi, dan jika produktivitas tinggi maka akan memberikan keuntungan yang tinggi sehingga akan memungkinkan investasi lebih tinggi, dan pada akhirnya pengembangan SDM semakin tinggi sehingga akan memungkinkan dapat berproduksi semakin tinggi lagi sehingga melahirkan pula kemajuan yang lebih tinggi lagi.<sup>9</sup>

Karena itu dengan adanya program MP3EI berarti perlu ada perubahan dalam pengelolaan SDM. Terutama untuk mensukseskan program MP3EI yang mensyaratkan kemampuan SDM, di samping kemajuan Iptek. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengembangan SDM, karena bagaimana pun kualitas SDM akan menentukan perkembangan daerah, terutama dikaitkan dengan pembangunan MP3EI yang dibagi-bagi dalam koridor-koridor ekonomi (yang menunjukkan

<sup>5</sup> "Target 7.000-10.000 S3 Iptek Tahun 2014 Sulit Tercapai," Selasa, 11 Oktober 2011 (<http://www.suarapembaruan.com/home/target-7000-10000-s3.../12239>, diakses 3 Maret 2012).

<sup>6</sup> Lisa M. Lynch (Ed.). *Training and the Private Sector International Comparisons*. The University of Chicago Press, Ltd., London, 1994.

<sup>7</sup> Jeffrey Pfeffer. *Keunggulan Bersaing Melalui Manusia (Competitive Advantage through People)*, Alih Bahasa Agus Maulana (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), p.14.

<sup>8</sup> Ronald E. Ehrerberg, E and Robert S.Smith. *Modern Labor Economics, Theory and Public Policy*. Sixth Edition. (Addison-Wesley Educational Publisher, Inc, 1996) , p.31.

<sup>9</sup> Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi* (Jakarta: Kompas, 2009), p. 437.

pembangunan regional). Namun demikian pembangunan kualitas SDM ini akan sangat terkait dengan berbagai sektor pembangunan lainnya,<sup>10</sup> terutama keterkaitan dengan pengembangan Iptek. Untuk itu perlu adanya strategi dalam pengelolaan SDM secara makro kedepannya.

Secara makro pengembangan SDM merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia, yaitu mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan SDM<sup>11</sup> yang disejalankan dengan pengembangan Iptek. Untuk itu terdapat empat hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, mengoptimalkan SDM yang ada. Kebijakan ini berangkat dari kondisi realitas bahwa SDM yang ada perlu diberdayakan (*empowering*). Hal ini menjadi penting dikarenakan SDM yang ada bisa jadi memiliki potensi yang dibutuhkan tetapi belum dimanfaatkan. *Kedua*, mensinerjikan dengan pengembangan dunia penelitian. Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa antara Iptek dan SDM saling terkait, di mana kemajuan Iptek akan terjadi jika didorong dengan kemajuan SDM, dan salah satunya adalah bagaimana mendorong tumbuh dan berkembangnya perguruan tinggi (*high education*), dan perguruan tinggi sendiri merupakan penggerak bagi perkembangan Iptek.<sup>12</sup> *Ketiga*, bagaimana mendorong partisipasi pihak swasta (pemilik modal industri) terhadap pengembangan perguruan tinggi.<sup>13</sup> Peran swasta menjadi penting karena bagaimanapun pemerintah memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pembiayaan<sup>14</sup>. Arti penting pemilik modal industri untuk terlibat dalam pengembangan perguruan tinggi dikarenakan umumnya model pembiayaan perguruan tinggi swasta lebih menitikberatkan pada sumbangan mahasiswa (*tuition and fees*) sehingga biaya pendidikan cenderung lebih tinggi dibandingkan milik pemerintah.<sup>15</sup> Karena itu jika melibatkan pemilik modal industri, maka akan terjadi subsidi dari industrinya. *Keempat*, perlu adanya penataan regulasi yang terkait dengan SDM di mana regulasi harus mampu mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan SDM pada tingkat mikro.

---

<sup>10</sup> McLean, G. N., Osman-Gani, A. M., & Cho, E. ed., *Human Resource Development as National Policy. Advances in Developing Human Resources* (August, 2004).

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmodjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), p.2-3.

<sup>12</sup> Pundy Pillay "Higher Education and Economic Development: Literature Review," the Centre for Higher Education Transformation (CHET), 2011. Lihat juga Irena Macerinskiene and Birute Vaiksnoraite, "the Role of Higher Education to Economic Development," *Management*, Vol.2, No.11, 2006.

<sup>13</sup> Martin Carnoy. "Higher Education and Economic Development: India, China, and the 21st Century," Working Paper No. 297, Stanford University, October 2006.

<sup>14</sup> Kondisi terbaiknya adalah ketika lulusan perguruan tinggi semakin meningkat, maka pendanaan pemerintah untuk sektor pendidikan tinggi seharusnya meningkat (Karkkeinnen, 2006).

<sup>15</sup> Daniel C. Levy, "Access through Private Higher Education: Global Patterns and Indian Illustrations," *PROPHE Working Paper* No.11, April 2008.

## II. PEMBAHASAN

### A. Optimalisasi Peran SDM yang Ada

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam MP3EI akan dibangun banyak proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup dan jenis yang beragam. Di antara jenis SDM yang dibutuhkan tersebut adalah SDM bidang teknik. Untuk kebutuhan SDM teknik memang suatu persoalan karena umumnya Indonesia masing kekurangan. Hal ini muncul karena lulusan perguruan tinggi di Indonesia untuk bidang studi khusus, seperti sarjana teknik sangat terbatas, yaitu sekitar 37.000 orang lulusan per tahun. Padahal jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah lulusan sarjana teknik dari Cina yang rata-rata per tahun sekitar 600.000 orang dan India dapat menghasilkan sekitar 450.000 orang per tahun.<sup>16</sup>

Langkah yang dapat ditempuh dalam upaya penguatan kemampuan SDM bidang teknik (termasuk ilmu-ilmu dasar) adalah dengan mengoptimalisasi SDM berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ilmuwan Indonesia yang berada di luar negeri. Pemanfaatan ilmuwan Indonesia di luar negeri sangat penting dikarenakan Indonesia termasuk negara yang mengalami *brain drain* meskipun belum pada tingkat yang mengkhawatirkan<sup>17</sup> dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Saat ini, banyak ilmuwan Indonesia yang berada di luar negeri dan diantaranya merupakan ilmuwan yang diperhitungkan dalam perkembangan iptek sehingga mereka dengan sendirinya menjadi aset bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia

<sup>16</sup> "Kadin dan Pemerintah Upayakan Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan," 15 September 2011 11:27 ([www.kadin-indonesia.or.id/.../Kadin-dan-Pemerintah-Upayakan-](http://www.kadin-indonesia.or.id/.../Kadin-dan-Pemerintah-Upayakan-), diakses 12 Maret 2012).

<sup>17</sup> Fenomena *brain drain* merupakan fenomena global, dan merupakan persoalan serius bagi negara-negara miskin dan berkembang. Indonesia termasuk negara yang mengalami *brain drain*, meskipun tidak begitu parah dibandingkan negara-negara lain. Namun demikian karakteristiknya, proses terjadinya *brain drain* pada SDM Indonesia adalah adanya kebijakan pengiriman pelajar/ilmuwan untuk belajar ke luar negeri. Karakteristik lain adalah keberadaan ilmuwan Indonesia di luar negeri memiliki reputasi yang baik, namun tidak memiliki spesifik kepakaran. Hal penting lainnya adalah keberadaan mereka turut menyumbang bagi kemajuan iptek. Kemudian dilihat dari sisi faktor penghambatnya adalah Indonesia masih memiliki jumlah ilmuwan yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Meskipun Indonesia tidak mengalami *brain drain* dengan skala masif, tetapi terdapat faktor-faktor yang diidentifikasi dapat menjadi pendorong untuk terjadinya *brain drain*. Beberapa faktor tersebut adalah: rendahnya dana riset yang salah satu berdampak pada rendahnya kesejahteraan ilmuwan, potensi yang dimiliki ilmuwan dan keilmuan, dimilikinya beberapa peneliti potensial, dan adanya minat dan beasiswa sekolah ke luar negeri. Sedangkan dilihat dari faktor penariknya adalah adanya tawaran beasiswa. Analisis lebih lanjut dapat dilihat dalam, Asep Ahmad Saefuloh, "Fenomena Brain Drain Pada Sumber Daya Manusia Indonesia," Kajian, Vol.17, No.2, Tahun 2012.

memiliki potensi kekayaan sumber daya bagi pengembangan Iptek ke depan. Kondisi tersebut menjadikan mereka yang berada di luar negeri semakin betah untuk tetap tinggal di sana, dan sementara kondisi di dalam negeri terdapat banyak SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi dan sekaligus menjadi potensi *brain drain* yang semakin besar kedepannya. Untuk itu ke depan Indonesia perlu melakukan strategi *reserves brain*. Dua contoh negara yang berhasil memanfaatkan strategi *reserves brain* dan berhasil mempercepat kebangkitan industrinya adalah Cina dan India. Karena itu Indonesia harus belajar banyak kepada dua negara tersebut dalam memanfaatkan kaum intelektualnya.<sup>18</sup>

Untuk itu pemerintah dan sektor swasta yang berperan sebagai aktor dalam MP3EI harus memanfaatkan keberadaan ilmuwan Indonesia yang berada di luar negeri, agar mereka mau kembali ke Indonesia, sekaligus memanfaatkan ilmuwan yang ada di tanah air agar mereka tidak lari ke luar negeri. Mereka (ilmuwan dalam dan luar negeri) harus dapat dikondisikan untuk bersinerji dalam mengembangkan proyek-proyek *hightech* yang ada dalam program MP3EI.

## B. Pengembangan Penelitian

Dalam mengembangkan SDM yang sudah ada perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur penelitian yang memadai agar para ilmuwan (peneliti) tertantang untuk menerapkan dan mengembangkan kemampuannya di bidang Iptek. Implementasi dari hal itu dapat dilakukan dengan membangun laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan yang dapat skala prioritasnya adalah pengembangan infrastruktur penelitian yang terkait dengan Iptek yang dibutuhkan dalam program MP3EI.

Untuk itu maka anggaran penelitian dan pengembangan harus ditingkatkan, terutama pendanaan yang berasal dari anggaran negara. Ini penting karena umumnya swasta cenderung tidak tertarik dengan investasi di bidang Iptek.<sup>19</sup> Karena itu setidaknya pada 2014 anggaran penelitian dan pengembangan ditargetkan dapat mencapai satu persen dari GDP dan terus meningkat sesuai dengan kurun waktu perencanaan MP3EI.

Pada tahap awal, dengan keterbatasan anggaran penelitian dan pengembangan, maka alokasi anggaran dapat diberikan kepada para aktor inovasi untuk mengembangkan infrastruktur penelitian yang dapat menunjang bagi penciptaan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau minat pihak industri yang akan dikembangkan dalam kerangka MP3EI. Hal ini menjadi penting karena produk inovasi tersebut sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas, dan sudah tentu akan mendukung bagi keberhasilan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam

<sup>18</sup> Lebih lanjut dapat dibaca pada kajian Asep Ahmad Saefuloh berjudul, "Kebijakan Reserves Drain: Mengapa Penting dan Alternatif Pendekatan," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1, Tahun 2012.

<sup>19</sup> Sebagai contoh di negara-negara berkembang pengembangan riset pertanian lebih banyak dilakukan oleh pemerintah dibandingkan swasta (Nassem, et al, 2010)

MP3EI. Adapun aktor inovasi yang dimaksudkan adalah di perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kepemerintahan (LPNK), serta pusat riset swasta. Hal ini menjadi penting karena persoalan utama dalam pengembangan sistem inovasi terutama bagi perguruan tinggi adalah ketiadaan permintaan.<sup>20</sup> Karena itu pemerintah melalui program MP3EI-nya dapat menjadi sisi pendorong permintaan, yaitu permintaan-permintaan riset yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program-program dalam MP3EI.

Perhatian terhadap perguruan tinggi ini penting karena dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi juga ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan iptek dan/atau seni. Dengan demikian memberikan perhatian kepada perguruan tinggi berarti dengan sendirinya memperhatikan bagi pengembangan iptek dan SDM.

### C. Partisipasi Swasta

Di tengah keterbatasan anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan, maka peran swasta menjadi penting. Adapun swasta yang dimaksudkan adalah para pemilik modal industri (konglomerat), selama ini sudah terlihat nyata peran swasta dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Beberapa universitas telah dikembangkan seperti Universitas Bakri, Universitas Ciputra, Universitas Sahid, Universitas Mercu Buana, dan lainnya. Peran swasta dalam pendidikan menjadi penting bukan semata karena terbatasnya anggaran pemerintah, tetapi juga karena keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam menyerap mahasiswa baru.<sup>21</sup>

Peran swasta sendiri cukup signifikan untuk menghadirkan lulusan perguruan tinggi, terutama di bandingkan di Asia Timur dan Pasifik.<sup>22</sup> Namun ke depan jumlahnya diharapkan terus meningkat. Contoh di atas masih memperlihatkan

<sup>20</sup> Lundvall, Bengt-Ake, "Higher Education, Innovation and Economic Development," Paper to be presented at the World Bank's Regional Bank Conference on Development Economics, Beijing, January 16-17, 2007.

<sup>21</sup> Namun demikian, peran swasta ini memiliki keterbatasan terutama untuk perguruan tinggi dengan program-program pendidikan yang sisi permintaannya rendah (Rabossi, 2010).

<sup>22</sup> Harry Anthony Patrinos and Naoki Umemiya. "Private Sector Involvement in Education: A Review of World Bank Activities in East Asia and Pacific, 1996-2002," Human Development Sector Unit East Asia and the Pacific Region, The World Bank, Juli 2004.

bahwa peran swasta ada tetapi masih terbatas. Karena itu jika diasumsikan 50 swasta terbesar di Indonesia mau menyisihkan lima persen kekayaannya untuk investasi di bidang SDM, maka banyak universitas baru dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bisa didirikan dan dikembangkan. Terutama pembangunan Perguruan Tinggi yang dikaitkan dengan ketimpangan regional<sup>23</sup>, di mana arah pembangunan kampus ditujukan untuk luar Jawa.<sup>24</sup>

Manfaat dari adanya peran swasta dalam membiayai dan membuka perguruan tinggi berarti akan membuka kesempatan bagi SDM Indonesia untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi semakin luas. Peran sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di dapat dilakukan mulai dari yang paling sederhana sampai paling kompleks. Hal yang paling sederhana adalah sektor swasta dapat memberikan sumbangan dan bersifat sukarela dalam bentuk adanya dana khusus dari sektor swasta untuk membiayai studi SDM yang berprestasi di perguruan tinggi terkemuka di negara-negara maju dan dalam negeri. Selain bentuk itu dana khusus tersebut dapat juga berupa sumbangan dana dan peralatan kepada perguruan tinggi, termasuk didalamnya beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa dan dosen untuk studi lanjut.<sup>25</sup> Jika hal ini dapat terjadi maka proses adopsi Iptek bisa semakin lancar, selain itu agar inovasi Iptek di Indonesia dapat semakin berkembang.

Bentuk lain adalah sektor swasta dapat mensponsori dan membeli hasil-hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedua belah pihak, mengeluarkan dana untuk mendapatkan layanan pengujian produk, pendidikan, dan pelatihan dari perguruan tinggi. Meskipun bentuk ini masih menghadapi berbagai kendala yang sering timbul di lapangan yaitu kedua belah pihak masih belum menemukan kebersamaan/kesepakatan yang diharapkan. Alternatif lain adalah sektor swasta secara aktif dapat menawarkan program kerjasama untuk melakukan penelitian bersama, perjanjian penelitian, konsorsium penelitian, pusat penelitian, laboratorium yang berbasis industri, dan penelitian kolektif dalam jangka panjang.<sup>26</sup> Pola ini sebenarnya ideal untuk membangun aktivitas yang prospektif dan prestisius di masa depan, tetapi masih belum dianggap penting atau tidak proaktif (hanya menunggu) maka pola ini harus diperjuangkan secara terpadu. Alternatif lain yang penting untuk jangka panjang adalah sektor swasta dapat melakukan *joint research ventures* melalui pembentukan pusat penelitian bersama dan hasilnya didayagunakan baik oleh perguruan tinggi maupun pihak

<sup>23</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Karahasan dan Uyar (tanpa tahun) di mana ketimpangan ekonomi regional berhubungan dengan ketimpangan di sektor pendidikan.

<sup>24</sup> Sebagaimana keberhasilan Cina dalam mengurnagi ketimpangan regional dengan meningkatkan jumlah kampus-kampus di daerah-daerah tertinggalnya (Bickenbach and Liu, 2011).

<sup>25</sup> Charles M. Vest. "Industry, Philanthropy, and Universities: The Roles and Influences of the Private Sector in Higher Education," *Research & Occasional Paper Series*: CSHE.12.06, September 2006.

<sup>26</sup> Penting untuk melakukan kerjasama antara swasta dan pemerintah terutama untuk membiayai penelitian yang khusus (*specialisation*), seperti yang dikembangkan di Austria, Jerman dan Norwegia (Dinges, et al, 2007).

swasta, dan *Joint research ventures* untuk mendirikan pusat penelitian dalam rangka mengembangkan berbagai macam temuan baru.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka partisipasi swasta adalah bagaimana mendorong pendirian perguruan tinggi pada koridor-koridor perekonomian. Hal ini menjadi penting karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 2.647 perguruan tinggi dalam bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Dari jumlah tersebut 212 diantaranya merupakan perguruan tinggi negeri, sedangkan perguruan tinggi swasta berjumlah 2.435. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, (tahun 2012),**

No.	Bentuk Perguruan Tinggi	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Akademi	15	735	750
2	Institut	23	61	84
3	Politeknik	50	112	162
4	Sekolah Tinggi	69	1.136	1.205
5	Universitas	55	391	446
	Jumlah	212	2.435	2.647

Sumber: Jamaris 2012.

Sementara itu terkait dengan riset-riset yang dilaksanakan oleh swasta dalam kerangka kerjasama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk mendukung program-program yang ada dalam MP3EI dan terintegrasi dengan kebijakan pengembangan penelitian sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

#### **D. Deregulasi Ketenagakerjaan**

Salah satu faktor dominan yang menjadikan sektor swasta (industri) dapat berkembang dengan baik adalah dimilikinya SDM dengan jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri. Keberadaan faktor dominan tersebut nantinya akan membuat industri tersebut menjadi mampu berkembang di masa depan. Arti penting SDM tersebut menjadikan keberadaannya perlu diatur dan dikembangkan pada kebijakan level pusat dan daerah. Namun secara politis SDM di bidang industri masih kurang diperhatikan sehingga tidak heran dalam UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, masalah SDM tidak diatur. Hal ini berbeda dengan sumber daya alam (SDA) yang mendapat tempat dalam UU tersebut. Seharusnya kedua hal tersebut harus diperhatikan secara bersama-sama karena SDA dan SDM merupakan faktor produksi penting.<sup>28</sup> Karena itu pembenahan SDM di bidang perindustrian melalui pengaturan masalah SDM sebagai salah satu muatan dari RUU Perindustrian dengan pengaturan bahwa pengembangan industri

<sup>27</sup> Begitu juga bagaimana partisipasi swasta dengan perguruan tinggi dengan mengembangkan kurikulum yang dibutuhkan oleh sektor swasta (Emunemu, 2008).

<sup>28</sup> Asep Ahmad Saefuloh, "Kebijakan Ketenagakerjaan Pada Sektor Industri di Batam," *Kajian*, Vol.16, No.1, Tahun 2011.

pada suatu kawasan perlu melibatkan penduduk setempat sebagai bagian dari tenaga kerjanya, dan perlu adanya perencanaan pengembangan SDM baik pada level nasional, regional maupun lokal dalam kebijakan pengembangan industri yang dibarengi dengan peningkatan koordinasi antar instansi pusat-daerah, antar instansi pusat, dan antar instansi daerah.<sup>29</sup>

Pada level mikro, sektor swasta dalam upaya pengembangan SDM, perusahaan swasta tertentu telah memiliki sistem perekrutan dan pendidikan dan pelatihan yang telah maju, bahkan sebagian sudah memenuhi standar di negara industri maju. Karena itu, sudah selayaknya citra SDM sebagai aset terpenting perusahaan makin menonjol. SDM bukan sekedar bekerja dan menghasilkan produk tertentu, namun lebih jauh lagi perlu dikembangkan motivasi dan kemampuannya. Dampak positif lanjutannya adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi. Hal ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan oleh Abdullah et al di Malaysia bahwa pengelolaan SDM yang optimal dengan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya telah meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>30</sup>

Di Singapura, pihak pemerintah telah menetapkan regulasi khusus mengenai masalah ketenagakerjaan, yaitu dengan mewajibkan sektor swasta untuk membantu pelatihan dan perekrutan tenaga kerja. Tentu saja jumlah tenaga kerja yang ditangani disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Sedangkan pola dan sistem pelatihan yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya inisiatif untuk hal seperti itu, sektor swasta di Indonesia juga sudah banyak yang melaksanakannya, namun belum begitu banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, diperlukan regulasi khusus yang mengatur persoalan tersebut, hingga pola perekrutan dan pelatihan ini bukan sekedar kewajiban perusahaan swasta, namun merupakan kebutuhan untuk mencukupi keperluan tenaga kerja. Jika hanya sebagai kewajiban yang dipaksakan, maka bisa menjadi beban bagi perusahaan. Terlebih dari itu, terdapat kenyataan bahwa antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada masih terdapat gap, sehingga sektor swasta diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja.

Berdasarkan hal di atas, sudah selayaknya para pengusaha memperhatikan pola dan sistem perekrutan serta pelatihan. Dilembagakannya peran swasta dalam mengatasi persoalan tenaga kerja, paling tidak bisa mengatasi persoalan yang lebih spesifik, yaitu menyangkut kualitas tenaga kerja. Alternatif lain adalah bagaimana swasta mengembangkan perguruan tinggi yang khusus menyediakan pendidikan dan pelatihan, seperti di Jepang dengan konsep *Special Training Schools*.<sup>31</sup> Hal ini menjadi penting dikarenakan tren di masa mendatang

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Zaini Abdullah, "The Effect of Human Resource Management Practices on Business Performance among Private Companies in Malaysia," *International Journal of Business and Management*, Vol.4, No.6, June 1999, pp.65-72.

<sup>31</sup> Leonard Cantor, "The Role of the Private Sector in Vocational Education and Training: The case of Japan's Special Training Schools," *The Vocational Aspect of Education*, Vol.39, No.103, pp. 35-41.

bahwa pasar kerja berorientasi pada pendidikan teknis dan kejuruan (*labour market-oriented technical and vocational education*).<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka momentum adanya MP3EI ini dapat dijadikan langkah penting dalam melakukan deregulasi di sektor ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan pengembangan SDM, dan juga bagaimana mengkaitkan antara perencanaan pengembangan industri dengan perencanaan SDM secara nasional.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Untuk mempersiapkan SDM dan Iptek dalam Program MP3EI, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

1. Perlunya upaya penguatan kemampuan SDM dengan mengoptimalkan dan memberdayakan peran SDM berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan salah satunya dengan memanfaatkan ilmuwan Indonesia yang berada di luar negeri.
2. Dalam mengembangkan SDM yang ada perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur penelitian yang memadai agar para peneliti bisa menerapkan dan mengembangkan kemampuannya di bidang Iptek.
3. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menghasilkan SDM yang berkualitas pula. Namun demikian kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih belum memenuhi tuntutan masyarakat dan masyarakat global di mana faktor penyebabnya antara lain karena kurang didukung oleh faktor-faktor penyelenggaraan pendidikan yang memadai, anggaran pemerintah yang terbatas. Untuk itu perlu dikembangkan kerjasama mutualistis antara perguruan tinggi dengan sektor swasta.
4. Peningkatan kualitas SDM dalam aspek ketenagakerjaan melalui sistem keterpaduan antara dunia pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar (Program MP3EI). Begitu juga peran swasta perlu dilibatkan dalam pengembangan SDM, dimulai dengan memperhatikan pola dan sistem perekrutan serta pelatihan. Dilembagakannya peran swasta dalam mengatasi persoalan tenaga kerja, paling tidak dapat mengatasi persoalan kualitas SDM Indonesia.

---

<sup>32</sup> Reinhard Klose, "Corporate HRD: Scope and Strategies," pp.7-15, dalam "Corporate HRD and Skills Development for Employment: Scope and Strategies." International Conference in Bali/ Indonesia, 24-26 November 2008.

## B. Saran

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah dan DPR perlu mempercepat harmonisasi Undang-Undang yang terkait dengan ketenagakerjaan, yaitu: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana pengembangan SDM menjadi kewajiban bagi perusahaan; dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, di mana SDM harus ditempatkan sebagai salah satu sumber daya bagi pengembangan industri di Indonesia sehingga SDM harus dikaitkan dengan perencanaan pengembangan industri nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ehrerberg, Ronald. E dan Robert S. Smith. *Modern Labor Economics, Theory and Public Policy*. Sixth Edition. Addison-Wesley Educational Publisher, Inc, 1996.
- M. Lynch, Lisa (Ed.). *Training and the Private Sector International Comparisons*. London: The University of Chicago Press, Ltd., 1994.
- McLean, G. N., Osman-Gani, A. M., dan Cho, E. (Ed.). *Human Resource Development as National Policy. Advances in Developing Human Resources*, August, 2004.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Pfeffer, Jeffrey. *Keunggulan Bersaing Melalui Manusia (Competitive Advantage through People)*. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi* Jakarta: Kompas, 2009.

### Jurnal

- Abdullah, Zaini. "The Effect of Human Resource Management Practices on Business Performance among Private Companies in Malaysia," *International Journal of Business and Management*, Vol.4, No.6, June 1999, pp.65-71.
- Cantor, Leonard. "The Role of the Private Sector in Vocational Education and Training: The Case of Japan's Special Training Schools." *The Vocational Aspect of Education*, Vol.39, No.103, pp.35-41.
- Dinges, Michael et al. "Monitoring Sector Specialisation of Public and Private Funded Business Research and Development." *Science and Public Policy*, Vol.34, No.6, July 2007, pp.431-443.

- Emmunemu, Benedict O. "Private Sector Participation in Education and Skills Development in Nigeria." *European Journal of Social Sciences*, Vol.6, No.4, 2008, pp.165-170.
- Macerinskiene, Irena and Birute Vaiksnoaraite, "the Role of Higher Education to Economic Development," *Management*, Vol.2, No.11, 2006, pp.80-90.
- Nassem, Anwar et al. "Private-Sector Investment in R&D: A Review of Policy Options to Promote Its Growth in Developing-Country Agriculture," *Agribusiness*, Vol. 26, No.1, pp. 143-173, 2010, pp.143-173.
- Saefuloh, Asep Ahmad. "Kebijakan Ketenagakerjaan Pada Sektor Industri di Batam," *Kajian*, Vol.16, No.1, Tahun 2011.
- Saefuloh, Asep Ahmad. "Kebijakan Reserves Drain: Mengapa Penting dan Alternatif Pendekatan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.3, No.1, Tahun 2012 (*forth coming*).
- Saefuloh, Asep Ahmad. "Fenomena Brain Drain Pada Sumber Daya Manusia Indonesia," *Kajian*, Vol.17, No.2, Tahun 2012 (*forth coming*).
- Subagyo, Y. "Dunia Iptek dan Kontribusi," *Media Indonesia*, 24 April 2008.

### **Working Paper**

- Bickenbach, Frank and Wan-Hsin Liu. "Regional Inequality of Higher Education in China and the Role of Unequal Economic Development." Kiel Working Paper No. 1692, April 2011.
- Carnoy, Martin. "Higher Education and Economic Development: India, China, and the 21st Century," Working Paper No. 297, Stanford University, October 2006.
- Levy, Daniel C. "Access through Private Higher Education: Global Patterns and Indian Illustrations." *PROPHE Working Paper* No.11, April 2008.
- Rabossi, Marcello. "Universities and Fields of Study in Argentina: A Public-Private Comparison from the Supply and Demand Side." *PROPHE Working Paper* 15, February 2010.
- Vest, Charles M. "Industry, Philanthropy, and Universities: The Roles and Influences of the Private Sector in Higher Education," *Research and Occasional Paper Series*: CSHE.12.06, September 2006.

### **Makalah dan Laporan Penelitian**

- Karahasan, Burhan Can, dan Emrah Uyar. "Spatial Distribution of Education and Regional Inequalities in Turkey." the paper is presented at the 3 Annual Meeting of Spatial Econometrics Association (SEA) in Barcelona. Authors are greatfull for the comments and the questions of the participants of the conference, tanpa tahun.

Karkkeinen, Karra. "Emergence of Private Higher Education Funding within the OECD Area," September, 2006.

Klose, Reinhard. "Corporate HRD: Scope and Strategies," pp.7-15, dalam "Corporate HRD and Skills Development for Employment: Scope and Strategies." International Conference in Bali/Indonesia, 24-26 November 2008.

Lundvall, Bengt-Ake, "Higher Education, Innovation and Economic Development," Paper to be presented at the World Bank's Regional Bank Conference on Development Economics, Beijing, January 16-17, 2007.

Patrinos, Harry Anthony and Naoki Umemiya. "Private Sector Involvement in Education: A Review of World Bank Activities in East Asia and Pacific, 1996-2002," Human Development Sector Unit East Asia and the Pacific Region, The World Bank, Juli 2004.

Pillay, Pundy. "Higher Education and Economic Development: Literature Review," the Centre for Higher Education Transformation (CHET), 2011.

### **Artikel Internet**

Jamaris. "Daftar Lengkap Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia." Juni 2011 (<http://jamarisonline.blogspot.com/2011/06/daftar-lengkap-perguruan-tinggi-negeri.html>, diakses 12 Agustus 2012).

### **Dokumen**

Republik Indonesia. "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025," Kementerian bidang Perekonomian, 2011.

### **Berita Surat Kabar**

Suara Pembaharuan, "Indonesia Membutuhkan 1,9 Juta Tenaga Kerja Baru," 16 Mei 2012.

### **Berita Internet**

"Pemerintah Akan Bangun 120 Industri Dukung MP3EI," Selasa, 13 Desember 2011 ([www.antaraneews.com/ekonomi/makro/22](http://www.antaraneews.com/ekonomi/makro/22), diakses 3 Maret 2012).

"Target 7.000-10.000 S3 Iptek Tahun 2014 Sulit Tercapai," Selasa, 11 Oktober 2011 (<http://www.suarapembaruan.com/home/target-7000-10000-s3.../12239>, diakses 3 Maret 2012).

BAGIAN 3

**PERAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN PERLUASAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

*oleh: Edmira Rivani\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: rif\_green@yahoo.com.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan tantangan yang masih harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah bukan hanya pemerataan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antardaerah.

Dengan wilayah yang terbentang sepanjang 3.977 mil dan luasnya mencapai 1.910.931,32 km<sup>2</sup>,<sup>1</sup> Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki luas wilayah terbesar di dunia dengan tingkat keragaman geografis, sosio-kultural, ekonomis dan sumber daya alam (SDA). Dengan wilayah seluas itu, secara administratif Indonesia terbagi ke dalam 33 provinsi dan 304 kabupaten dan 97 kota.<sup>2</sup> Dalam peta geografis dan administratif seperti itu, persoalan disparitas pembangunan antara daerah yang satu dengan lain tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini terjadi tidak hanya secara struktural seperti keberpihakan kebijakan pengelolaan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini tetapi juga karena faktor terbatasnya akses wilayah itu terhadap wilayah lain yang lebih maju. Oleh karena itu, dalam koridor pengelolaan wilayah, pemerintah memunculkan konsepsi “daerah tertinggal”.

Daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Secara kategoris, penentuan suatu daerah sebagai daerah tertinggal karena beberapa faktor utama, yakni karakteristik geografis, kondisi SDA, sumber daya manusia (SDM) dan terbatasnya infrastruktur.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah tersebut, maka pemerintah melalui RPJMN 2010-2014 telah menetapkan strategi pengembangan wilayah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;

<sup>1</sup> “Profil Indonesia”, disunting dalam [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=112&Itemid=1722](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722). Diakses 27 Februari 2012.

<sup>2</sup> Data diolah dari sumber Ditjen PUM Kemendagri sampai dengan bulan Mei 2010. dalam [http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/05/05/d/a/data\\_wilayah\\_pum\\_2010.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/05/05/d/a/data_wilayah_pum_2010.pdf). Diakses 27 Februari 2012.

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan*. Hal. 6

2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur. Untuk itu maka pemerintah menyusun *Masterplan* Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.<sup>4</sup> Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan *breakthrough* yang didasari oleh semangat "*Not Business As Usual*", melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

Merujuk pada klasifikasi secara umum atas persoalan yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal mencakup sejumlah hal yang satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat. Persoalan-persoalan itu antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, persoalan rendahnya SDM. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. *Kedua*, persoalan tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Hal. 8

<sup>5</sup> *Ibid.*

Persoalan infrastruktur memiliki titik singgung dengan persoalan dasar yang dihadapi oleh pemerintah pusat khususnya dalam konteks terbatasnya anggaran publik dan luasnya wilayah negara. Dalam lingkup percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyediaan infrastruktur dasar menjadi persoalan di mana keberpihakan pemerintah daerah tidak hanya dalam rangka mempermudah mobilitas dan interaksi dengan wilayah lain yang lebih maju tetapi juga menopang kegiatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. *Ketiga*, keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Persoalan ini terkait dengan persoalan keterbatasan anggaran keuangan daerah sementara di sisi lain pemerintah pusat belum sepenuhnya memfasilitasi bagi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan untuk berperan dalam pembangunan daerah. *Keempat*, persoalan pengelolaan SDA lokal terkait dengan persoalan peran SDA lokal dalam menopang pendapatan di tingkat nasional tetapi juga yang lebih penting dapat memberikan peningkatan tingkat kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat secara lokal.

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana seharusnya pengelolaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan, khususnya melalui MP3EI.

### D. Metode Penulisan

Dalam melakukan analisis data, digunakan analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat tentang objek penelitian. Pada penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan dengan studi pustaka dengan menggali teori yang telah berkembang sesuai dengan objek penelitian.

### E. Tinjauan Pustaka

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang dapat dikategorikan relatif tertinggal. Untuk lebih memberikan gambaran, berikut akan diuraikan faktor penyebab ketertinggalan, sebaran daerah tertinggal dan kriteria penetapan daerah tertinggal.

#### 1. Faktor Penyebab

Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:<sup>6</sup>

##### a. Geografis

Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan,

<sup>6</sup> Sari, Perwita. 2009. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten Tertinggal Kawasan Timur Indonesia*. Institut Pertanian Bogor: Bogor.

pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

b. Sumber daya alam

Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

c. Sumber Daya Manusia

Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

d. Prasarana dan Sarana

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

e. Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial

Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

f. Kebijakan Pembangunan

Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

## 2. Sebaran

Sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain:<sup>7</sup>

- Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relatif lebih maju;
- Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;
- Daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak diperbatasan antarnegara baik batas darat maupun laut;
- Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

e. Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.

### 3. Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal

Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal adalah wilayah administrasi kabupaten. Hal ini sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang secara penuh diberikan kepada pemerintah kabupaten. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah. Berdasarkan pendekatan tersebut, dalam awal RPJMN 2004-2009, terdapat 199 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, dan selama periode tersebut 50 kabupaten telah terentaskan menjadi daerah maju. Saat ini jumlah daerah tertinggal sebanyak 183 kabupaten, di mana sebanyak 34 kabupaten merupakan daerah pemekaran dari kabupaten induk. Dari 183 kabupaten tertinggal tersebut, jumlah desa yang tertinggal sebanyak 26.746 desa atau 35,47% dari total 75.410 desa yang ada di Indonesia. Padahal, masih banyak desa-desa tertinggal yang berada di kabupaten yang tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal.<sup>8</sup> Masing-masing kriteria yang digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan kabupaten tertinggal kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator. Masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi dengan indikator persentase penduduk miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1);
2. Kondisi Sumber Daya Manusia dengan indikator Persentase Penduduk Menganggur, Persentase Desa Balita Kurang Gizi, Persentase Desa Non Balita Kurang Gizi, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Jumlah prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk, Rata-rata Jarak Pelayanan Prasarana Kesehatan, Persentase Kemudahan Pencapaian Prasarana Kesehatan, Angka Melek Huruf, Jumlah SD dan SMP per 1000 Penduduk, dan Jarak Rata-rata Desa/Kota tanpa SD/SMP;
3. Kondisi Prasarana (Infrastruktur) dengan indikator Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Aspal, Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Diperkeras, Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Tanah, Jumlah Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Lainnya, Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon, Jumlah Bank Umum, Jumlah Bank Perkreditan Rakyat, dan Presentase Desa dengan Pasar non Permanen;
4. Kondisi Kelembagaan dan Keuangan Daerah, yang diukur dari besaran celah fiskal, yaitu merupakan dana yang dapat dipergunakan untuk belanja pembangunan diluar belanja rutin daerah;

<sup>8</sup> Ronald Tanamas. *Bedah Desa KPDT Lahirkan Desa Pusat Pertumbuhan*. Online, [http://today.co.id/read/2011/04/05/22504/bedah\\_desa\\_kpdt\\_lahirkan\\_desa\\_pusat\\_pertumbuhan](http://today.co.id/read/2011/04/05/22504/bedah_desa_kpdt_lahirkan_desa_pusat_pertumbuhan). Diakses pada tanggal 25 April 2012.

5. Aksesibilitas, yang diukur oleh rata-rata jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kabupaten/kota yang membawahi;
6. Karakteristik Daerah dengan indikator Persentase Desa Gempu Bumi, Persentase Desa Tanah Longsor, Persentase Desa Banjir, Persentase Desa Bencana Lainnya, Persentase Desa di Kawasan Lindung, Persentase Desa Berlahan Kritis, dan Persentase Desa Berkonflik Setahun terakhir.

Pada RPJPN 2005-2025 kebijakan pengembangan wilayah tertinggal disusun untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di antaranya dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu:<sup>9</sup>

1. Menyelenggarakan pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi keteringgalan pembangunannya dengan daerah lain.
4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan perekonomian dan perencanaan pembangunan selama ini terlalu sektoral. Sejak jaman pemerintahan Soekarno dan Soeharto model hitungan dan basis perencanaan pembangunan nasional adalah basis sektor. Basis teks pembangunan, bukan konteks pembangunan. Konsekuensinya, banyak wilayah-wilayah Indonesia misalnya Indonesia Timur, pulau-pulau terluar, keadaannya tertinggal dan kurang perhatian. Keadaan itu menurut beberapa sejarawan bahkan sudah berlangsung 400 tahun dimana sejak lama infrastruktur di Jawa dibangun Belanda dalam intensitas yang jauh lebih maju daripada kebanyakan pulau lainnya.<sup>10</sup> Akibat lainnya, program pembangunan lebih banyak pada sektor pertanian, sektor perhubungan, sektor pendidikan, sektor pariwisata, industri manufaktur. Konsekuensi dan akibat dari pendekatan yang sektoral yang

<sup>9</sup> Samsul widodo.2011. *Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:Jakarta.

<sup>10</sup> M. Mas'ud Said. *MP3EI dan Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia Timur*. Online, <http://www.profmmasudsaid.com/indonesia-timur-mp3ei-ui.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2012.

tidak kontekstual ini sehingga seakan para pengambil kebijakan secara langsung melupakan pentingnya daerah yang tak memiliki akses infrastruktur yang kuat.

Hasil strategi pembangunan yang pincang inilah melahirkan situasi ketimpangan. Seakan akan kita membangun Indonesia, ternyata yang kita bangun dan kuatkan adalah kota-kota besar. MP3EI ini merupakan gabungan pendekatan yang terstruktur yaitu kewilayahan sekaligus sektoral dimana dalam koridor-koridor ekonomi yang ditentukan di pulau pulau besar di Indonesia akan dibangun infrastruktur dan sektor-sektor tertentu yang disesuaikan dengan konteks daerah setempat dan perhitungan makro ekonomi Indonesia.

MP3EI lahir atas keprihatinan dan masalah riil yang dihadapi pemerintah Indonesia. Ada enam hal yang mengganggu dalam aktivitas pembangunan pendorong lahirnya MP3EI, yaitu:<sup>11</sup>

1. Aktivitas ekonomi belum fokus pada industri pengolahan/peningkatan hasil tambah;
2. Kesenjangan antar wilayah. Masih terdapat kesenjangan pembangunan ekonomi antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Hal ini dapat terlihat dari distribusi PDRB masing-masing propinsi di Indonesia yang tidak merata;
3. Keterbatasan Infrastruktur. Berdasarkan *Global Competitiveness Report 2010*, Infrastruktur Indonesia berada pada ranking 82 dari 139 negara;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang saat ini sekitar 50% tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8% yang berpendidikan diploma/sarjana;
5. Urbanisasi yang sangat cepat. BPS memprediksi pada tahun 2025 penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai 65%. Implikasinya yaitu terjadinya peningkatan pada pola pergerakan, perubahan pola konsumsi, struktur produksi, konflik penggunaan lahan, struktur ketenagakerjaan, dan distribusi barang dan jasa yang membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal;
6. Dampak perubahan iklim yang memerlukan perhatian kelestarian alam.

Dengan MP3EI diharapkan daerah tertinggal khususnya di Koridor Papua-Kepulauan Maluku terdapat percepatan dan perluasan pembangunan. Secara spesifik pemerintah akan mengembangkan sektor sektor utama seperti *food estate*, tembaga, peternakan, perikanan, migas, nikel yang sangat potensial di daerah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut sektor-sektor lain juga dilanjutkan dengan mekanisme program tahunan, lima tahunan sebagaimana perencanaan pembangunan di RPJMN dan RPJPN. Daerah-daerah tertinggal masih menyimpan masalah mendasar antara lain masalah ketimpangan SDM,

<sup>11</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Siaran Pers Peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Online, <http://www.ekon.go.id/press-release/2011/05/27/siaran-pers-peluncuran-masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei>. Diakses pada tanggal 24 April 2012.

masalah perasaan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, serta kesenjangan antar daerah di wilayah-wilayah tersebut. Disamping itu ada masalah krusial tambahan seperti belum jelasnya kebijakan penataan ruang miskinnya fasilitas pengembangan moda transportasi terpadu lintas wilayah, antar kawasan, dan pusat-pusat pelayanan; masih tingginya kebutuhan penataan permukiman masyarakat yang layak huni; terlambatnya pengembangan jaringan layanan pos dan sistem telekomunikasi, sarana dan prasarana energi dan tenaga listrik dan sumberdaya air.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kondisi Masyarakat Daerah Tertinggal

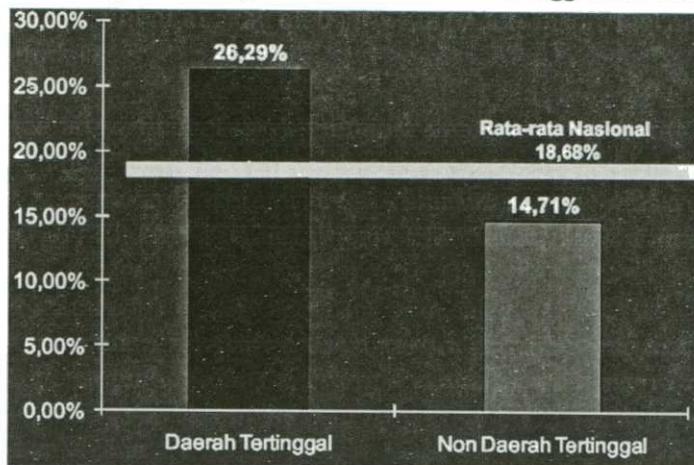
Kondisi krusial yang dihadapi Indonesia adalah terciptanya residu pembangunan berupa tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan lebarnya kesenjangan antar wilayah ditunjukkan oleh masih tingginya kesenjangan kualitas SDM, perbedaan kemampuan perekonomian, kesenjangan wilayah, kesenjangan sektor, kesenjangan desa-kota, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah. Daerah-daerah dengan pencapaian pembangunan yang rendah dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan SDM di bawah rata-rata indeks nasional, dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Secara nasional, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 masih amat tinggi, yaitu 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,66%. Pada tahun 2006 pengangguran telah mencapai hampir 40 juta jiwa atau 17,75%. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin turun menjadi 32,53 juta jiwa atau 14,15% dari total penduduk. Daerah tertinggal masih menjadi konsentrasi kemiskinan, yaitu dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 23,4%. Persebaran tingkat kemiskinan kabupaten daerah tertinggal sebagian besar (75%) berada di atas garis tingkat kemiskinan nasional (16,6%).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). *Membangun Daerah Tertinggal, Percepatan Menuju Kesetaraan, Jejak Langkah KPDT*. PT Indonesia Printer: Jakarta. Hal. 48.

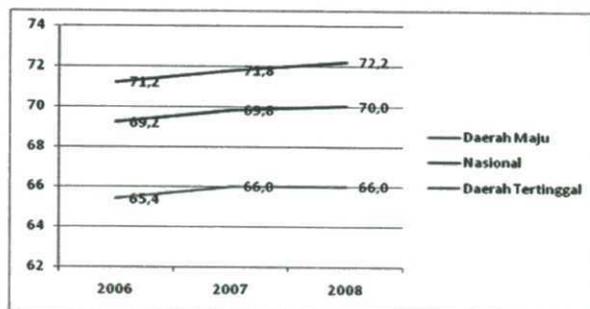
**Gambar 1. Perbandingan Keluarga Miskin di Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal**



Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2010

Realitas lain yang membelenggu kebanyakan negara berkembang adalah ketidakseimbangan dan ketimpangan yang melekat dalam struktur ekonomi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. Daerah tertinggal masih dicirikan oleh kualitas SDM yang rendah, pendapatan per kapita yang kecil, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Rendahnya kualitas SDM dapat dilihat dari pencapaian IPM yang rendah. IPM daerah tertinggal rata-rata hanya 67,7. Bahkan pada tahun 2008, sebanyak 85% berada di bawah IPM nasional (71,2).<sup>13</sup>

**Gambar 2. Perbandingan Keluarga Miskin di Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal**



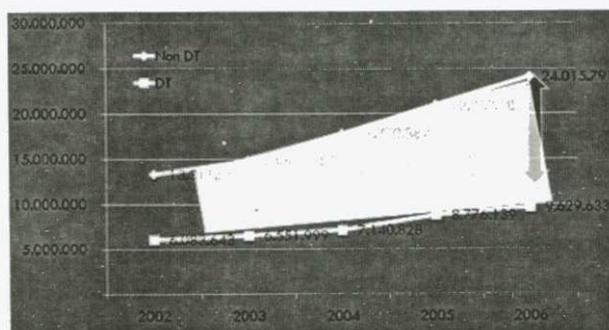
Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2010

Gambaran mengenai perkembangan perekonomian di daerah tertinggal dapat ditunjukkan dari rendahnya rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita nonmigas yang baru mencapai Rp 9,6 juta. Padahal rata-rata PDRB per kapita di non-daerah tertinggal mencapai Rp 24 juta dan secara

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 54

nasional mencapai Rp16,8 juta.<sup>14</sup> Kenyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi dalam pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, seperti potensi ekonomi lokal dan SDM di daerah tertinggal.

**Gambar 3. Perbandingan PDRB Antara Daerah Tertinggal dan Non-Daerah Tertinggal**



Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2010

Pendapatan masyarakat yang rendah ditambah dengan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum memadai bermuara pada rendahnya IPM di daerah tertinggal. Hal tersebut dikarenakan banyak daerah tertinggal yang belum tersentuh oleh sejumlah program nasional yang dijalankan pemerintah, selain kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya aksesibilitas.

## B. MP3EI dan Daerah Tertinggal

Penyebaran nilai indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten tertinggal sebagian besar berada di bawah garis nilai IPM nasional. Selain itu, daerah tertinggal masih menjadi konsentrasi adanya kemiskinan, yaitu rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 23,4%.<sup>15</sup> Penyebaran tingkat kemiskinan kabupaten daerah tertinggal sebagian besar masih berada di atas garis tingkat kemiskinan nasional. Rendahnya kualitas SDM dan tingginya kemiskinan tersebut, di antaranya berkaitan dengan permasalahan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, serta rendahnya akses terhadap sumber perekonomian yang dapat mendukung daya beli masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, program-program yang diluncurkan oleh Presiden yang terkait dengan MP3EI akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah-daerah tertinggal.

Pendekatan MP3EI berdasarkan pada pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan demikian, pendekatan dalam MP3EI merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan

<sup>14</sup> *Iid*. Hal 56

<sup>15</sup> *MP3EI, MP3KI, dan Daerah Tertinggal*. Jurnal Nasional, 3 Maret 2012

ekonomi dan infrastruktur pendukungnya. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan koridor ekonomi Indonesia. Pembangunan koridor ekonomi dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau) maka ditetapkan enam koridor ekonomi.

**Gambar 4. Tema Pembangunan Masing-Masing Koridor Ekonomi**



Sumber:Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

Jika kita melihat sebaran daerah tertinggal dari masing-masing koridor tersebut maka pada Koridor Ekonomi Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, daerah tertinggal berada pada wilayah penyangga. Sedangkan, sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku berada pada wilayah utama. Dengan demikian, melalui sebaran koridor ekonomi itu, daerah tertinggal bisa berperan sebagai wilayah penyangga dan/atau wilayah utama kegiatan pembangunan di suatu koridor.

Perhatian pemerintah terhadap penurunan angka kemiskinan khususnya di daerah tertinggal terus-menerus dilakukan. Dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai intervensi langsung dengan program-program pro rakyat. Untuk program ini ada empat klaster, yaitu program Bantuan dan Perlindungan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program Murah untuk Rakyat. Program Murah untuk Rakyat ini, yang merupakan klaster empat dari program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mencakup program rumah murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Selain program yang diluncurkan tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap rakyat kecil dan miskin. Dalam konteks ini, semua warga negara berpenghasilan rendah memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan tersebut dan menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan, pada bulan Mei diluncurkan program MP3KI. Program ini merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) untuk perlindungan sosial dan penguatan masyarakat miskin, dan disusun secara integral dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sudah diluncurkan terlebih dahulu. Melalui MP3EI, pemerintah berusaha untuk menarik investor sebanyak mungkin, tetapi diimbangi dengan pengurangan kemiskinan melalui program-program dalam MP3KI. Melalui program ini, secara bertahap angka kemiskinan akan terus ditekan dari sekarang 13% hingga menjadi 4% pada 2025.<sup>17</sup> Sehingga, melalui program ini yang disandingkan dengan MP3EI, diharapkan akan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### C. Faktor Penentu Keberhasilan MP3EI Dalam Membangun Daerah Tertinggal

Berbagai skema dilakukan untuk daerah tertinggal dalam kaitan MP3EI. Program-program ini bersamaan dengan program pembangunan terencana melalui PRPJM dan RPJP. Sebagaimana konsep yang telah dikemukakan pemerintah MP3EI tidak menggantikan kerangka perencanaan pembangunan reguler. Diantaranya ialah pembangunan jalan raya Timika-Enarotali sepanjang 269 km pada Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, dengan investasi sebesar Rp. 900 Miliar oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke; proyek jalan raya dari Merauke-Waropko sepanjang 511 km yang membutuhkan dana Rp. 2,2 Triliun, sebagai tahap kedua, sebelum akhirnya menembus ke Jayapura; serta proyek pertambangan dan pabrik pengolahan Nikel dan *Cobalt* dengan teknologi Hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Proyek ini didanai oleh PT. Weda *Bay Nickel* sebesar Rp50 Triliun yang akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama selesai pada tahun 2016 dan tahap kedua tahun 2021, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.500-3.000 orang pada saat operasi.<sup>18</sup>

Namun, bukan berarti dengan adanya MP3EI masalah akan selesai dengan mudah. Dalam permasalahan ini, *policy maker* bidang ekonomi, perencana pembangunan dan pelaksana pembangunan di berbagai daerah dan sektor baik pusat maupun daerah harus proaktif dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan di 6 koridor ekonomi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada prasyarat penting bagi suksesnya MP3EI dan pengembangan daerah tertinggal, hal-hal tersebut antara lain:

1. Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi MP3EI.

<sup>17</sup> Peluncuran MP3KI Mengurangi Kemiskinan Hingga Tahun 2025. Pikiran Rakyat, 23 Februari 2012

<sup>18</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Op.Cit.*

2. Peran pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan. Dunia Usaha (swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif bagi investasi. Oleh karena itu, komitmen dunia usaha dan pemerintah menjadi sangat penting dalam mendukung kebijakan yang dilakukan.
3. Reformasi kebijakan keuangan negara. Kebijakan anggaran harus dimulai dengan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang *credible* dan berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
4. Reformasi birokrasi. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan melalui penciptaan birokrasi yang efektif, birokrasi yang didukung oleh kelembagaan yang kuat serta menciptakan komitmen kepada penerapan *good governance*.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Daerah tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Adapun yang merupakan kriteria ketertinggalan adalah: (1) perekonomian masyarakat yang diukur berdasarkan prosentase jumlah penduduk miskin, dan pengeluaran konsumsi perkapita; (2) sumberdaya manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja; (3) sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur, transportasi, listrik, telepon, pasar, dan bank; (4) kemampuan keuangan daerah (celah fiskal); (5) aksesibilitas yang meliputi jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi; serta (6) karakteristik daerah, dengan mempertimbangkan banyaknya daerah yang terkena bencana, konflik, dan merupakan daerah perbatasan serta gugusan pulau kecil.

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dalam kondisi nasional yang beragam. Keberagaman ini merupakan masalah utama yang masih akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kebijakan perencanaan anggaran sebelumnya cenderung mengutamakan belanja publik dan belanja modal, dan diharapkan alokasi belanja diprioritaskan untuk mewujudkan percepatan program unggulan daerah, termasuk percepatan infrastruktur.

Salah satu program percepatan pembangunan yang diharapkan dapat pemeratakan pembangunan daerah terpencil adalah MP3EI. Sebagai sebuah program nasional yang berkaitan dengan banyak hal, maka MP3EI adalah usaha strategis yang mencerahkan pandangan setidaknya secara akademis mengandung makna pemerataan, sekaligus inklusifitas dengan makna bahwa pandangan nasional tentang daerah-daerah di berbagai pulau lebih adil.

MP3EI dengan cara pandangnya memberi peluang agar ada pandangan inovatif tentang ekonomi. MP3EI juga bisa diharapkan sebagai *economic breakthrough* dengan pendekatan spatial dan sektoral. MP3EI juga bisa diasumsikan sebagai usaha terpadu yang ditujukan untuk merubah masyarakat, baik struktur maupun kulturnya secara sistematis melalui konektivitas, perluasan dan pengurangan kesenjangan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Beberapa daerah tertinggal memiliki karakteristik daerah yang berbeda-beda, baik dari keadaan geografis apakah daerah tersebut merupakan daerah kepulauan atau daerah daratan, pola budaya masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki. Untuk itu, konsep pengembangan percepatan pembangunan daerah tertinggal tidak bisa disamaratakan seluruh daerah dalam skala nasional, sebaiknya berbasis pada potensi ekonomi daerah lokal yang dimiliki masing-masing daerah.
2. Melakukan perubahan kebijakan yang meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam serta optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya sehingga dapat mengangkat kesejahteraan rakyat. Membangun pusat pengolahan/industri yang ramah lingkungan dalam rangka menambah daya jual produk-produk sumber daya alam daerah.
3. Agar program MP3EI berjalan dengan baik untuk pengembangan daerah-daerah tertinggal maka diperlukan adanya kejelasan tujuan dan konsistensi; koridor yang tepat dan kelembagaan yang kuat; pendanaan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan; serta sinergi antara pelaku kepentingan dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Makalah

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). *Membangun Daerah Tertinggal, Percepatan Menuju Kesetaraan, Jejak Langkah KPDT*. Jakarta: PT Indonesia Printer, 2009.

Sari, Perwita. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten Tertinggal Kawasan Timur Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.

Widodo, Samsul. *Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011.

### Dokumen Resmi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan*, 2012.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*.

### Surat Kabar

*MP3EI, MP3KI, dan Daerah Tertinggal*, Jurnal Nasional, 3 Maret 2012.

Peluncuran MP3KI Mengurangi Kemiskinan Hingga Tahun 2025, *Pikiran Rakyat*, 23 Februari 2012.

### Internet

Anonimous. "Lihat Profil Indonesia" ([http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=112&Itemid=1722](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722), diakses pada tanggal 27 Februari 2012).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Siaran Pers Peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)" (<http://www.ekon.go.id/press-release/2011/05/27/siaran-pers-peluncuran-masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei>, diakses pada tanggal 24 April 2012).

- M. Mas'ud Said. "MP3EI dan Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia Timur" (<http://www.profmmasudsaid.com/indonesia-timur-mp3ei-ui.html>, diakses pada tanggal 22 April 2012).
- "Sumber Data Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri" ([http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/05/05/d/a/data\\_wilayah\\_pum\\_2010.pdf](http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/05/05/d/a/data_wilayah_pum_2010.pdf), diakses pada tanggal 27 Februari 2012).
- Tanamas, Ronald. "Bedah Desa KPDT Lahirkan Desa Pusat Pertumbuhan" ([http://today.co.id/read/2011/04/05/22504/bedah\\_desa\\_kpdt\\_lahirkan\\_desa\\_pusat\\_pertumbuhan](http://today.co.id/read/2011/04/05/22504/bedah_desa_kpdt_lahirkan_desa_pusat_pertumbuhan), diakses pada tanggal 25 April 2012).

BAGIAN 4

**KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL  
UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI  
DAN MENDUKUNG MP3EI**

*oleh Hilma Meilani\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting sebagai penggerak perekonomian nasional di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 7,3 persen pada tahun 2000 menjadi 25,75 persen pada tahun 2011, namun kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB menunjukkan tren penurunan, dari sebesar 27,83 persen pada tahun 2006 menjadi sebesar 25,75 persen pada tahun 2011.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir (2006-2010) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2006 sektor industri pengolahan tumbuh 5,27 persen dan turun menjadi sebesar 2,56 persen pada 2009 sebagai imbas krisis global di Amerika Serikat, namun pada tahun 2010 sektor industri pengolahan telah mulai membaik dengan pertumbuhan sebesar 5,12 persen.

Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan PDB pada triwulan II-2012 mengalami pertumbuhan 6,4 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2011. PDB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan II-2012 mencapai Rp650,6 triliun. Struktur PDB triwulan II-2012 didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 23,5 persen, sektor pertanian sebesar 14,8 persen, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 13,8 persen. Sektor industri pengolahan pada triwulan II-2012 mengalami pertumbuhan sebesar 5,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.<sup>1</sup>

Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia sejalan dengan kecenderungan proses pergeseran struktural yang terjadi di berbagai negara yaitu terjadi proses penurunan kontribusi sektor pertanian (sektor primer), sementara kontribusi sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi di suatu negara, berkaitan dengan akumulasi kapital dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>2</sup>

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya peran aktif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, yaitu:<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 54/08/Th. XV, 6 Agustus 2012" ([http://www.bps.go.id/brs\\_file/pdb\\_06agu12.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_06agu12.pdf), diakses 12 Agustus 2012).

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030?*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2007.

<sup>3</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Akselerasi Industrialisasi Tahun 2012 - 2014", Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2012, Jakarta, 1 Februari 2012.

*Pertama*, Pertumbuhan sektor industri cenderung melambat setelah krisis ekonomi tahun 1997/98, dan bahkan sejak tahun 2005 sektor industri tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan PDB.

*Kedua*, Struktur ekspor semakin didominasi oleh ekspor produk primer, yang ditandai dengan semakin menurunnya porsi ekspor produk manufaktur dari 76% pada tahun 2000 menjadi 50% pada tahun 2010.

*Ketiga*, Struktur industri perlu diperkuat mengingat ketergantungan pada bahan baku impor yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari persentase bahan baku impor rata-rata sekitar 30% dari total bahan baku industri besar dan sedang, serta struktur impor yang didominasi oleh impor bahan baku sebanyak 73%. Selain itu keterkaitan dengan sektor hilir industri masih sangat rendah sehingga produk mentah/primer sebagian besar diekspor dalam bentuk barang setengah jadi.

*Keempat*, Tuntutan untuk melakukan "Hilirisasi" semakin meningkat seiring dengan implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang mewajibkan pengolahan bahan mentah sebelum diekspor. Hal ini berpotensi untuk memperluas penciptaan nilai tambah melalui penambahan rantai nilai tidak hanya bagi barang tambang tetapi juga komoditi perkebunan.

*Kelima*, Kegiatan industri sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari kontribusi Pulau Jawa yang menyumbang sebesar 69% dari PDB Industri pengolahan secara nasional.

*Keenam*, Penyerapan tenaga kerja di sektor industri relatif rendah, yang terlihat dari peran sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja yang mengalami stagnasi dalam lima tahun terakhir, yaitu sekitar 12,5% dari total lapangan kerja baru. Struktur penyerapan tenaga bergeser dari sektor pertanian ke sektor jasa-jasa, terutama jasa kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sektor industri antara lain Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Mengingat pentingnya peran industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dukungan dalam bentuk insentif perlu untuk diberikan. Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia adalah dengan memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan. Oleh karena itu perlu untuk diketahui bagaimana kondisi kinerja sektor industri di Indonesia saat ini, serta kebijakan insentif fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia dan mendukung MP3EI.

## **B. Perumusan Masalah**

Sektor industri pengolahan di Indonesia berperan besar terhadap PDB nasional, serta menjadi penggerak perekonomian nasional. Permasalahan industri di Indonesia antara lain adalah menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional, menurunnya ekspor, menurunnya daya saing produksi barang di pasar internasional, menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan menurunnya investasi di sektor industri.

Untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sektor industri melalui Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia adalah dengan memberikan berbagai insentif fiskal. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kondisi kinerja sektor industri di Indonesia, dan kebijakan insentif fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia dan mendukung MP3EI.

## **C. Tujuan Penulisan**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja sektor industri di Indonesia dan kebijakan insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan mendukung MP3EI.

## **D. Metode Penulisan**

Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggambarkan fakta dan melakukan analisis terhadap data-data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan data-data sekunder dari instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Strategi Industrialisasi**

Di dalam teori ekonomi terdapat dua macam pola strategi yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu strategi Substitusi Impor (*Import Substitution*), dan strategi Promosi Ekspor (*Export Promotion*). Strategi Substitusi Impor lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pasar domestik, sedangkan Promosi Ekspor berorientasi ke pasar internasional. Strategi Substitusi Impor dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Sedangkan strategi Promosi Ekspor didasari pemikiran bahwa

laju pertumbuhan yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Berbeda dengan strategi Substitusi Impor, dalam strategi Promosi Ekspor tidak ada diskriminasi pemberian insentif dan kemudahan lainnya dari Pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi ke pasar domestik, maupun industri yang berorientasi ke pasar ekspor.<sup>4</sup>

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan Pemerintah dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak (*tax*), transfer, atau belanja pemerintah (*government spending/purchase*) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dari Pemerintah di mana pencapaian sarasannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (*domestic goods*), rumah tangga, ataupun perusahaan/swasta/pengusaha.

Stimulus fiskal (*fiscal stimulus*) adalah bagian dari kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (*aggregate demand*) yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek. Pada umumnya, stimulus fiskal diberikan ketika perekonomian berada pada level terendah di mana angka pertumbuhan cenderung mengalami menurun secara terus menerus. Ada dua bentuk instrumen fiskal yang digunakan, yaitu:

### a. Pemotongan pajak (*tax cut*)

Pemotongan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) akan mengurangi beban pendapatan sehingga pihak yang menerima beban pajak akan menaikkan kapasitas konsumsinya. Ada dua jenis pajak yang dimaksudkan menjadi sasaran dalam stimulus fiskal, yaitu pajak yang dikenakan kepada rumah tangga dan pajak yang dikenakan pengusaha (swasta). Bagi pengusaha, pemotongan pajak (*tax cut*) akan mengurangi beban biaya operasional sehingga akan lebih mampu untuk mempertahankan kapasitas produksinya, termasuk di antaranya mengurangi pilihan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

### b. Meningkatkan besarnya belanja Pemerintah

Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan kapasitas operasionalnya seperti menaikkan gaji pegawai atau dapat pula dengan menambah pembelian terhadap barang-barang kebutuhan operasional. Meningkatkan gaji pegawai akan diikuti dengan meningkatnya permintaan agregat sebagai akibat tambahan permintaan barang dan jasa dari sektor Pemerintah. Perputaran perekonomian dari sisi pengaruh Pemerintah ini selanjutnya akan diikuti dengan perputaran perekonomian dari keseluruhan rumah tangga. Jika instrumen stimulus fiskal dilakukan dengan menambah belanja Pemerintah (*government spending/*

<sup>4</sup> Tulus Tambunan, *Industrialisasi Di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

*purchase*), maka akan mendorong laju pertumbuhan output yang selanjutnya akan berpengaruh mengurangi pilihan pengusaha untuk melakukan PHK.

Secara teoritis, stimulus fiskal bekerja dalam jangka pendek. Artinya, stimulus fiskal lebih cepat mempengaruhi komponen-komponen permintaan agregat sehingga akan lebih cepat pula mendorong laju pertumbuhan output dari sektor usaha. Sesuai dengan konsepnya pula, kebijakan stimulus fiskal dirancang sedemikian rupa dengan menentukan sasaran-sasaran maupun mekanisme pelaksanaannya agar lebih tepat mengenai sasaran dan lebih cepat pula menggerakkan pertumbuhan di sektor riil. Sesuai dengan konsepnya, stimulus fiskal apabila tepat mengenai sasaran, selain waktu penyesuaian lebih pendek, juga akan menahan (sementara) merosotnya angka pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, permintaan agregat hanyalah sasaran antara. Sementara itu, sasaran yang sesungguhnya adalah untuk mengurangi atau menahan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi besarnya gelombang PHK. Oleh karena itu, apabila penentuan sasaran dalam stimulus fiskal bisa tepat atau efektif, maka akan semakin cepat pengaruhnya untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya pula menahan laju gelombang PHK.<sup>5</sup>

### 3. Insentif Fiskal

Insentif fiskal merupakan salah satu dari kebijaksanaan Pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak (*tax incentives*). Insentif pajak menurut Suandi (2003) adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Menurut Spitz (1983) penggolongan insentif pajak umumnya terdiri atas empat macam antara lain:<sup>6</sup>

- a. Pengecualian dan pengenaan pajak (*tax exemption*).
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*).
- c. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*).
- d. Penangguhan pajak (*tax deferment*).

Kebijakan Pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak merupakan rangsangan yang diberikan Pemerintah untuk dapat membangkitkan usaha sektor industri yang melemah. Kebijakan Pemerintah dalam hal ini disebut sebagai pemberian stimulus fiskal. Stimulus fiskal merupakan peniadaan pajak atau pembebasan pajak (*tax holiday*) bagi sektor industri tertentu. Pembebasan pajak (*tax holiday*) termasuk dalam pengecualian pajak (*tax exemption*).

<sup>5</sup> <http://leo4kusuma.blogspot.com/2009/01/apa-itu-stimulus-fiskal.html>, diakses 15 Juli 2012.

<sup>6</sup> Rukmini, "Pengaruh Stimulus Fiskal dan Kinerja Keuangan terhadap Peningkatan Usaha Sektor Industri (Studi pada Sektor Industri Pakan Ternak di BEJ)", (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/208813.pdf>, diakses 12 Juli 2012).

Untuk menarik investasi, baik PMDN maupun PMA, banyak negara memberikan kemudahan. Salah satunya melalui pemberian insentif perpajakan. Menurut Meyer dan Nguyen (2003) adanya insentif pajak juga menjadi salah satu motivasi bagi investor untuk menanamkan modalnya. Ciri khas insentif pajak, menurut Fletcher (2002) adalah pemberlakuannya yang tidak diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak. Jadi, jika insentif pajak itu diberikan untuk industri berorientasi ekspor, maka industri yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak berhak mendapatkan insentif.

Menurut Ikhsan (2006) ada tiga alasan mengapa insentif pajak diberlakukan. *Pertama*, sebagai sinyal bagi investor bahwa Indonesia berubah dari negara yang tertutup menjadi negara yang terbuka. *Kedua*, insentif itu diberlakukan untuk menjadikan negara itu menjadi atraktif bagi investor. *Ketiga*, terkait dengan kebijakan industri.

Bagi Indonesia, insentif pajak tetap harus diberikan secara selektif, berdasarkan sektor tertentu dan bukan per proyek. Lutfi (2007) juga menyatakan, dalam jangka panjang, pemberian insentif pajak tidak mengurangi penerimaan negara, karena dengan pemberian insentif maka investor yang menanamkan modalnya akan bertambah, sehingga dapat menambah lapangan kerja. Lapangan kerja bertambah akan meningkatkan daya beli masyarakat (*disposable income*) yang akhirnya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga penerimaan pajak meningkat.<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Kinerja Sektor Industri Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sepanjang kuartal I/2011, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas nasional tercatat rata-rata sebesar 6,88 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,12 persen. Kelompok industri besi, baja, serta logam adalah subsektor industri yang mengalami pertumbuhan yang paling signifikan yaitu sebesar 13,06 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 2,36 persen.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ninawati, "Kontradiksi Pajak", *Jurnal Ekonomi*, Tahun XIII, No.01, Maret 2008, hal.109-118.

<sup>8</sup> <http://www.kemenperin.go.id>.

**Tabel 2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas**

No.	Sub Sektor Industri Non Migas	2006	2007	2008	2009	2010*	2011**
1.	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	7,21	5,05	2,34	11,22	2,78	9,19
2.	Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,23	-3,68	-3,64	0,60	1,77	7,52
3.	Industri Kayu dan Produk Lainnya	-0,66	-1,74	3,45	-1,38	-3,47	0,35
4.	Industri Produk Kertas dan Percetakan	2,09	5,79	-1,48	6,34	1,67	1,50
5.	Industri Produk Pupuk, Kimia dan Karet	4,48	5,69	4,46	1,64	4,70	3,95
6.	Industri Produk Semen & Penggalian Bukan Logam	0,53	3,40	-1,49	-0,51	2,18	7,19
7.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	4,73	1,69	-2,05	-4,26	2,38	13,06
8.	Industri Peralatan, Mesin & Perlengkapan Transportasi	7,55	9,73	9,79	-2,87	10,38	7,00
9.	Produk Industri Pengolahan Lainnya	3,62	-2,82	-0,96	3,19	3,00	1,82
	Industri Non Migas	5,27	5,15	4,05	2,56	5,12	6,83

Sumber: BPS

Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas sampai dengan tahun 2011 mencapai sebesar 6,88 persen dengan seluruh subsektor industri mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri logam dasar, besi dan baja sebesar 13,06 persen, diikuti oleh industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,19 persen, serta industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 7,52 persen.

**Tabel 3. Persentase PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha**

No.	Sub Sektor Industri	2006	2007	2008	2009	2010*	2011**
1.	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	27,91	27,89	27,43	29,75	29,08	29,73
2.	Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	11,78	10,79	10,00	9,81	9,49	9,55
3.	Industri Kayu dan Produk Lainnya	4,29	4,01	3,99	3,83	3,52	3,31
4.	Industri Produk Kertas dan Percetakan	5,24	5,27	4,99	5,18	5,01	4,76

5.	Industri Produk Pupuk, Kimia dan Karet	13,29	13,35	13,41	13,29	13,23	12,88
6.	Industri Produk Semen & Penggalian Bukan Logam	3,37	3,31	3,13	3,04	2,96	2,97
7.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	1,73	1,68	1,58	1,47	1,43	1,52
8.	Industri Peralatan, Mesin & Perlengkapan Transportasi	31,54	32,92	34,73	32,89	34,54	34,60
9.	Produk Industri Pengolahan Lainnya	0,84	0,78	0,74	0,74	0,73	0,69

Sumber: Diolah dari BPS

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, industri peralatan, mesin dan perlengkapan transportasi masih memegang peran terbesar persentase PDB total industri, yaitu pada tahun 2011 sebesar 34,60 persen, diikuti oleh industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 29,73 persen, dan industri produk pupuk, kimia dan karet sebesar 12,88 persen.

Industri makanan-minuman adalah kontributor yang cukup signifikan terhadap PDB Indonesia. Pada tahun 2008 nilai produksi industri makanan-minuman mencapai USD 20 miliar dan tumbuh rata-rata sebesar 16 persen setiap tahun. Disamping itu, industri makanan-minuman merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling besar diantara industri manufaktur lainnya. Pada tahun 2010, industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,6 juta orang atau terjadi peningkatan sebesar 3,28 persen dibandingkan dengan tahun 2009. Kinerja lainnya dari industri makanan-minuman ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor dari industri ini selama periode Januari-Agustus 2010. Selama periode tersebut, nilai ekspor dari industri makanan terjadi peningkatan sebesar 16 persen dan minuman sebesar 13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Walaupun industri makanan-minuman tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, namun terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Salah satu regulasi yang dianggap cukup menghambat pertumbuhan industri makanan-minuman adalah peraturan yang menyebabkan tarif bea masuk produk jadi yang terbuat dari bahan baku tepung beras, kentang, susu, dan cokelat lebih rendah dibandingkan dengan tarif bea masuk dari bahan bakunya sendiri. Tantangan regulasi lainnya yang juga dianggap cukup menghambat adalah pengenaan bea masuk untuk bahan baku kemasan. Pengenaan bea masuk telah mendorong terjadinya kenaikan harga kemasan yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga produk dalam kemasan, seperti

<sup>9</sup> Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

permen dan biskuit. Dalam hal ekspor, tantangan yang dihadapi adalah biaya transportasi yang tinggi jika dibandingkan dengan margin nilai tambah produk makanan-minuman yang kecil.<sup>10</sup>

Industri tekstil adalah salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (lebih dari 1,3 juta orang secara langsung). Dari jumlah tenaga kerja tersebut, lebih dari setengah (600 ribu orang) bekerja di industri tekstil garmen yang juga merupakan industri padat karya. Industri tekstil juga merupakan salah satu sumber devisa yang penting sebagai satu-satunya manufaktur non-migas dengan net ekspor positif. Produk tekstil juga merupakan komoditi ekspor terbesar Indonesia ke Amerika Serikat. Dari sisi hulu, Indonesia masih mengimpor 90 persen kapas alam bahan baku. Indonesia memiliki iklim yang cocok untuk budi daya kapas, sehingga peluang integrasi ke arah hulu untuk mengurangi kebergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah perlu mendapat perhatian lebih lanjut.<sup>11</sup>

## **B. Kebijakan Industri Nasional**

Industri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian<sup>12</sup> didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Visi pembangunan industri nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional<sup>13</sup> adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Perindustrian telah menjalankan Program Peningkatan Daya Saing 6 Kelompok Industri Prioritas untuk periode 2010-2014, yang terdiri atas: Industri Padat Karya (industri TPT, industri alas kaki dan *furniture*), Industri Kecil Menengah (IKM), Industri Barang Modal (industri perkapalam dan permesinan), Industri Berbasis Sumber Daya Alam (kelapa sawit, karet, kakao, dan rumput laut), Industri Pertumbuhan Tinggi (otomotif dan elektronika), dan Industri Prioritas Khusus (gula, pupuk, dan petrokimia).

Pada masing-masing kelompok industri prioritas tersebut telah ditetapkan rencana aksi meliputi: restrukturisasi dan pemberian bantuan mesin dan peralatan industri, pemberian insentif fiskal seperti *tax allowance*, *tax holiday*, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), dan pembebasan PPnMB serta

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

pembebasan bea masuk barang modal, bahan baku dan komponen tertentu, pemberlakuan bea keluar terhadap kakao dan sawit untuk pengamanan bahan baku di dalam negeri, pendidikan dan pelatihan bagi IKM, serta dukungan kemudahan kredit.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:

- a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
- b. industri pionir;
- c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. industri yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- f. industri yang melakukan alih teknologi;
- g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Fasilitas yang dimaksud berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Strategi Pembangunan Sektor Industri dalam MP3EI**

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Keberhasilan implementasi MP3EI perlu didukung melalui penyempurnaan kerangka regulasi, Pembangunan infrastruktur melalui skema *public-private partnership*, serta pemberian insentif melalui berbagai kebijakan fiskal dan nonfiskal.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

MP3EI diantaranya mencakup rencana pembangunan sektor industri dalam jangka panjang. Visi pembangunan industri 2014 adalah pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan. Sedangkan visi pembangunan industri nasional jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi negara industri tangguh dunia. Selain itu, sasaran industri 2014 adalah pertumbuhan ekonomi 7-7,7 persen, pertumbuhan industri non migas 8,95 persen dan kontribusi industri terhadap PDB 24,21 persen. Sedangkan sasaran industri 2025 adalah pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, pertumbuhan industri non migas 9 persen dan kontribusi industri terhadap PDB 29,61 persen. Selain itu pada tahun 2025, sasaran penyebaran industri dari 72,81 persen Jawa dan 27,19 persen Luar Jawa, menjadi 60 persen Jawa dan 40 persen Luar Jawa.<sup>15</sup>

Dalam mewujudkan pembangunan industri dalam MP3EI, rencana aksi industri meliputi beberapa aspek: *Pertama*, pengembangan kluster industri prioritas dengan mengembangkan industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi dan terintegrasi dengan potensi sumber daya daerah. *Kedua*, dukungan pemerintah yang memiliki fungsi sebagai katalisator dengan memberikan insentif dan kemudahan dalam melakukan kegiatan industri. Kedua aspek tersebut dilengkapi dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur.<sup>16</sup>

#### **D. Kebijakan Insentif Fiskal Industri**

Kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor industri di Indonesia antara lain: *tax holiday*, *tax allowance*, penurunan tarif bea masuk, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), dan pemberian keringanan suku bunga pinjaman.<sup>17</sup>

##### **1. Tax Holiday**

Pada tanggal 15 Agustus tahun 2011 Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa *Tax Holiday* bagi industri pionir melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas tersebut diberikan kepada industri pionir dengan jumlah minimal investasi sebesar Rp1 triliun dengan bidang usaha: (1) industri logam dasar (2) industri pengilangan minyak bumi dan/atau industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (3) industri permesinan, dan (4) industri peralatan komunikasi.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> <http://www.kemenperin.go.id>.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> <http://www.kemenperin.go.id/download/1274>, *op.cit.*

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Tujuan pemberian *tax holiday* adalah untuk meningkatkan infrastruktur di lokasi investasi, mendorong penyerapan tenaga kerja domestik, alih teknologi, dan meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri. Bentuk pemberian fasilitas berupa pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat 5 tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial dengan nilai investasi sebesar 100%, dan pengurangan PPh Badan sebesar 50 % dari PPh Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan.<sup>19</sup>

## 2. *Tax Allowance.*

Untuk memberi alternatif fasilitas Pajak Penghasilan di samping *Tax Holiday* dan memperluas bidang usaha atau daerah tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 22 Desember 2011, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan insentif perpajakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

PP No. 52 Tahun 2011<sup>20</sup> merupakan revisi kedua dari PP No 1 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa *investment allowance* bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Revisi pertama PP Nomor 1 Tahun 2007 diberikan oleh PP Nomor 62 Tahun 2008. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan yang diberikan dalam PP 52 Tahun 2011 meliputi:<sup>21</sup>

- i. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah Penanaman Modal, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun, masing-masing sebesar 5 persen per tahun. Fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto tersebut dimaksudkan agar pada awal periode operasi komersial, Wajib Pajak tidak dibebani dengan pengenaan Pajak Penghasilan Badan yang besar sehingga dapat mempercepat pengembalian investasi dan meningkatkan imbal hasil investasi.
- ii. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sehingga masa total penyusutan aktiva menjadi setengah dari masa penyusutan dan amortisasi yang berlaku normal. Fasilitas percepatan masa penyusutan dan amortisasi aktiva ini dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada awal periode operasi komersial investasi untuk meringankan *cash flow* usaha.
- iii. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri, yakni sebesar 10 persen atau

<sup>19</sup> <http://www.kemenperin.go.id/download/1274>, *op.cit.*

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

<sup>21</sup> <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/media%5Cketpres2701.pdf>, diakses 2 Agustus 2012.

tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

- iv. Perpanjangan masa kompensasi kerugian, dari 5 tahun menjadi maksimal 10 tahun. Perpanjangan tersebut diberikan apabila Wajib Pajak berada di kawasan industri dan kawasan berikat, mempekerjakan 500 orang tenaga kerja Indonesia, melakukan investasi untuk infrastruktur ekonomi dan sosial, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan paling sedikit 5 persen dari jumlah investasi, dan menggunakan bahan baku hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 persen.

Dibandingkan ketentuan sebelumnya (PP 62 tahun 2008), PP 52 tahun 2011 membawa perubahan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- i. Penyempurnaan bidang usaha tertentu yang mendapat fasilitas untuk mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung hilirisasi industri, mendukung kebijakan pengembangan industri nasional, serta untuk mendukung program MP3EI.
- ii. Lebih memprioritaskan pengembangan daerah-daerah tertentu, untuk mendukung pemerataan pembangunan.

### 3. Penurunan Tarif Bea Masuk.

Revisi PMK No. 241 Tahun 2010 tentang Perubahan Tarif Bea Masuk, yang menurunkan bea masuk beberapa kelompok industri seperti: Industri Pangan, Industri Pakan Ternak, serta Industri Manufaktur; mengingat beberapa bahan baku, bahan penolong, dan barang modal dari kelompok industri tersebut di atas belum diproduksi atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap impor cukup tinggi dan mempengaruhi daya saing industri nasional.<sup>23</sup>

### 4. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

Dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen, peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara, Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal berupa BMDTP kepada industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2012.

Kebijakan tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.011/2012 sampai dengan nomor 110/PMK.011/2012 tanggal 13 Juni 2012 mengenai pemberian bea masuk ditanggung Pemerintah atas

<sup>22</sup> [http://www.ollydondokambey.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1446:pemerintah-luncurkan-insentif-perpajakan-untuk-investment-grade&catid=37:utama&Itemid=53](http://www.ollydondokambey.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:pemerintah-luncurkan-insentif-perpajakan-untuk-investment-grade&catid=37:utama&Itemid=53), diakses 2 Agustus 2012.

<sup>23</sup> <http://www.kemenperin.go.id/download/1274>, *op.cit.*

impor barang dan bahan guna memproduksi barang/jasa tahun anggaran 2012 untuk 15 (lima belas) sektor industri. Hal ini dijelaskan dalam PMK Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

BMDTP adalah pengembalian bea masuk bagi impor komponen beberapa sektor industri yang belum bisa diproduksi/dipenuhi oleh industri dalam negeri. Kelompok industri manufaktur yang berhak menerima BMDTP adalah sektor industri komponen kendaraan bermotor, elektronik, perkapalan, alat berat, transformator PLTU, pupuk, telekomunikasi, alat tulis dan serat optik. Sektor lainnya adalah industri pembuatan kemasan plastik, tinta khusus (*toner*), produksi kereta api serta resin sintesis. Insentif tersebut juga diberikan kepada perusahaan reparasi/perawatan pesawat terbang dan industri peralatan/obat infus. Anggaran BMDTP terbesar diberikan bagi industri komponen otomotif sebesar Rp147,35 miliar, reparasi pesawat terbang Rp109,67 miliar dan industri plastik senilai Rp81,95 miliar.<sup>24</sup>

Pemerintah berharap fasilitas BMDTP dapat mendorong industri dalam negeri di tengah tantangan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Total pagu BMDTP yang dialokasikan pemerintah dalam APBN-P 2012 mencapai Rp500 miliar-Rp600 miliar.<sup>25</sup>

Penetapan pemberian intensif fiskal berupa BMDTP kepada industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2012 diberikan kepada industri sektor tertentu bersifat strategis yang menggunakan barang dan bahan impor untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk dipasarkan di dalam negeri dengan kriteria: (i) menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi konsumen, (ii) meningkatkan daya saing, (iii) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan (iv) meningkatkan pendapatan negara.

Ketentuan untuk barang dan bahan impor dengan insentif BMDTP yaitu: (i) belum diproduksi di dalam negeri, (ii) sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau (iii) sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

BMDTP tidak diberikan terhadap: (i) barang dan bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0 persen, (ii) barang dan bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0 persen berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, (iii) barang dan bahan yang dikenakan bea masuk anti *dumping*/bea masuk anti *dumping* sementara, bea masuk tindakan pengamanan/bea

<sup>24</sup> <http://www.bisnis.com/articles/bea-masuk-15-sektor-industri-ditanggung-pemerintah>, diakses 26 Juli 2012.

<sup>25</sup> <http://www.bisnis.com/articles/bmdtp-diharapkan-pacu-daya-saing-di-pasar-global>, diakses 29 Juli 2012.

masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk imbalan, atau bea masuk tindakan pembalasan, (iv) barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan di kawasan berikat, atau (v) barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan/ pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.<sup>26</sup>

5. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP).

Pemerintah telah memberikan fasilitas PPN-DTP kepada beberapa sektor industri dalam rangka meningkatkan daya saing, sejak tahun 2009. Untuk tahun 2011, fasilitas PPN-DTP diberikan kepada industri antara lain minyak goreng (PMK No. 26 dan PMK No. 29 Tahun 2011), eksplorasi migas dan panas bumi (PMK No. 22 Tahun 2011), *climate change*, dan bahan bakar minyak tertentu dan elpiji 3 kg bersubsidi.<sup>27</sup>

6. Pemberian keringanan suku bunga.

Sejak tahun 2007, Pemerintah telah menjalankan program restrukturisasi permesinan bagi beberapa sektor industri dengan skema pemberian keringanan suku bunga. Program ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, yang akan meningkatkan daya saing sektor industri tersebut.

Beberapa sektor industri yang sudah mendapatkan fasilitas ini di antaranya tekstil dan produk tekstil (sejak tahun 2007), gula (sejak tahun 2009), alas kaki (sejak tahun 2008), dan IKM Sandang (sejak tahun 2011).<sup>28</sup>

Selain kebijakan insentif fiskal tersebut di atas, Pemerintah juga melanjutkan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui bea masuk tindak pengamanan (*safeguards*) berdasarkan Keppres No 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, pengenaan bea ekspor untuk produk bahan baku industri sesuai dengan PMK No. 67 Tahun 2010, untuk komoditas kulit, kayu, buah & kernel kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, biji kakao, rotan, serta penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk tertentu, guna menjamin kualitas produk industri yang beredar di pasaran. Saat ini terdapat 73 SNI yang diberlakukan wajib dari 3.969 SNI produk industri.<sup>29</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif fiskal untuk sektor industri di Indonesia. Keberadaan fasilitas fiskal tersebut diharapkan

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2012.

<sup>27</sup> <http://www.kemenperin.go.id/download/1274>, *op.cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan mendukung program MP3EI.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sektor industri pengolahan di Indonesia berperan besar terhadap PDB nasional, serta menjadi penggerak perekonomian nasional. Permasalahan industri di Indonesia antara lain adalah menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional, menurunnya ekspor, menurunnya daya saing produksi barang di pasar internasional, menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan menurunnya investasi di sektor industri.

Untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sektor industri melalui Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia adalah dengan memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif fiskal untuk sektor industri di Indonesia. Keberadaan fasilitas fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor industri Indonesia, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor industri antara lain adalah: *tax holiday* melalui PMK Nomor PMK130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, *tax allowance* melalui PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, penurunan tarif bea masuk dengan revisi PMK No. 241 Tahun 2010 tentang Perubahan Tarif Bea Masuk, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), dan pemberian keringanan suku bunga pinjaman.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri di Indonesia, diperlukan dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan insentif fiskal sehingga dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia.
2. Beberapa kebijakan insentif fiskal dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor industri antara lain adalah: BMDTP, *tax holiday*, *tax allowance*, penurunan tarif bea masuk, PPN-DTP, dan pemberian keringanan suku bunga pinjaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030?*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2007.

Tulus Tambunan, *Industrialisasi Di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

### **Artikel dalam Jurnal**

Ninawati, "Kontradiksi Pajak", *Jurnal Ekonomi*, Tahun XIII, No. 01, Maret 2008, hal.109-118.

### **Dokumen Resmi**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perindustrian.

### **Makalah**

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Akselerasi Industrialisasi Tahun 2012 - 2014", Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2012, Jakarta, 1 Februari 2012.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Kebijakan Industri Nasional", Disampaikan pada acara Forum Komunikasi Perencana Industri, Surabaya, 8 Juli 2011.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Peningkatan Daya Saing Industri Nasional dan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)", Disampaikan pada acara Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait, Medan, 23 September 2011.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Perkembangan Terkini 2011, Tantangan dan Strategi Di Sektor Perindustrian Merujuk Pada RKP 2012", Jakarta, 17 November 2011.

### **Artikel Internet**

Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 54/08/Th. XV, 6 Agustus 2012" ([http://www.bps.go.id/brs\\_file/pdb\\_06agu12.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_06agu12.pdf), diakses 12 Agustus 2012).

Rukmini, "Pengaruh Stimulus Fiskal dan Kinerja Keuangan terhadap Peningkatan Usaha Sektor Industri (Studi pada Sektor Industri Pakan Ternak di BEJ)", (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/208813.pdf>, diakses 12 Juli 2012).

<http://leo4kusuma.blogspot.com/2009/01/apa-itu-stimulus-fiskal.html>, diakses 15 Juli 2012.

<http://www.bisnis.com/articles/bea-masuk-15-sektor-industri-ditanggung-pemerintah>, diakses 26 Juli 2012.

<http://www.bisnis.com/articles/bmdtp-diharapkan-pacu-daya-saing-di-pasar-global>, diakses 29 Juli 2012.

<http://www.bps.go.id>, diakses 10 Juli 2012.

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/media%5Cketpres2701.pdf>, diakses 2 Agustus 2012.

<http://www.kemenperin.go.id/download/1274>, diakses 12 Juli 2012.

[http://www.ollydondokambey.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1446:pemerintah-luncurkan-insentif-perpajakan-untuk-investment-grade&catid=37:utama&Itemid=53](http://www.ollydondokambey.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:pemerintah-luncurkan-insentif-perpajakan-untuk-investment-grade&catid=37:utama&Itemid=53), diakses 2 Agustus 2012.

BAGIAN 5

**REFORMULASI KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA:  
PROGRAM PERTANIAN DALAM MASTERPLAN PERCEPATAN  
DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

*oleh: Lukman Adam\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan lokomotif penggerak pembangunan ekonomi nasional karena memiliki keunggulan komparatif. Apabila keunggulan komparatif tersebut tidak dioptimalkan melalui upaya peningkatan nilai tambah, inovasi teknologi dan dukungan pemerintah, maka keunggulan tersebut tidak akan termanfaatkan.

Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian masih sangat minim, yang diindikasikan dari proporsi APBN untuk sektor pertanian berkisar antara 2 sampai 4 % dari APBN. Pada tahun 2012, total APBN untuk sektor pertanian, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat (fungsi pertanian dan subsidi) dan transfer ke daerah mencapai Rp53,9 triliun atau 3,7 persen dari total APBN.<sup>1</sup> Di Jepang dan Uni Eropa, alokasi anggaran sektor pertanian mencapai 22% dan 33% dari PDB sektor pertanian di negaranya.<sup>2</sup>

Menurut Simatupang (2007), kebijakan pemerintah saat ini terkesan amat menitikberatkan pemberian insentif harga berupa subsidi *input* dan dukungan harga bukanlah kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, apalagi memacu pembangunan pedesaan. Kunci untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian dan pedesaan ialah peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas melalui investasi, inovasi teknologi dan kelembagaan, dan perbaikan infrastruktur.

Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah pemerintah melakukan liberalisasi terhadap sektor pertanian, tanpa memberikan proteksi terhadap sektor tersebut atau proteksi yang diberikan tidak maksimal. Menurut Ilham dan Rusastra (2009), mengacu pada kebijakan pangan yang diterapkan oleh sejumlah negara, Indonesia perlu melakukan perlindungan secara proporsional terhadap komoditas substitusi impor seperti beras, jagung, dan kedelai.

Ditambahkan oleh Ilham dan Rusastra (2009) bahwa kebijakan pasar *input* melalui pencanangan liberalisasi harga dan distribusi saprodi (pupuk dan pestisida) berdampak pada harga yang dibayar petani lebih tinggi dari harga sosialnya. Beberapa kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan adalah: (a) penciptaan pasar *input* yang kompetitif melalui kontrol impor yang lebih longgar sehingga petani memperoleh kualitas dan harga saprodi yang kompetitif; (b) program dan kontrol terhadap sertifikasi sarana produksi utama sehingga petani

<sup>1</sup> "Gambaran Belanja Pertanian Pemerintah Pusat," Jum'at, 23 November 2012 (<http://padiberas.com/?p=1319>, diakses 11 Desember 2012).

<sup>2</sup> "Ketahanan Pangan: Minimnya Alokasi Anggaran Disalahkan," Selasa, 4 Desember 2012, (<http://www.bisnis.com/articles/ketahanan-pangan-minimnya-alokasi-anggaran-disalahkan> diakses 11 Desember 2012).

memperoleh *input* dengan kualitas, efektivitas, dan harga yang terjangkau; (c) fasilitasi pengembangan program PHT dan pangan organik untuk menghemat penggunaan pupuk kimia dan pestisida; dan (d) peningkatan efisiensi produksi industri pupuk dan obat-obatan di dalam negeri.

Saat ini, pemerintah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 memfokuskan percepatan pembangunan ekonomi nasional melalui delapan program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika serta pengembangan kawasan strategis. Ke delapan program utama tersebut mencakup 22 kegiatan ekonomi utama, dan yang terkait dengan pertanian melalui kegiatan utama pada komoditas kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, dan pertanian pangan. Dokumen dalam MP3EI membagi wilayah Indonesia ke dalam enam koridor ekonomi yang didasarkan pada berbagai potensi dan peran strategis masing-masing koridor. Dari ke enam koridor tersebut, terdapat tiga koridor ekonomi yang terkait dengan program pertanian, yaitu:

1. Koridor Ekonomi Sulawesi dengan tema pembangunan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional.
2. Koridor Ekonomi Bali, Nusa Tenggara dengan tema pembangunan sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional.
3. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku dengan tema pembangunan sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Walaupun pertanian tidak disebut eksplisit di ketiga koridor ekonomi lainnya, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, tidak berarti sektor pertanian tidak dikembangkan di wilayah tersebut. Sektor pertanian di wilayah tersebut tidak menjadi penggerak yang mempercepat pembangunan ekonomi wilayah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dokumen MP3EI 2011 – 2025 menyebutkan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi membutuhkan dukungan dari sisi energi. Dengan adanya masterplan ini, penambahan kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 90 ribu megawatt, dan dibutuhkan investasi sekitar Rp4.012 triliun. Dalam hal ini, Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10 persen berbentuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit tenaga listrik. Sisanya akan dipenuhi dari swasta maupun BUMN dan campuran.

Kebijakan pertanian dalam MP3EI harus mendukung Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian. Renstra tersebut menyebutkan ada lima komoditas pertanian yang menjadi target swasembada dan swasembada berkelanjutan sampai tahun 2014, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Target Lima Komoditas Pertanian Utama Tahun 2010 – 2014**

No.	Komoditas	Target
1.	Padi	Swasembada berkelanjutan
2.	Jagung	Swasembada berkelanjutan
3.	Kedelai	Swasembada 2014
4.	Gula	Swasembada 2014
5.	Daging Sapi	Swasembada 2014

Sumber: Kementerian Pertanian (2011)

Dalam merumuskan kebijakan sektor pertanian perlu ditemukan karakteristik sektor pertanian Indonesia. Ketersediaan lahan yang rendah akibat tingginya alih fungsi lahan pertanian, dan tingginya petani penggarap merupakan hambatan untuk pengembangan sektor pertanian. Teknologi, baik teknologi budidaya dan pasca panen sebagian besar masih tradisional dan penggunaan mekanisasi pertanian masih terbatas. Di lain pihak, lahan yang dapat dikembangkan untuk sektor pertanian masih dapat dilakukan. Daya saing produk pertanian Indonesia di tingkat lokal masih rendah akibat kontinuitas pasokan dan kualitas yang belum sesuai dengan permintaan pasar. Tingginya impor mestinya bisa ditekan dengan kebijakan yang tepat. Namun, pemerintah pada kasus-kasus tertentu kalah dengan adanya tekanan dari pihak importir dan negara importir. Selain itu, antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain kurang sinergi dan tidak harmoni.

### C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya kajian ini adalah melakukan analisis terhadap dokumen MP3EI, khususnya terhadap kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian dalam MP3EI merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian, khususnya terhadap tantangan yang dihadapi sektor pertanian untuk menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau bagi masyarakat dan menguntungkan bagi petani. Sektor pertanian Indonesia menghadapi permasalahan impor yang tinggi, pembiayaan, tekanan dari luar, sarana, prasarana dan pemasaran yang tidak memadai, dan lahan pertanian yang semakin sempit. Kajian ini juga akan menganalisis kesesuaian MP3EI dengan target dalam Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014.

### D. Metode Penulisan

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis terhadap dokumen MP3EI dari aspek pertanian dan Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014, serta permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari literatur, jurnal, internet, dan sumber informasi lainnya. Data kemudian diinterpretasi dan

dianalisis untuk menentukan keterkaitan dokumen MP3EI dan Renstra Kementerian Pertanian tersebut.

Kajian ini melakukan analisis terhadap kegiatan ekonomi terkait pertanian dan pengembangan kawasan sentra pertanian dalam dokumen MP3EI. Kerangka pemikiran dalam kajian reformulasi kebijakan pertanian Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kajian Reformulasi Kebijakan Pertanian Indonesia**



## E. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menjelaskan konsep pangan yang dianut di Indonesia. Konsep dalam undang-undang yang baru tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketiga pilar ini yang digunakan dalam kebijakan pertanian di Indonesia.

Menurut Syahyuti (2011), konsep ketahanan pangan memang jauh lebih mapan daripada kedaulatan pangan. Konsep ini telah diterima secara luas dan telah diadopsi di hampir seluruh negara di dunia. Ketahanan pangan dapat dicapai di semua negara, baik dengan atau tanpa dukungan sektor pertanian. Dengan pendekatan ini, Singapura misalnya, bisa tetap berketahanan pangan tanpa harus didukung oleh produksi pangan domestik. Dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi, rakyat Singapura bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka dari impor. Kedaulatan pangan yang diartikan sebagai hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan karakter budaya masing-masing merupakan konsep yang muncul belakangan.

Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan struktur insentif sektor pertanian (Sudaryanto dan Rusastra, 2006).

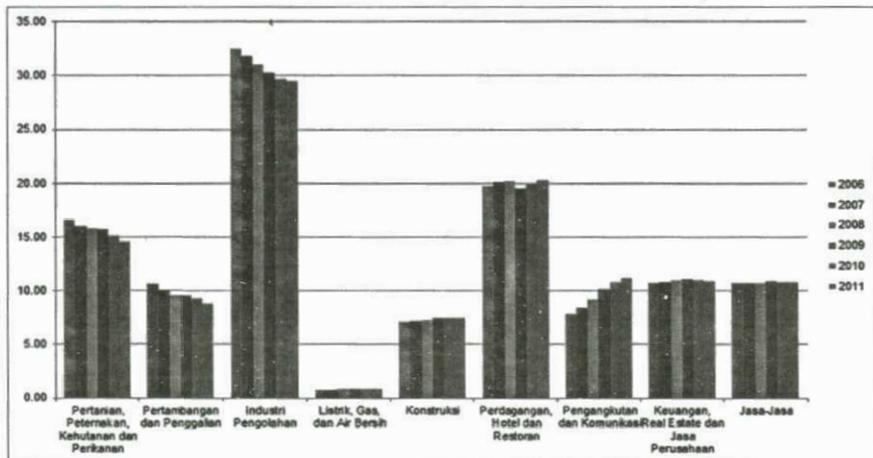
Permasalahan sektor pertanian terutama terkait dengan makin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian, daya saing produk pertanian yang rendah, dan belum tepatnya kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor pertanian harus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kinerja Sektor Pertanian

Sektor pertanian di Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai penyedia bahan mentah untuk agroindustri. Kinerja sektor pertanian bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto sektor ini terhadap sektor lainnya dalam perekonomian nasional (Gambar 2).

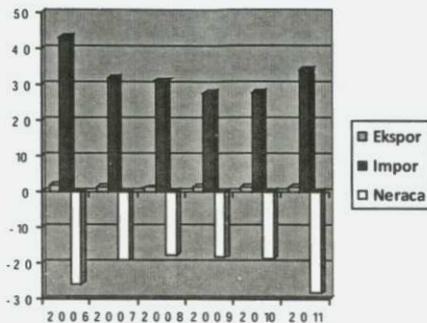
**Gambar 2. Laju Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha (dalam persen)**



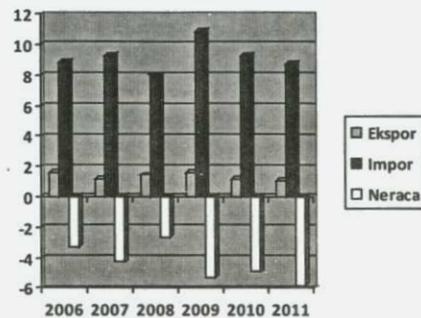
Sumber: BPS (2012)

Dari tahun 2006 sampai tahun 2011, sektor pertanian berada pada peringkat ketiga sesudah sektor industri pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Penyumbang terbesar bagi sektor pertanian adalah sub sektor tanaman bahan makanan, perikanan dan tanaman perkebunan. Dari Gambar 2 tersebut, terlihat bahwa sektor pertanian masih dapat ditingkatkan dengan ditopang oleh industri pengolahan dan inovasi teknologi.

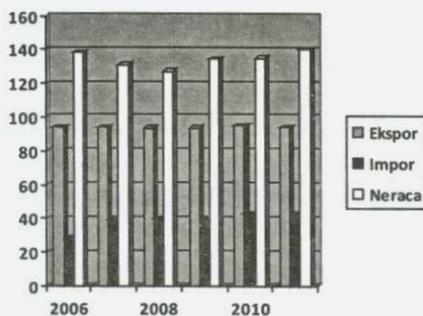
**Gambar 3. Persentase Ekspor, Impor, dan Neraca Komoditas Tanaman Pangan**



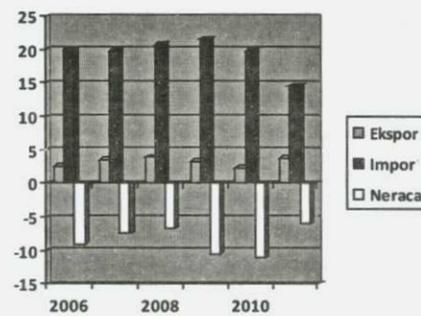
**Gambar 4. Persentase Ekspor, Impor, dan Neraca Komoditas Hortikultura**



**Gambar 5. Persentase Ekspor, Impor, dan Neraca Komoditas Perkebunan**



**Gambar 6. Persentase Ekspor, Impor, dan Neraca Komoditas Peternakan**



Sumber: BPS diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (2012)

Impor sektor pertanian masih sangat tinggi. Hal ini sangat memprihatinkan, karena ketergantungan pangan masyarakat yang sangat tinggi terhadap produk pertanian dari luar. Dilihat dari neraca perdagangan sektor pertanian, terlihat bahwa untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan memiliki defisit neraca perdagangan, yaitu lebih besar impor daripada ekspor (Gambar 3, 4, dan 6).

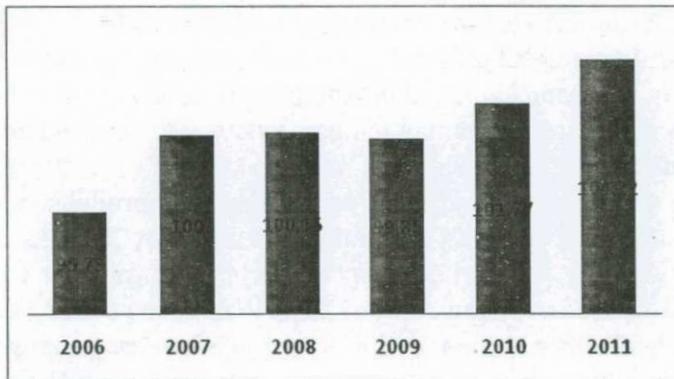
Dari Gambar 5 terlihat bahwa total neraca perdagangan komoditas perkebunan sangat tinggi. Namun, komoditas perkebunan yang diekspor hanya merupakan bahan mentah dan didominasi oleh komoditas sawit. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dari 8,9 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia, 40 persen adalah milik asing dan 80 persen dimiliki oleh Malaysia.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> "Pemerintah Batasi Investor Sawit Asing," Rabu, 31 Oktober 2012, (<http://daftarperusahaanindonesia.com/2012/10/pemerintah-batasi-investor-sawit-asing/> diakses 11 Desember 2012)

Berdasarkan fakta tersebut, kebijakan pertanian yang disusun harus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan petani. Indikator kesejahteraan petani yang bisa dilihat secara kuantitatif antara lain dengan mengukur nilai tukar petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara nilai hasil pertanian yang dijual petani dengan nilai barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konseptual, NTP adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Dalam hal ini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen.

Besaran NTP dari tahun 2006 sampai 2011 terus mengalami peningkatan (Gambar 7). Menurut Sudaryanto dan Rusastra (2006), peningkatan NTP sejak 3 tahun terakhir, diakibatkan pemerintah menerapkan kembali kebijakan proteksi dan promosi sektor pertanian, seperti tarif impor untuk melindungi harga padi dan gula dari distorsi harga pasar dunia, serta kebijakan subsidi pupuk.

**Gambar 7. Nilai Tukar Petani Tahun 2006 - 2011**



Sumber: BPS (2012)

Setelah dipelajari kinerja sektor pertanian, khususnya dari pendapatan domestik bruto, neraca perdagangan, dan NTP, maka perlu dilakukan kaji ulang terhadap kebijakan sektor pertanian. Menurut Simatupang (2007), dalam perspektif jangka panjang, kebijakan strategis yang dianjurkan ialah integrasi makro-mikro. Kebijakan ketahanan pangan merupakan bagian integral-sinergis dari kebijakan makro, yang diarahkan untuk meraih pertumbuhan tinggi, pengentasan kemiskinan, dan stabilisasi pasar pangan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan sebagai poros pengikat dan penggerak (*agriculture and rural development propelled pro poor growth mediated food security*).

Kebijakan impor pangan masih tetap diperlukan pada batas-batas tertentu, misalnya pada saat produksi dan stok pangan tidak mencukupi, serta untuk menghindari munculnya spekulasi yang melakukan penimbunan stok pangan. Ketidakmampuan kebijakan moneter menurunkan angka pengangguran tapi

mampu menurunkan inflasi dan di sisi lain kebijakan harga pangan menyebabkan inflasi tetapi mampu menurunkan angka pengangguran, membuktikan bahwa setiap kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, suatu kebijakan dengan kebijakan yang lain harus saling mendukung (Ilham dan Siregar, 2007).

Menentukan kebijakan pertanian harus dilakukan dengan melakukan sinergi dengan kebijakan lain. Dukungan dari peningkatan keberadaan sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi, jalan desa, dan bendungan memiliki keterkaitan erat dengan sektor pekerjaan umum. Ketersediaan sarana pemasaran memiliki keterkaitan dengan sektor perdagangan, pekerjaan umum dan energi, dan diperlukan dukungan pembiayaan oleh sektor perbankan. Oleh karena itu, kebijakan sektor pertanian tidak bisa ditentukan oleh satu kementerian, harus ada *lead sector* yang dapat menyatukan pemahaman guna mendukung sektor pertanian, tidak boleh ada segregasi antara sektor pertanian dan sektor lainnya.

## **B. Kegiatan Ekonomi Terkait Pertanian dalam MP3EI**

Dalam dokumen MP3EI dinyatakan bahwa terdapat sub sektor dalam sektor pertanian yang menjadi keunggulan komparatif sektor pertanian Indonesia, yaitu: kelapa sawit, karet, pertanian pangan, kakao, dan peternakan.

### **1. Kelapa Sawit**

Indonesia memproduksi sekitar 43 persen dari total produksi minyak mentah sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) di dunia. Pertumbuhan produksi kelapa sawit di Indonesia yang sebesar 7,8 persen per tahun juga lebih baik dibanding Malaysia yang sebesar 4,2 persen per tahun. Walaupun produksi kelapa sawit di Indonesia lebih besar, namun produktivitasnya lebih rendah daripada Malaysia. Produktivitas kelapa sawit di Indonesia mencapai 3,8 ton/hektar, berada di bawah Malaysia yang mencapai 4,6 ton/hektar. Di Sumatera, kegiatan ekonomi utama kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar, 70 persen lahan penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di Sumatera dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Sekitar 42 persen lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. Hasil perkebunan di Kalimantan didominasi oleh produksi kelapa sawit dengan kontribusi mencapai 80 persen, jauh lebih besar dibandingkan hasil produksi perkebunan karet dan kelapa. Total luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 juta Ha) lebih besar daripada luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 2 juta Ha).

### **2. Karet**

Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia (sekitar 28 persen dari produksi karet dunia di tahun 2010), sedikit di belakang Thailand (sekitar 30 persen). Indonesia memiliki produktivitas karet yang lebih rendah yaitu sekitar 50 persen dari produktivitas karet India. Bahkan jika kita membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia

memiliki produktivitas lebih rendah sekitar 30-40 persen dibandingkan Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Di samping itu, peran pengusaha kecil di negara-negara lain lebih besar daripada Indonesia.

### 3. Pertanian Pangan

Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi mencakup padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Kegiatan pertanian pangan, khususnya beras dan jagung, sangat penting, terutama untuk konsumsi domestik di Indonesia. Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia, yang sebagian besar dari produksinya digunakan untuk konsumsi domestik. Namun, Indonesia masih harus mengimpor 800.000 ton jagung di tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 5 juta ton. Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi padi nasional dan 15 persen produksi jagung nasional, sedangkan pertanian pangan menyumbang 13 persen PDRB Sulawesi.

Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, maka Kawasan Merauke telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan kawasan ini memiliki potensi lahan datar dan subur. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan MIFEE (*Merauke Integrated Food & Energy Estate*). MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern.

### 4. Kakao

Indonesia merupakan produsen kakao kedua terbesar dunia, dengan menyumbang 18 persen dari pasar global. Secara nasional, komoditas kakao menghasilkan devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Devisa dari kakao pada tahun 2009 mencapai USD 1,38 miliar (berasal dari biji dan kakao olahan). Biji kakao olahan menghasilkan *cocoa butter* (lemak kakao) dan *cocoa powder* (bubuk kakao) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia terutama di Amerika dan Eropa, dimana permintaan kakao mencapai 2,5 juta ton per tahun. Indonesia menargetkan pada tahun 2025 mampu memproduksi 2,5 juta ton biji kakao dengan nilai ekspor USD 6,25 miliar. Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan kakao, baik perkebunan maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan kakao di Sulawesi mencapai 838.037 ha atau 58 persen dari total luas lahan di Indonesia. Sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh petani (96 persen).

### 5. Peternakan

Kegiatan ekonomi utama peternakan berkontribusi terhadap PDRB sekitar 16 persen dari sektor agrikultur pangan untuk Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara. Sebagian besar populasi ternak di koridor ini masih dikonsumsi secara lokal dan hanya dipasarkan ke provinsi lain dalam jumlah sedikit.

Jenis populasi ternak yang paling potensial dikembangkan di koridor ini adalah Sapi Bali yang sudah dikenal luas sebagai sapi potong asli Indonesia. Sapi potong dapat dikembangkan untuk menghasilkan tujuh jenis emas, yaitu emas merah (daging), emas putih (susu), emas putih batangan (tulang), emas kuning (urin), emas cokelat (kulit), emas biru dan emas hijau (kotoran).

Dokumen kebijakan pertanian dalam MP3EI dan rencana strategis Kementerian Pertanian perlu dilakukan sinkronisasi. Dalam dokumen renstra disebutkan target untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Dokumen renstra tersebut, memprioritaskan pencapaian target swasembada untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai, sedangkan dalam dokumen MP3EI lebih banyak memuat dukungan kebijakan untuk sub sektor perkebunan. Renstra Kementerian Pertanian yang disusun tahun 2010 semestinya menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen MP3EI agar saling mendukung. Dokumen MP3EI memuat kebijakan dan arah ekonomi nasional, sedangkan teknis operasionalnya dijabarkan dalam Renstra Kementerian Pertanian yang memuat mengenai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

### C. Peningkatan Daya Saing

Komoditas pertanian Indonesia mempunyai daya saing yang rendah, akibat hanya berbentuk bahan mentah, kurang tersedia dalam jumlah yang cukup, dan kualitas rendah. Komoditas prioritas pertanian dalam MP3EI terdiri dari kelapa sawit, karet, pertanian pangan, kakao, dan peternakan, sedangkan dalam renstra Kementerian Pertanian diharapkan tercapai swasembada untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Daya saing komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi serta komoditas perkebunan harus dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati komoditas yang berkualitas. Oleh karena itu, peran dari inovasi teknologi, penyuluh pertanian, dan badan litbang menjadi penting.

Sawit (2009) menyebutkan bahwa harga beras di luar negeri tidak saja ditentukan oleh kualitas, terutama patahan nol sampai 25 persen, tetapi juga rasa, aroma, penampilan/bentuk, beras khusus dan sebagainya. Para konsumen, terutama konsumen menengah ke atas akan memilih beras sesuai dengan preferensinya, berani membayar lebih mahal asalkan mendapat beras sesuai selera. Sebagai contoh di Malaysia, konsumen dimudahkan dalam memilih beras sesuai dengan preferensi konsumen.

Ilham dan Rusastra (2009) menyebutkan langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan daya saing usahatani padi adalah: (1) perbaikan efisiensi usaha tani padi melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, rasionalisasi penggunaan sarana produksi, perbaikan kelembagaan pasar *input* dan *output* serta manajemen usahatani; (2) penetapan tarif impor

secara rasional dan dinamis serta perbaikan efisiensi pemasaran beras melalui perbaikan infrastruktur, struktur pemasaran, kelembagaan petani, serta program pengadaan dan stabilisasi harga gabah/beras; (3) dalam jangka menengah ke depan, produktivitas dan efisiensi ekonomi perberasan dapat ditingkatkan melalui perbaikan rendemen gabah ke beras, serta reorientasi pengolahan dan pemasaran beras organik dan beras berkualitas tinggi yang permintaan domestik dan ekspor cenderung meningkat; dan (4) pada tataran makro, kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas produksi padi dan perbaikan infrastruktur pertanian dan pedesaan.

Ditambahkan oleh Ilham dan Rusastra (2009), komoditas gula tidak memiliki daya saing sehingga diperlukan kebijakan khusus. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri gula yang perlu dipertimbangkan adalah: (a) dalam konteks pengembangan komoditas lain dengan daya saing yang lebih baik, di samping pertimbangan kuota alokasi lahan, perlu perbaikan produktivitas dan efisiensi industri gula secara menyeluruh; (b) dalam konteks global, liberalisasi industri gula perlu dilakukan secara gradual dan terencana sehingga tidak berpengaruh terhadap struktur produksi dan kenaikan harga gula dunia; (c) liberalisasi secara gradual untuk memberikan kesempatan bagi industri gula di negara berkembang memperbaiki produktivitas dan efisiensi, dan di negara maju terdapat waktu untuk memperluas areal pengembangan; dan (d) mengingat kecenderungan struktur produksi, ketersediaan stok, harga gula dunia, dan depresiasi nilai rupiah, hendaknya dikuatkan komitmen untuk meningkatkan produksi gula nasional dengan efisiensi dan daya saing yang lebih baik.

#### **D. Pengembangan Kawasan Sentra**

Dokumen MP3EI memuat mengenai pengembangan kawasan sentra dengan menempatkan koridor ekonomi untuk kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, karet di Sumatera, pertanian pangan di Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku, peternakan di Bali-Nusa Tenggara, dan kakao di Sulawesi. Pengembangan koridor ekonomi semestinya didasarkan pada kajian yang tepat, memuat aspek teknis, ekonomis dan sosial-budaya. Aspek teknis antara lain terdiri dari: kesesuaian lahan, ketersediaan sarana dan prasarana. Aspek ekonomi memuat antara lain: analisis kelayakan ekonomi, dan ketersediaan sarana transportasi untuk menuju ke pasar. Aspek sosial-budaya memuat penerimaan dari masyarakat lokal terhadap penempatan koridor ekonomi di wilayah tersebut. Penempatan koridor ekonomi untuk kegiatan utama sektor pertanian semestinya memperhatikan komoditas pertanian yang sudah dikembangkan oleh masyarakat lokal.

Kawasan Merauke telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan dan energi. Menurut Manikmas (2010), dalam pengembangan kawasan sentra produksi sektor pertanian di Kabupaten Merauke diperlukan reorientasi pendekatan yaitu dari berbasis komoditas ke basis sumber daya dan

komunitas. Oleh karena itu, pemerintah lokal dan pusat dibantu oleh tim ahli multidisiplin telah mencetuskan sebuah konsep pengembangan, yaitu *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) dengan mengusahakan seluruh komoditas unggulan Merauke ke dalam KSP dengan tata ruang yang terintegrasi. MIRE telah dilengkapi dengan analisis kelayakan ekonomi dalam periode 20 tahun kedepan. Namun MIRE telah diberi nama baru oleh Ditjen PLA, Kementerian Pertanian yaitu *Merauke Integrated Food and Energy* (MIFE). Konsep pemikiran sama, namun belum melakukan analisis kelayakan sosial dan ekonomi seperti halnya pada konsep MIRE.

Proyek MIFEE akan berdampak pada masyarakat Malind yang berjumlah sekitar 50.000 jiwa, dan masyarakat adat lainnya (Muyu, Mandobo, Mappi, dan Auyu) di Kabupaten Merauke. Tanah mereka mengandung nilai sakral karena adanya identifikasi berbagai tempat dengan roh leluhur dan kerabat. Beberapa dampak negatif dan parah yang tampak sekarang antara lain: pemaksaan dan manipulasi; konflik dan kekerasan antar-etnis yang meningkat, dan transformasi hutan dimana masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya memperoleh hampir semua makanan mereka menjadi perkebunan tanaman tunggal yang tidak ada sumber makanan tradisional. Hewan buruan yang menyediakan sumber utama protein sudah mulai berkurang dan akan menghilang dari daerah itu. Sebagian besar tempat keramat masyarakat adat berada di hutan, beberapa tempat ini sudah hancur atau aksesnya sangat terbatas, dan ini akan meningkat seiring dengan berlanjutnya pembukaan lahan. Hak milik dan hak-hak lain dari masyarakat adat yang dijamin secara internasional benar-benar diabaikan dalam proses ini dan hak-hak tersebut pada dasarnya dihilangkan. Dengan demikian, proyek MIFEE sudah mulai melemahkan ekonomi tradisional masyarakat adat dan jati diri serta keutuhan mereka, sebuah proses yang akan semakin hebat dan meluas seiring dengan semakin banyaknya perusahaan mulai beroperasi (Perkumpulan Sawit Watch, 2011).

### **E. Perundang-Undangan**

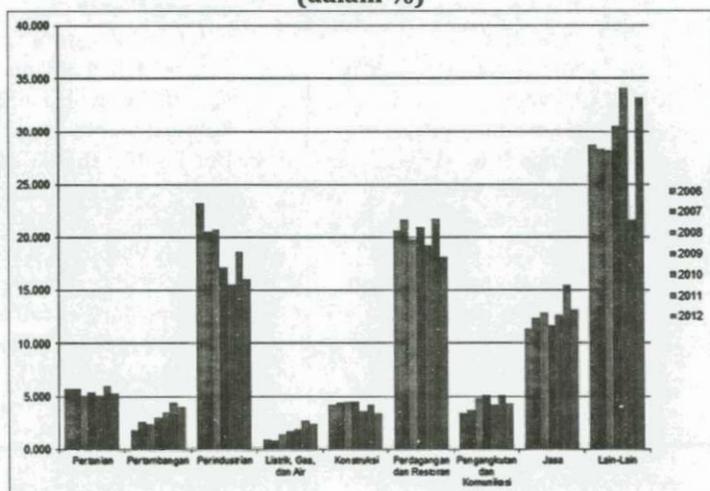
Dalam dokumen MP3EI 2011 - 2025 disebutkan bahwa terdapat regulasi yang perlu diperbaiki untuk mendukung kegiatan ekonomi utama terkait pertanian, yaitu:

1. Perlu pengkajian ulang terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah bidang keagrariaan untuk memasukkan status tanah ulayat sebagai bagian dari komponen investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya (terkait realisasi MIFEE).
2. Penetapan jaminan pasokan bahan baku untuk pengembangan industri hilir dan peraturan yang mengatur tentang penerapan ketercukupan pasokan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) untuk karet dan kelapa sawit.

3. Peraturan yang mengatur tentang insentif/fasilitas yang membuka peluang untuk percepatan masuknya investasi industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
4. Peraturan yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar.

Salah satu permasalahan pokok dalam sektor pertanian yang harus diperbaiki dalam upaya mendukung kegiatan sektor pertanian adalah permasalahan pembiayaan. Saat ini pembiayaan bagi petani bisa disalurkan dalam bentuk kredit oleh semua lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Data pada Gambar 8 menunjukkan bahwa alokasi penyaluran kredit dari perbankan nasional untuk sektor pertanian, berada di bawah sektor: jasa; perindustrian; perdagangan dan restoran.

**Gambar 8. Alokasi Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam %)**



Sumber: Bank Indonesia (2012)

Rendahnya alokasi penyaluran kredit perbankan nasional untuk sektor pertanian disebabkan karena permintaan kredit sektor pertanian dianggap belum memenuhi syarat-syarat pemberian kredit yang ditetapkan oleh perbankan. Dalam pemberian kredit, pihak perbankan mempunyai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pihak perbankan juga sangat berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan penilaian kinerja perbankan, agar kreditur tidak mengalami gagal bayar. Menurut Ashari dan Friyatno (2006), rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, selain karena faktor risiko yang tinggi juga disebabkan oleh sistem pembiayaan di perbankan yang tidak membedakan antara sektor pertanian dan non-pertanian.

Iqbal dan Darwis (2006) dalam kajian mengenai kebijakan pengembangan sistem pembiayaan pertanian dengan pola Badan Layanan Umum (BLU)

menyatakan bahwa kebijakan tersebut seyogyanya diterapkan secara konsekuen dengan berpedoman pada perundang-undangan dan peraturan yang telah digariskan.

Dalam upaya mendukung kegiatan sektor pertanian, perlu dilakukan perubahan peraturan mengenai pembiayaan sektor pertanian yang memahami karakteristik sektor pertanian. Atas paparan diatas, maka isu pokok dalam permasalahan pertanian yang semestinya menyesuaikan dengan karakteristik pertanian Indonesia telah diidentifikasi dan diberikan solusi. Lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Dukungan Kebijakan yang Diperlukan  
Guna Mendukung Sektor Pertanian**

Isu Pokok	Output yang Diharapkan	Tindakan
Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia lahan yang cukup bagi perluasan areal pertanian</li> <li>2. Kepastian dan konsistensi peruntukan lahan</li> <li>3. Kemudahan proses pemanfaatan lahan untuk keperluan pengembangan kawasan komoditas pertanian</li> <li>4. Kepastian dan jaminan hak atas kepemilikan tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Meninjau aturan perundangan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Kepala BPN No. 2/2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Undang-Undang No. 26/2007 dan PP No. 26/2008 mengenai Rencana Tata Ruang Nasional.</li> <li>3. Permen Pertanian dan Agraria No. 2/1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah</li> <li>4. Permendagri No. 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah</li> </ol> </li> <li>B. Melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>C. Sertifikasi lahan/kebun rakyat.</li> <li>D. Penyelarasan peruntukan lahan antara tata ruang daerah dan tata ruang nasional.</li> <li>E. Penyederhanaan proses memperoleh hak guna usaha dan legitimasinya atau hak kepemilikan tanah lainnya.</li> <li>F. Mencabut/membatalkan izin lokasi yang tidak digunakan.</li> <li>G. Kepastian hukum penyelesaian konflik dengan hak adat dan ulayat.</li> </ol>

Isu Pokok	Output yang Diharapkan	Tindakan
Penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran meningkatkan anggaran memadai bagi kegiatan penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien.</li> <li>2. Benih/bibit dan saprotan yang terjangkau.</li> <li>3. Akses teknologi pasca panen dan pengolahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan integrasi kegiatan penelitian dan pengembangan antar instansi pemerintah dan swasta.</li> <li>2. Pembangunan plasma nutfah komoditas pertanian.</li> <li>3. Mempermudah proses sertifikasi benih.</li> <li>4. Penghapusan pajak alsintan dan produk pertanian dalam negeri.</li> <li>5. Subsidi benih/bibit dan subsidi pupuk.</li> <li>6. Penataan kembali sistem distribusi benih/bibit dan pupuk.</li> <li>7. Revitalisasi industri pengolahan hasil pertanian.</li> <li>8. Penataan kelembagaan terhadap industri primer.</li> </ol>
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran untuk usaha dengan tingkat bunga bersubsidi.</li> <li>2. Kebijakan perdagangan yang berpihak pada produksi dan pengolahan pangan domestik.</li> <li>3. Pajak ekspor digunakan untuk kepentingan petani dan masyarakat lokal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbankan khusus pertanian.</li> <li>2. Skema kredit khusus bagi usaha pertanian.</li> <li>3. Memanfaatkan skema WTO untuk perlindungan non-tarif atas produk pangan domestik.</li> </ol>

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pemerintah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2025 memuat program untuk pengembangan sektor pertanian. Dokumen kebijakan pertanian dalam MP3EI dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 merupakan dokumen yang saling melengkapi. Dalam dokumen renstra disebutkan target untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Dokumen renstra tersebut, memprioritaskan pencapaian target swasembada untuk komoditas pangan yang diperuntukkan bagi padi, jagung dan kedelai, sedangkan dalam dokumen MP3EI lebih banyak memuat dukungan kebijakan untuk sub sektor perkebunan.

Penetapan koridor ekonomi dalam dokumen MP3EI tidak dinyatakan dalam dokumen tersebut. Jika memang didasarkan pada kajian, tentunya harus didasarkan pada alasan yang tepat.

Permasalahan sektor pertanian terutama terkait dengan ketersediaan lahan pertanian, daya saing produk pertanian yang rendah, dan belum tepatnya kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor pertanian harus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Komoditas pertanian Indonesia mempunyai daya saing yang rendah. Komoditas prioritas pertanian dalam MP3EI terdiri dari kelapa sawit, karet, pertanian pangan, kakao, dan peternakan, sedangkan dalam renstra Kementerian Pertanian diharapkan tercapai swasembada untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Daya saing komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi serta komoditas perkebunan harus dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati komoditas yang berkualitas. Oleh karena itu, peran dari inovasi teknologi, penyuluh pertanian, dan badan litbang menjadi penting.

Dokumen MP3EI memuat mengenai pengembangan kawasan sentra dengan menempatkan koridor ekonomi untuk komoditas pertanian strategis di beberapa daerah. Pengembangan koridor ekonomi semestinya didasarkan pada kajian yang tepat, memuat aspek teknis, ekonomis dan sosial-budaya. Aspek teknis antara lain terdiri dari: kesesuaian lahan, ketersediaan sarana dan prasarana. Aspek ekonomi memuat antara lain: analisis kelayakan ekonomi, dan ketersediaan sarana transportasi untuk menuju ke pasar. Aspek sosial-budaya memuat penerimaan dari masyarakat lokal terhadap penempatan koridor ekonomi di wilayah tersebut. Penempatan koridor ekonomi untuk kegiatan utama sektor pertanian semestinya memperhatikan komoditas pertanian yang sudah dikembangkan oleh masyarakat lokal.

## **B. Saran**

Dokumen MP3EI memuat arahan kebijakan pertanian nasional, sedangkan Renstra Kementerian Pertanian memuat dukungan teknis operasional kebijakan pertanian Indonesia. Agar saling mendukung, maka perlu dilakukan revisi terhadap dokumen MP3EI dengan memerhatikan permasalahan dalam sektor pertanian.

Guna mendukung kegiatan sektor pertanian perlu dilakukan perubahan peraturan mengenai pembiayaan sektor pertanian yang memahami karakteristik sektor pertanian, skema kredit untuk pembiayaan sektor pertanian, kemudahan petani untuk mendapatkan akses lahan, dan penguasaan serta inovasi teknologi.

Upaya untuk mengatasi pembiayaan sektor pertanian merupakan upaya kunci untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian. Kredit yang diperoleh

akan memudahkan terjadinya perluasan lahan pertanian, perbaikan sarana dan prasarana pokok sektor pertanian, promosi produk pertanian, dan melakukan inovasi teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ashari dan Supena Friyatno. "Perspektif Pendirian Bank Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, Desember 2006, pp. 107 - 122.
- Ilham, Nyak dan I Wayan Rusastra. "Daya Saing Komoditas Pertanian: Konsep, Kinerja dan Kebijakan Pengembangan," *Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol. 3, No. 1, 2009, pp. 38 - 51.
- Ilham, Nyak dan Hermanto Siregar. "Dampak Kebijakan Harga Pangan dan Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro," *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 25, No. 1, Mei 2007, pp. 55 - 83.
- Iqbal, Muhammad dan Valeriana Darwis. 2006. "Kebijakan Pengembangan Sistem Pembiayaan Pertanian dengan Pola Badan Layanan Umum (BLU)," *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 4, No. 4, Desember 2006, pp. 268 - 280.
- Manikmas, Made Oka A. "Merauke Integrated Rice Estate (MIRE): Kebangkitan Ketahanan dan Kemandirian Pangan dari Ufuk Timur Indonesia," *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 8, No. 4, Desember 2010, pp. 323 - 338.
- Sawit, M. Husein. 2009. "Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?," *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 7, No. 3, September 2009, pp. 231 - 247.
- Simatupang, Pantjar. "Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 25, No. 1, Juli 2007, pp. 1 - 18.
- Sudaryanto, Tahlim dan I Wayan Rusastra. "Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Litbang Pertanian*. Vol. 25, No. 4, 2006, pp. 115 - 122.
- Syahyuti. "Paradigma Kedaulatan Pangan dan Keterlibatan Swasta: Ancaman Terhadap Pendekatan Ketahanan Pangan (?)," *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 9, No. 1, Maret 2011, pp. 1 - 18.

## **Makalah dan Laporan Penelitian**

Perkumpulan Sawit Watch, Pusaka, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Keuskupan Agung Merauke, Yayasan Santo Antonius Merauke, Forum Kerjasama LSM Papua, Walhi, Sajogyo Institute, ELSAM, *Forest Peoples Programme*, *Down to Earth*, *Watch Indonesia*, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "*Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia Berdasarkan Prosedur Tindakan Segera dan Peringatan Dini dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial: Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Sidang ke-79, 8 Agustus – 2 September 2011*," 31 Juli, 2011.

## **Dokumen**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025*." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

Kementerian Pertanian. "*Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014*." Kementerian Pertanian, 2010.

## **Berita Internet**

"Ketahanan Pangan: Minimnya Alokasi Anggaran Disalahkan," Selasa, 4 Desember 2012, (<http://www.bisnis.com/articles/ketahanan-pangan-minimnya-alokasi-anggaran-disalahkan> diakses 11 Desember 2012).

"Gambaran Belanja Pertanian Pemerintah Pusat," Jum'at, 23 November 2012 (<http://padiberas.com/?p=1319>, diakses 11 Desember 2012).

"Pemerintah Batasi Investor Sawit Asing," Rabu, 31 Oktober 2012, (<http://daftarperusahaanindonesia.com/2012/10/pemerintah-batasi-investor-sawit-asing/> diakses 11 Desember 2012).

BAGIAN 6

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KELAUTAN DALAM RANGKA MP3EI**

*oleh: Nidya Waras Sayekti\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 104.000 km dengan luas wilayah laut mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km<sup>2</sup>. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan terbesar termasuk keanekaragaman hayati dan nonhayati kelautan.

Berdasarkan data dari Bakosurtanal (2006) dan Kemendagri (2011), Indonesia memiliki luas laut territorial 0,28 juta km<sup>2</sup>, luas laut ZEE 2,98 juta km<sup>2</sup>, dan luas laut 12 mil sepanjang 0,28 juta km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 104.000 km.

Indikator fisik Indonesia tersebut secara langsung menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar. Potensi tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun atau 10 kali APBN negara pada tahun 2012.<sup>1</sup>

Namun, apabila dilihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nilainya masih sangat kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume produksi perikanan Indonesia pada tahun 2011 mencapai 12.385.850 ton atau naik sebesar 6,20 persen dari tahun 2010. Sedangkan kontribusi sektor perikanan berdasarkan harga berlaku terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) total pada triwulan III tahun 2011 mencapai Rp59.823 miliar atau 3,11 persen.

Pakar Kelautan IPB Rochmin Dahuri menyampaikan bahwa Indonesia belum dapat mentransformasikan potensi ekonomi maritim menjadi sumber kemakmuran, kemajuan, dan kedaulatan bangsa. Dari 114 pelabuhan umum, tidak satu pun memenuhi standar pelayanan internasional. Selama Orde Baru, kredit untuk sektor ekonomi kelautan kurang dari 15 persen dan untuk sektor perikanan hanya 0,02 persen dari total kredit. Wajar jika hingga kini kontribusi ekonomi kelautan hanya 30 persen dari PDB. Padahal, Negara-negara dengan potensi laut yang jauh lebih kecil, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, China, Islandia, dan Norwegia, sumbangan ekonomi kelautannya terhadap PDB mereka rata-rata mencapai 40 persen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Potensi Ekonomi Laut Indonesia 1,2 triliun dolar/tahun. 2012* (<http://www.antaraneews.com/berita/317688/potensi-ekonomi-laut-indonesia-12-triliun-dolar-tahun>, diakses tanggal 2 Juli 2012).

<sup>2</sup> Y.Paongan. *Indonesia Raksasa Maritim: Tertidur Lelap dan masih Bermimpi. 2011* (<http://www.indonesiamaritimeclub.net/2011/03/29/indonesia-raksasa-maritim-tertidur-lelap-dan-masih-bermimpi/>, diakses 19 April 2012).

Kenyataan ini menjadi wajar, sebab selama ini kebijakan pengelolaan potensi kekayaan laut belum dirancang berdasarkan keterpaduan kebijakan publik di bidang kelautan. Yang dirasakan saat ini, komitmen dalam membangun sektor kelautan sangatlah minim. Ukurannya sangat sederhana, lihat saja sektor perikanan belum menjadi komoditas strategis, seperti beras, jagung, kedelai, dan terigu. Sebab harga ikan belum menjadi pertimbangan dalam kebijakan penentuan keberhasilan dampak perdagangan di negeri ini. Jadi, salah satu persoalan prinsip yang menjadi kendala pengelolaan potensi kekayaan laut adalah tidak adanya aspek keterpaduan dalam kebijakan yang terbangun.<sup>3</sup>

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia belum memiliki rencana induk yang jelas. Kebijakan kelautan yang tidak jelas dan aturan yang tumpang tindih berujung pada konflik kepentingan antara institusi. Saat ini terdapat 13 kementerian dan instansi yang menangani sektor kelautan dan perikanan, yakni: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, juga Kepolisian Negara RI dan TNI Angkatan Laut.<sup>4</sup>

Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan, contoh kasus tumpang tindih antar kementerian antara lain KKP dan Kementerian Perindustrian mengenai aturan industri pengolahan ikan, KKP dan Kementerian Perdagangan terkait pemasaran ikan, KKP dan Kementerian Kehutanan terkait pengelolaan taman nasional, KKP dan Kementerian Perhubungan terkait perizinan di pelabuhan, serta KKP dan Kementerian ESDM terkait pengaturan pasir laut. Benturan egosektoral juga terjadi dalam penanganan keamanan maritim sehingga tidak efisien. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengamankan pembentukan kesatuan penjaga laut dan pantai untuk menangani keamanan maritim, tetapi masih muncul penolakan dari sejumlah pihak yang terkait.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya kelautannya yang sedemikian besar. Sumber daya tersebut akan memberikan nilai ekonomis dan ekologi yang tinggi jika dikelola dengan baik. Namun berbagai permasalahan dalam hal kelautan masih membelit negeri ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

<sup>3</sup> *Salah Besar Mengabaikan Potensi Kekayaan Laut*. Figur, Edisi LXII. Hal. 6-9.

<sup>4</sup> *Kelautan dan Perikanan Sulit Bangkit*. Kompas, 4 Juli 2012. Hal. 18.

<sup>5</sup> *Ibid*

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan kelautan di Indonesia dalam RPJPN 2003-2025?
2. Bagaimana kebijakan pengelolaan kelautan di Indonesia dalam MP3EI 2011-2025?
3. Bagaimana penerapan asas-asas perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi biru?
4. Bagaimana pemanfaatan Iptek dalam pengelolaan kelautan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan kelautan di Indonesia dalam rangka MP3EI, dan secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebijakan pengelolaan kelautan di Indonesia dalam RPJPN 2003-2025?
2. Mengetahui kebijakan pengelolaan kelautan di Indonesia dalam MP3EI 2011-2025?
3. Memperoleh informasi mengenai penerapan asas-asas perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi biru?
4. Memperoleh informasi tentang pemanfaatan Iptek dalam pengelolaan kelautan di Indonesia?

### **D. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan kelautan dalam rangka MP3EI dengan menggunakan data yang berasal dari literatur dan sumber lainnya seperti surat kabar, majalah, dan internet.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Secara makro, pengelolaan atas sumber daya alam selama ini didasarkan pada UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penjabaran ayat tersebut selama ini masih kabur sehingga pengelolaan hampir seluruh sumber daya alam cenderung bersifat sentralistis. Kebijakan yang sentralistis tersebut pada akhirnya selain mengabaikan kepentingan-kepentingan lokal, juga telah menimbulkan degradasi pada berbagai sumber daya alam. Dengan digulirkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penjabaran Pasal 33 UUD 1945 yang menyangkut aspek pengelolaan, kini secara makro dijabarkan sebagai pemerintah pada tingkat regional. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya alam "didesentralisasikan" kepada daerah. Desentralisasi sendiri menurut *World Resource Institute* mengandung pengertian seperangkat program dan kebijakan

yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan atas kewenangan (otoritas) dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam (Khan and Fauzi, 2001)<sup>6</sup>

Sumber daya kelautan bersifat *common property* (milik bersama) dengan akses yang bersifat *quasi open access*. Istilah *common property* khususnya untuk sumber daya kelautan, lebih mengarah kepada pemilikan yang dilakukan di bawah kontrol penguasa (pemerintah) atau lebih mengarah kepada sifat sumber daya yang *public domain*. Jadi bukan bersifat dimana sumber daya tersebut tidak dimiliki (*nobody's property*). Salah satu sifat yang menonjol dari sumber daya yang bersifat *common property* adalah tidak terdefinisi hak pemilikan sehingga menimbulkan gejala yang disebut *dissipated resource rent*, yakni hilangnya rente sumber daya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang optimal. Dalam situasi dimana akses bersifat *quasi open access*, eksternalitas (khusus eksternalitas yang negatif) akan mudah timbul. Aksi atau tindakan individu yang merugikan pihak lain (misalnya dengan melakukan eksploitasi yang berlebihan) tidak terkoreksi oleh pasar (*market failure*).<sup>7</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, maka secara tidak langsung memberikan hak kepemilikan sumber daya pada tingkat lokal khususnya pemerintah daerah, sehingga masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kondisi yang *quasi open access* (karena tidak ada sumber daya ikan yang betul-betul dikelola dengan *pure open access*) akan jauh lebih mudah dikendalikan. Pemerintah daerah akan dapat mengelola sumber daya alam secara lebih rasional mengingat ketersediaan sumber daya serta terdegradasinya sumber daya akan menentukan tingkat kemakmuran daerah yang bersangkutan. Kedua faktor tersebut akan menjadi bagian dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga daerah yang memiliki kewenangan mengelola sumber dayanya akan mendapatkan insentif untuk mengelola sumber daya alam tersebut secara efisien dan seoptimal mungkin.<sup>8</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pengelolaan Kelautan dalam RPJPN 2005 - 2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 disebutkan tentang kondisi umum kelautan Indonesia. Sumber daya kelautan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal,

---

<sup>6</sup> Akhmad Fauzi. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

antara lain, (1) belum adanya penataan batas maritim; (2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut; (4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum ada pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan; (5) adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (6) belum adanya dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam kelautan yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya kelautan, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa.

Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional yang cukup besar merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Bahkan, terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen bangsa.

Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka dituangkan melalui salah satu misinya yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Maksud misi tersebut adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah

<sup>9</sup> *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025*. 2008 (<http://www.bappenas.go.id/node/123/26/uu-no-17-tahun-2007-tentang-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2005-2025-/>, diakses tanggal 13 Juli 2012).

agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sebagai ukuran tercapainya misi tersebut, maka diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, antara lain terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
2. Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.
4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

## **B. Kebijakan Pengelolaan Kelautan dalam MP3EI**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu *Sea Lane of Communication* (SLoC), yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Selain itu terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terdiri dari Selat Sunda (ALKI1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI2), dan Selat Ombe Wetar (ALKI3).<sup>10</sup>

Berdasarkan data *United Nations Environmental Programme* (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan *Large Marine Ecosystem* (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36 – Laut Cina Selatan; LME 37 – Sulu Celebes; LME 38 – Laut-laut Indonesia; LME 39 – Arafura – Gulf Carpentaria; LME 45 – Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar.

Dalam MP3EI disebutkan bahwa Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai

<sup>10</sup> MP3EI revisi-complete (20 mei 2011). 2011 ([http://rapidlibrary.com/files/mp3ei-revisi-complete-20mei11-pdf\\_ulzqc8fq9wi89on.html](http://rapidlibrary.com/files/mp3ei-revisi-complete-20mei11-pdf_ulzqc8fq9wi89on.html), diakses tanggal 25 Juni 2012).

kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Untuk memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan SLoC dan ALKI sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional. Fokus dari pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 ini diletakkan pada 8 program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategis di masing-masing di koridor ekonomi, yaitu: telematika, tekstil, makanan minuman, besi baja, alutsista, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perkayuan, minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, pariwisata, pertanian pangan, Jabodetabek area, KSN Selat Sunda, peralatan transportasi, perkapalan. Untuk kegiatan ekonomi perikanan berada di koridor Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Papua - Kepulauan Maluku.

### C. Pengembangan Prinsip Ekonomi Biru

Melihat indikator fisik wilayah Indonesia yang lebih dari 70 persen terdiri atas laut dan pesisir, maka Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar sehingga penerapan asas-asas perekonomian berdasarkan prinsip "*ekonomi biru*" perlu dikembangkan. Prinsip "*ekonomi biru*" diharapkan dapat mendorong keberlanjutan stok ikan, terjaminnya ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong keefektifan pemanfaatan sumber daya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan itu adalah melalui penguatan kerangka kelembagaan pemerintahan dan koordinasi kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional.<sup>11</sup>

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, Kebijakan ekonomi biru di Indonesia belum dilihat sebagai sesuatu yang mendesak sehingga belum didorong melalui aturan yang mendukung. Padahal Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk pangan, farmasi, dan lain-lain dari konsep ekonomi biru.<sup>12</sup>

Selain itu, pemerintah Indonesia di sejumlah pertemuan internasional juga kerap memaparkan tentang upaya melindungi enam juta kilometer persegi lautan dan pesisir melalui *Coral Triangle Initiatives* (CTI). CTI merupakan sebuah kawasan yang dikenal sebagai "*Amazon of the Seas*" karena keanekaragaman hayatinya. Kawasan segitiga terumbu karang itu menjadi pertemuan antara Samudra Hindia dan Pasifik dan menjadi tempat bagi 30 persen terumbu karang dunia dan 75 persen jenis terumbu karang yang dikenal luas, serta lebih dari 3 ribu spesies

<sup>11</sup> *Potensi Ekonomi Laut Indonesia 1,2 triliun dolar/tahun*. 2012 (<http://www.antaranews.com/berita/317688/potensi-ekonomi-laut-indonesia-12-triliun-dolar-tahun>, diakses 2 Juli 2012).

<sup>12</sup> *Kelautan dan Perikanan Sulit Bangkit*. Kompas, 4 Juli 2012. Hal. 18.

ikan. Kerjasama melalui CTI merupakan satu-satunya cara yang konsisten untuk bertindak lebih besar di luar perbatasan nasional dalam menjaga warisan dunia.

Pengembangan prinsip ekonomi biru juga dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan jalur laut sebagai jalur transportasi kegiatan ekonomi, salah satu wujudnya melalui pengembangan konsep Koridor Laut Pendulum Nusantara. Pendulum Nusantara adalah koridor laut utama penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Pengembangan konsep pendulum nusantara dilakukan dalam rangka menekan biaya logistik laut dan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Konsep ini dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta. Dengan adanya pendulum Nusantara seolah ada jalan tol logistik di perairan Indonesia untuk angkutan domestik. Hal ini akan menurunkan biaya pengangkutan yaitu tarif pengangkutan peti kemas ukuran 20 kaki dari Jakarta ke Belawan turun dari Rp6 juta menjadi Rp3 juta. Biaya angkut *container* ukuran 20 kaki dari Jakarta ke Sorong turun dari Rp18 juta menjadi Rp8 juta. Efisiensi angkutan laut ditingkatkan secara signifikan melalui efisiensi pelabuhan dan pengangkutan serta reduksi biaya logistik. Pendulum Nusantara mengakomodasi kapal ukuran 3.220 TEUs dan penyediaan *marine fuel oil* di beberapa titik di koridor tersebut. Untuk mendukung pendulum Nusantara dibutuhkan transformasi kelembagaan melalui pembentukan PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) yang merupakan gabungan dari Terminal Peti Kemas Belawan, Tanjung Priok Domestik, Surabaya Domestik, Makassar, dan Sorong.<sup>13</sup>

#### D. Pengembangan Teknologi Informasi Kelautan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah memberi sumbangan besar bagi dunia kelautan di Indonesia. Pemanfaatan kemajuan iptek salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari sumber daya kelautan dan menjaga tiap titik wilayah negara dari bahaya atau pun kejahatan yang kerap terjadi di laut wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

Beragamnya potensi kelautan dan luasnya perairan laut Indonesia telah mendatangkan kejahatan yang diperkirakan mengakibatkan kerugian hingga Rp19 triliun pertahun atau 22 persen dari kerugian akibat kejahatan di laut dunia. Melihat kenyataan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini diupayakan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar setiap potensi kelautan yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

<sup>13</sup> *Logistik Diefisiensikan Pemerintah dan Swasta Bahas Koridor Laut Pendulum Nusantara*. Kompas, Kamis 28 Juni 2012. Hal. 17.

<sup>14</sup> Prakoso Bhairawa Putera. *Teknologi Informasi untuk Kelautan Indonesia*. 2012(<http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi?isiblog&1191316948&&1036008115&1&1240996556&prak001&1240997595>, diakses 2 Juli 2012).

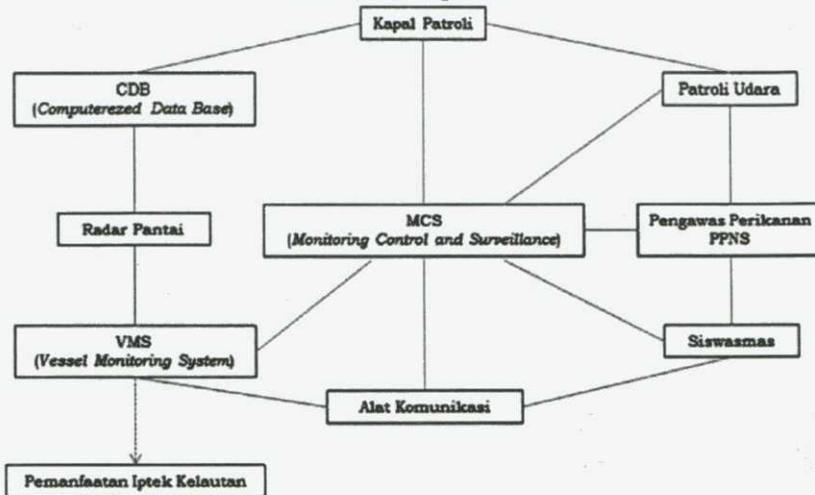
Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diterjemahkan dan ditegaskan dengan kebijakan pengawasan dalam penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. *IUU Fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan segala aktivitas yang tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *IUU Fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti *high sea*.

Guna memberikan dampak minimal pada kerugian negara maka diperlukan sebuah bentuk pengawasan. Mengingat jumlah kekuatan dari TNI AL yang dimiliki hanya 58.640 orang prajurit atau kurang dari 25 persen prajurit angkatan darat, maka secara logika berat untuk dapat mewujudkan kehadiran TNI-AL di setiap wilayah laut (*naval presence*) secara memadai. Kondisi ini pun makin membuat ironi ketika mengetahui ketersediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI-AL. TNI-AL hanya memiliki 114 KRI dan 53 pesawat yang terdiri dari berbagai tipe dan rentang pembuatan yang berbeda. Kondisi ini sangat tidak memadai untuk mengamankan wilayah perairan yang begitu luas. Padahal, guna melindungi zona perbatasan laut nasional sepanjang lebih dari 613 mil, idealnya dibutuhkan minimal 38 kapal patroli.

Kenyataan semacam ini, menuntut iptek untuk semaksimal mungkin memberikan kontribusi sebagai alternatif dalam pengawasan wilayah laut. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memberikan ruang iptek untuk hadir dalam *Monitoring Control and Surveillance (MCS)*. *Monitoring Control and Surveillance (MCS)* merupakan sistem yang telah dipergunakan di banyak negara. Di dunia internasional, MCS ini dikelola secara bersama-sama sejak tahun 2001. Organisasi MCS internasional mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama di antara anggotanya untuk saling mencegah, menghalangi dan menghapuskan *IUU fishing*. Indonesia sendiri, telah merintis sistem MCS. Namun, masih bersifat parsial dalam bagian-bagian yang berdiri sendiri-sendiri serta bersifat sektoral.

Berdasarkan skenario kebijakan optimistik, pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, dengan dukungan pemerintah pada pengembangan MCS kelautan dan perikanan menjadi wajib. MCS merupakan salah satu prasyarat pokok dalam pengelolaan sumberdaya laut. Secara sederhana komponen MCS terlihat pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Komponen MCS



Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Komponen MCS yang melibatkan teknologi informasi secara khusus yaitu *Vessel Monitoring System (VMS)* atau yang lebih dikenal dengan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit. VMS ini dilaksanakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal perikanan. Dalam kaitan ini, DKP telah melakukan pengkajian terhadap beberapa proposal pengembangan VMS di Indonesia, antara lain dari USA, Australia, dan Perancis. Pada tanggal 2 Januari 2002 DKP telah menerima surat dari Pemerintah Perancis mengenai persetujuan *soft loan* untuk VMS sebesar 9,38 million Euros.

VMS ini berfungsi untuk mendeteksi lalu-lintas kapal yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Secara sederhana, cara kerja sistem ini akan melihat setiap kapal yang sudah memiliki izin penangkapan ikan dengan ukuran tertentu. Setiap kapal ini akan diberi *transponder* untuk dipasang di kapalnya. Sehingga, pergerakan kapal akan terpantau lewat satelit yang menangkap sinyal dari *transponder*. Hasil pencitraan satelit akan diteruskan di unit pengawasan satelit di Perancis. Lalu, dikirimkan ke *Network Operation Center (NOC)* di Kawasan Kuningan, Jakarta.

Hasil akhir, berupa data-data yang dibutuhkan oleh KKP tentang lalu-lintas kapal diterima oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJP2SDKP). Melalui sistem ini juga akan terlihat apabila ada kapal asing atau kapal yang tidak memiliki izin. Selain itu, VMS juga dapat menyajikan data-data kegiatan kapal, sehingga pemerintah bisa memberikan pengawasan khusus kepada armada yang dinilai melakukan kegiatan mencurigakan. Namun, disini lain VMS hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Hanya direktorat yang berwenang yang bisa mengakses.

Ironisnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan perikanan belum memasang *transmitter* pada kapal perikanan. Padahal pemerintah telah mengeluarkan ketentuan dimana setiap kapal perikanan penangkap maupun pengangkut diwajibkan untuk memasang *transmitter Vessel Monitoring System*. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang mengamanatkan kewajiban kapal-kapal perikanan untuk memasang *transmitter Vessel Monitoring System*.

Permasalahan itu disebabkan oleh kesadaran yang kurang terhadap pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab oleh pihak perusahaan, atau juga penyediaan alat VMS yang biayanya cenderung memberatkan perusahaan karena bagi kapal-kapal yang berukuran di atas 60 GT diwajibkan untuk memasang *transmitter Vessel Monitoring System*, sehingga pemilik Kapal/Perusahaan Perikanan berkewajiban untuk membeli, memasang *transmitter* serta membayar *airtime*-nya sendiri. Terlepas dari permasalahan tersebut, penggunaan Teknologi Informasi (TI) telah menyentuh dunia perikanan dan kelautan Indonesia. Metode semacam ini sejak lama telah diterapkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara yang kaya akan potensi laut seperti halnya Jepang.

Selain penggunaan TI dalam bentuk VMS, pada MCS ada juga *Computerized Data Base (CDB)*. CDB merupakan alat komunikasi yang dilengkapi dengan komputer sehingga dapat mengirimkan data-data hasil penangkapan ikan di pelabuhan-pelabuhan dan informasi lainnya. CDB diprogram untuk ditempatkan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan tipe pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara, dan pelabuhan perikanan pantai secara selektif. Sistem ini setidaknya telah berada di lebih lima belas pelabuhan di Indonesia.

Masih banyak lagi sumbangan TI yang bisa digunakan untuk dunia perikanan dan kelautan di Indonesia, seperti memaksimalkan penggunaan radar pantai buatan anak negeri atau pun memaksimalkan SDM TI yang diperoleh dari negeri sendiri. Pemanfaatan secara maksimal seperti ini, cepat atau lambat akan menumbuhkan semangat untuk tetap menjaga milik negeri di setiap anak bangsa. Inilah bukti nyata sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelautan republik ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam RPJPN tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa pemanfaatan potensi dan peluang dari sumber daya kelautan yang selama ini belum optimal perlu diperhatikan, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya kelautan yang tersebar di wilayah laut teritorial, ZEE sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut, serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan sehingga dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Oleh Karena itu, pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen bangsa.
2. Dalam MP3EI disebutkan bahwa Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Fokus dari pengembangan MP3EI 2011-2025 ini salah satunya diletakkan pada program kelautan yang terdiri dari beberapa kegiatan ekonomi utama disesuaikan dengan potensi dan nilai strategis di masing-masing di koridor ekonomi, seperti perikanan berada di koridor Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara, Papua - Kepulauan Maluku.
3. Melihat potensi kelautan Indonesia yang besar, asas-asas perekonomian berdasarkan prinsip "*ekonomi biru*" perlu diterapkan. Melalui prinsip "*ekonomi biru*" ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan stok ikan, terjaminnya ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong keefektifan pemanfaatan sumber daya kelautan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penguatan kerangka kelembagaan pemerintahan dan koordinasi kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Kelautan dan perikanan Indonesia mulai memaksimalkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi tersebut berawal dari kurang maksimalnya pengawasan di wilayah laut Indonesia sehingga menuntut penggunaan Teknologi Informasi. Pemanfaat teknologi dan informasi dalam pengawasan kelautan Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *Monitoring Control and Surveillance (MCS)* yang komponennya terdiri dari *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Computerezed Data Base (CDB)*.

## **B. Saran**

1. Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 2013, kiranya prinsip ekonomi biru perlu menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam forum APEC tersebut.
2. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mengelola potensi kelautan diantaranya meningkatkan anggaran untuk riset dan pembangunan pesisir dan kelautan, menjaga lingkungan agar tetap terjaga, preservasi dan konservasi sumber daya, dan pengelolaan yang terintegrasi dan multisektoral.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Marsuki. *Analisis Perekonomian Nasional & Internasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Pujayanti, Adirini dkk. *Masalah Negara Kepulauan di Era Globalisasi*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011.

### **Dokumen Resmi**

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
- Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d. Oktober 2011. Pusat Data, Statistik Dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011.

### **Makalah/Jurnal**

- Kelautan dan Perikanan Sulit Bangkit*. Kompas, 4 Juli 2012.
- Logistik Diefisiensikan Pemerintah dan Swasta Bahas Koridor Laut Pendulum Nusantara*. Kompas, Kamis 28 Juni 2012.
- Salah Besar Mengabaikan Potensi Kekayaan Laut*. Figur, Edisi LXII.

## Internet

- MP3EI revisi-complete (20mei2011)*. 2011 ([http://rapidlibrary.com/files/mp3ei-revisi-complete-20mei11-pdf\\_ulzqc8fq9wi89on.html](http://rapidlibrary.com/files/mp3ei-revisi-complete-20mei11-pdf_ulzqc8fq9wi89on.html), diakses 25 Juni 2012).
- Potensi Ekonomi Laut Indonesia 1,2 triliun dolar/tahun*. 2012 (<http://www.antaraneews.com/berita/317688/potensi-ekonomi-laut-indonesia-12-triliun-dolar-tahun>, diakses 2 Juli 2012).
- Paongan, Y. *Indonesia Raksasa Maritim: Tertidur Lelap dan masih Bermimpi*. 2011 (<http://www.indonesiamaritimeclub.net/2011/03/29/indonesia-raksasa-maritim-tertudur-lelap-dan-masih-bermimpi/>, diakses 19 April 2012).
- Putera, Prakoso Bhairawa. *Teknologi Informasi untuk Kelautan Indonesia*. 2012 (<http://u.lipi.go.id/1240996556>, diakses 2 Juli 2012).

BAGIAN 7

**PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA  
SEBAGAI PENDUKUNG KEMAJUAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

*oleh: Niken Paramita Purwanto*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai potensi yang ditunjukkan oleh karakteristik geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya serta sumber daya kekayaan alam yang dimiliki. Dari sisi geografis, Indonesia memiliki lokasi yang strategis serta memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia karena dilalui oleh satu *Sea lane of Communication* (SLoC), yaitu selat Malaka yang menempati peringkat pertama dalam jalur pelayanan kontainer global. Sedangkan dari sisi demografi, meningkatnya porsi penduduk usia produktif hingga tahun 2013. Kondisi demografi Indonesia ini menunjukkan potensi produktivitas sumber daya manusia di masa mendatang. Potensi yang lain adalah kekayaan sumber daya alam yang kaya, baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. Bahkan untuk beberapa komoditas unggulan, Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir terbesar di dunia. Berbagai keunggulan Indonesia dalam hal kekayaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan prinsip kehati-hatian khususnya terkait dengan keberlanjutan sumber daya alam tersebut dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Perbaikan citra Indonesia di tingkat Internasional juga mengalami kemajuan. Saat ini, kepercayaan dunia terhadap kondisi Indonesia telah membaik seiring dengan perbaikan ranking kondisi Indonesia oleh lembaga Internasional. Berdasarkan prinsip tersebut maka perlu dilakukan transformasi ekonomi yaitu mengalihkan perekonomian yang didasari atas konsumsi untuk beralih pada perekonomian yang tumbuh berdasarkan investasi. Transformasi tersebut harus dipersiapkan dari sekarang dengan harapan ketika tahun 2030 nanti Indonesia sudah berhasil dan selesai melakukan transformasi. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, saat ini dikembangkan sebuah konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu konsep pengembangan koridor ekonomi Indonesia. Konsep ini menggunakan pendekatan wilayah untuk mengakselerasi perekonomian dengan upaya memperbaiki berbagai permasalahan pengembangan wilayah, yaitu keterbatasan infrastruktur dan suplai energi, penanganan logistik yang belum efisien, pasar domestik yang terbagi-bagi (belum menyatu), dan terbatasnya koneksitas ke pasar global.

Pembangunan nasional bukanlah semata-mata agregasi atau gabungan atas pembangunan daerah/wilayah atau bahkan gabungan pembangunan antar sektor semata. Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (*linkages*), baik keterkaitan spasial (*spatial linkages* atau *regional linkages*), keterkaitan sektoral (*sectoral linkages*) dan keterkaitan institusional (*institutional linkages*). Hal

tersebut dilakukan melalui sinergi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Pihak swasta akan memegang peran yang utama dan penting dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi khususnya dalam hal meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Secara lebih spesifik, dalam koridor ekonomi Indonesia, peran Pemerintah (pusat) hanya akan terbatas pada regulasi dan alokasi investasi pusat, sedangkan peran pemerintah (daerah), khususnya daerah yang merupakan lokasi dari koridor ekonomi Indonesia sehingga berperan sebagai *direct user* dari koridor yang telah ditetapkan. Selain itu daerah juga akan berperan dalam penentuan regulasi dan alokasi investasi di daerah. Namun, perlu disadari pula bahwa anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, semangat *not business as usual* harus terefleksi sebagai elemen penting dalam pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur.

## **B. Perumusan Masalah**

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sebaran sumber daya alam khususnya minyak dan gas, serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri terkonsentrasi di beberapa wilayah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah dan kesejahteraan antar wilayah. Hal yang perlu diupayakan adalah beralih dari paradigm ketergantungan sektor primer sebagai penggerak ekonomi ke paradigm penciptaan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam yang melimpah merupakan potensi ekonomi, namun pengelolaan kekayaan alam tersebut tentunya harus diiringi dengan manajemen yang baik dan dukungan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dengan lebih optimal. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya keterkaitan antar wilayah yang ditunjukkan oleh masih rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian. Ketersediaan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia, khususnya wilayah timur Indonesia masih kurang memadai. Ke depan, perkembangan infrastruktur Indonesia perlu difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal ini ditunjukkan untuk mengurangi biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi produk.

Anggaran pemerintah yang terbatas sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa skema penyediaan infrastruktur dapat dilakukan melalui alokasi investasi secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP).

### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui potensi unggulan koridor percepatan pembangunan di wilayah Indonesia.
2. Mengidentifikasi peluang serta strategi yang memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah Indonesia.
3. Mengetahui model dan strategi percepatan pembangunan pada 8 program dan 22 fokus kegiatan utama di 6 KE.

### D. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif dimana berasal dari *secondary data* dan tinjauan literatur.

### E. Tinjauan Pustaka

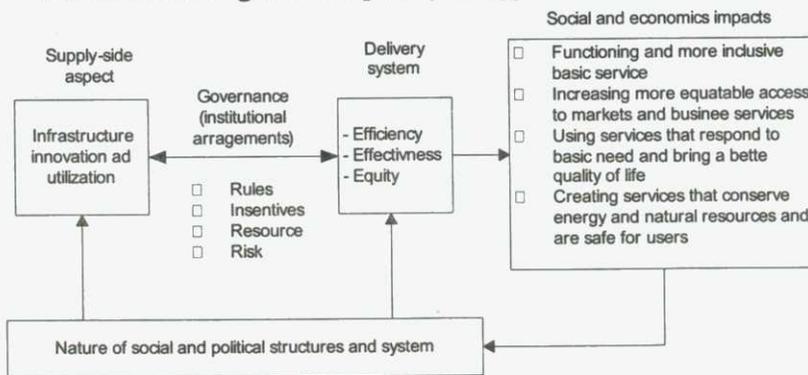
Peran dunia usaha juga harus ditingkatkan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. *Pertama*, peran pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan. Dunia Usaha (swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif bagi investasi. Oleh karena itu, komitmen dunia usaha dan pemerintah menjadi sangat penting dalam mendukung kebijakan yang dilakukan. *Kedua*, reformasi kebijakan keuangan negara. Kebijakan anggaran harus dimulai dengan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang *credible* dan berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. *Ketiga*, reformasi birokrasi. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan melalui penciptaan birokrasi yang efektif, birokrasi yang didukung oleh kelembagaan yang kuat serta menciptakan komitmen kepada penerapan *good governance*. *Keempat*, penciptaan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menjadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi. *Kelima*, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi yang merupakan prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia. *Keenam*, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Negara bertanggung jawab

melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap resiko pembangunan ekonomi sehingga perlu menyediakan jaminan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.

Pada dasarnya model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (Budiharsono, 2001).

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan non basis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep-konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas dan konsep administrasi. Dijelaskan oleh Rusastra (2002) bahwa yang dimaksud kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan nonbasis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya berupa barang atau jasa yang diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

**Gambar.1. Kerangka Konsep Penyelenggaraan Infrastruktur**



Sumber: Usman, 2009

Konsep koridor ekonomi menggunakan pendekatan wilayah untuk mengakselerasi perekonomian dengan upaya memperbaiki berbagai permasalahan pengembangan wilayah. Saat ini sudah teridentifikasi 6 koridor ekonomi yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia yaitu secara spesifik: Sumatera bagian Timur-Barat Laut Jawa, Jawa bagian Utara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa bagian Timur-Bali-Nusa Tenggara, serta Kepulauan Maluku dan Papua. Koridor ekonomi Indonesia itu sendiri intinya terdiri dari *masterplan* akses

darat utama menghubungkan pusat-pusat ekonomi, dan akses darat penunjang menghubungkan sektor sektor fokus ke fasilitas/infrastruktur penunjang yang lokasinya akan tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia akan bertitik berat pada konektivitas nasional (konektivitas intra dan antar pulau, serta internasional). Maka dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia diselaraskan dengan 4 konsep utama yaitu peta jalan, sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, dan pengembangan wilayah. Selain konektivitas intra dan antar pulau, pengembangan koridor ekonomi juga ditujukan untuk meningkatkan konektivitas regional dan global. Dalam lingkup regional dan global, perkuatan konektivitas nasional melalui konsep koridor ekonomi diharapkan akan menghubungkan Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional seperti ASEAN dan dunia (global) dalam upaya meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global (*regionally and globally connected*). Pelaksanaan Koridor Ekonomi Indonesia atau *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan 8 (delapan) program utama tersebut meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan strategis nasional. Sedangkan fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek, dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Strategi utama pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama *Pertama*, mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Keenam koridor ekonomi tersebut telah ditetapkan tema pembangunan di masing-masing koridor sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing wilayah serta tujuan pengembangan yang ingin dicapai. *Kedua*, meningkatkan konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik. Dalam konteks pengembangan konektivitas

nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara nasional, maka pengembangan penguatan konektivitas dilakukan dengan memperkuat konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi serta memperkuat konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar koleksi dan distribusi bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau). Sedangkan untuk meningkatkan konektivitas secara internasional, maka peningkatan konektivitas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pergerakan komoditas (barang, jasa, dan informasi) secara efektif dan efisien sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara. *Ketiga*, mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi merupakan hal yang mendesak. Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan program utama, meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan, meningkatkan kegiatan dan pengembangan riset melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi serta mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan. Terkait dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur, pengembangan kegiatan ekonomi utama dalam Koridor Ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan dari sisi energi yang cukup besar. Dengan adanya Koridor Ekonomi Indonesia, kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 90.000 MW (dalam kondisi beban puncak) yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor. Pemenuhan kebutuhan energi serta infrastruktur yang lain tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dari sisi kebutuhan investasi, untuk mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia, telah diindikasikan nilai investasi yang akan dilakukan yaitu sekitar Rp4.012 triliun. Dari total investasi yang diperkirakan tersebut, Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit tenaga listrik. Sedangkan kontribusi sisanya diupayakan akan dipenuhi dari peran swasta maupun BUMN dan lainnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa MP3EI merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Pemerintah dengan dunia usaha dalam upaya mengembangkan berbagai sektor unggulan serta sekaligus mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia. Telah disadari bersama bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia di masa mendatang memerlukan peran serta dari dunia usaha. Melalui MP3EI diharapkan akan terbangun suatu komitmen bersama dari berbagai pihak

pemangku kepentingan untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur<sup>1</sup>

Pendekatan sektoral didasarkan atas identifikasi sektor-sektor unggulan dengan prospek pengembangan tinggi secara global dan Indonesia memiliki potensi dan kemampuan untuk ditingkatkan daya saingnya ke depan. Sementara itu, pendekatan regional atau pengembangan wilayah diterapkan untuk menyebarkan pengembangan sektor-sektor unggulan yang telah ditetapkan ke dalam 6 (enam) koridor ekonomi yang telah diidentifikasi. Untuk mendukung pengembangan potensi unggulan wilayah serta menciptakan sinergi perencanaan dengan pemerintah pusat, maka peran perencanaan khususnya di daerah sebagai lokasi pelaksanaan koridor ekonomi perlu difokuskan untuk beberapa hal sebagai berikut<sup>2</sup>

- a. Percepatan penetapan RTRW Provinsi dalam upaya penyelesaian konflik penggunaan lahan antara kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan;
- b. Rendahnya pelaksanaan hukum (*law enforcement*). Ancaman keamanan dan ketertiban masih cukup tinggi, termasuk di kawasan wisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan peraturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kriminal;
- c. Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu bersama-sama meningkatkan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan baik di pusat dan di daerah. Hambatan perdagangan antar daerah yang berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi, berupa pungutan dan duplikasi pajak. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengembangan wilayah untuk koridor ekonomi.

Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik antar wilayah, sinergitas pembangunan antar wilayah merupakan jawaban untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional dengan mengutamakan pengelolaan sumber kekayaan alam secara lebih efisien dan efektif guna mendorong keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, serta memperhatikan kaidah pembangunan secara berkelanjutan dan menjaga kesinambungan pembangunan. Peran pemerintah yang kuat akan menjamin adanya sinergi dalam seluruh konsep perencanaan pembangunan yang ada seperti RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, Koridor Ekonomi Indonesia dan berbagai *MasterPlan* Wilayah. Sinergi berbagai konsep perencanaan pembangunan akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang diinginkan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumber daya, dan

<sup>1</sup> Opini: Pertumbuhan ekonomi dalam persimpangan," JIBI, 24 Mei 2012 (<http://bisnis-jabar.com/kolom-opini/opini-pertumbuhan-ekonomi-dalam-persimpangan.html>, diakses 7 Juni 2012).

<sup>2</sup> Republik Indonesia (2011). "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025," Kementerian bidang Perekonomian.

pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan penentuan target pembangunan di daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) baik jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya sinergi diharapkan upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia melalui masing-masing koridor ekonomi akan cepat terlaksana dan terintegrasi baik dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diharapkan prioritas perencanaan pembangunan daerah juga akan mendukung.

**Tabel 2. Tipe Pelaksanaan Desentralisasi**

<b>Tipe</b>	<b>Kewenangan Kebijakan</b>	<b>Kewenangan Implementasi</b>	<b>Kewenangan Pembiayaan</b>
Dekonsentrasi	Pemerintah Pusat	Pemerintah Pusat	Dana Pemerintah Pusat
Delegasi	Pemerintah Pusat dan Daerah	Pemerintah daerah diawasi oleh Pemerintah Pusat	Dana Pemerintah daerah, dengan atau tanpa kontrak pembiayaan oleh pemerintah pusat, diambilkan dari dana pemerintah pusat
Devolusi	Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah	Pemerintah daerah, pajak atau dana pemberian dari pemerintah pusat.

Sumber: Vaillancourt dan Wingender (2007)

Selain itu, penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung seberapa kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia. Peningkatan konektivitas pada enam koridor ekonomi didasarkan pada pengintegrasian empat elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Integrasi tersebut dilakukan untuk dapat mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Pengintegrasian keempat elemen utama tersebut ditujukan untuk mencapai visi konektivitas nasional yaitu terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (*Locally Integrated, Globally Connected*). Yang dimaksud dengan terintegrasi secara lokal adalah melakukan pengintegrasian sistem konektivitas yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung mobilisasi barang, jasa serta manusia ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengembangkan integrasi konektivitas secara lokal perlu dilakukan integrasi jaringan transportasi dengan simpul-simpul transportasi. Selain jaringan transportasi, untuk mendukung

konektivitas perlu pula dilakukan pengintegrasian jaringan komunikasi dan informasi. Pengintegrasian konektivitas tersebut perlu dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah di bagian timur Indonesia yang cenderung memiliki ketersediaan jaringan transportasi yang sangat minim terkait dengan kondisi geografis dan aspek lainnya, setidaknya perlu dicermati bagaimana melakukan pengintegrasian konektivitas secara efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pemerataan antar daerah. Sementara itu, yang dimaksud dengan integrasi secara global adalah adanya sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien Enam koridor ekonomi tersebut antara lain adalah koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua-Kepulauan Maluku. Pada setiap koridor tersebut akan dikembangkan konektivitas intra wilayah serta antar wilayah dengan tujuan menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama yang ada di dalam setiap koridor dan antar koridor serta dengan pasar dunia. Sementara itu, yang dimaksud dengan integrasi secara global adalah adanya sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien yang saling terkait satu dengan yang lainnya serta memiliki peran sebagai pintu internasional. Dalam hal ini, pengembangan pelabuhan dan bandara dengan fasilitas perdagangan dan industri serta bea cukai secara efektif dan efisien akan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal konektivitas, Pemerintah merupakan motor penggerak dalam menciptakan serta membangun infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal mendukung integrasi perekonomian yaitu dengan melakukan identifikasi simpul-simpul transportasi (*transportation hubs*) dan *distribution centers* untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang serta peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional. Dalam mengembangkan sistem konektivitas dalam koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara global merupakan hal utama yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (2) menurunkan biaya logistik; (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan upaya penguatan konektivitas di enam koridor ekonomi, berikut beberapa fokus penguatan konektivitas yang ditujukan untuk mendukung tema pembangunan di masing-masing koridor ekonomi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

Wilayah Pulau Sumatera berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Selain itu, wilayah Pulau Sumatera memiliki akses perdagangan paling strategis dibanding pulau besar lain di Indonesia dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera diarahkan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera di arahkan pada beberapa kegiatan ekonomi utama yaitu pengembangan kelapa sawit, karet, batubara dan besi baja. Untuk mendukung pengembangan setiap kegiatan ekonomi utama tersebut diperlukan upaya peningkatan konektivitas, seperti pembangunan jalan raya dan jalur rel kereta api. Sementara itu, posisi Sumatera yang strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain, maka penguatan konektivitas difokuskan pada pengembangan hub internasional berupa pelabuhan utama bagi pelayaran internasional baik di timur pantai Sumatera dan sisi barat Sumatera sebagai alternatif untuk membuka dan memperbesar peluang pembangunan di luar Jawa sekaligus mengurangi beban Pulau Jawa.<sup>3</sup>

### B. Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang terjadi di wilayah Jawa tidak diimbangi dengan daya dukung sumber daya yang memadai. Namun, di sisi lain, wilayah Jawa memiliki infrastruktur yang memadai dibandingkan wilayah lainnya di luar Jawa. Dengan daya tarik infrastruktur yang lebih memadai dan posisi sebagai pusat pemerintahan membuat Jawa tetap paling diminati untuk investas. Oleh karena itu, Pembangunan Koridor Ekonomi Jawa diarahkan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Penguatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur difokuskan pada bagian utara Jawa dengan dibangunnya jalan raya trans Jawa dan jalur kereta api yang menjadi konektivitas antar lokus dalam rangka memperlancar arus perpindahan komoditas dari utara ke selatan dan sebaliknya. Disamping itu, pengembangan pelabuhan laut dan udara juga dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar komoditas baik di dalam koridor maupun antar koridor. Dengan adanya pengembangan berbagai kegiatan ekonomi utama serta pengembangan konektivitas di Koridor Ekonomi Jawa diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan Produk Domestik

<sup>3</sup> Republik Indonesia (2011). “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025,” Kementerian bidang Perekonomian.

Regional Bruto (PDRB) antar daerah sekaligus mendorong peningkatan integrasi secara global.<sup>4</sup>

### **C. Pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan**

Wilayah Kalimantan merupakan pusat pembangunan di Indonesia Bagian Timur dan memiliki letak yang strategis dan mendukung bagi kerjasama antar daerah, selain wilayah tersebut memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai baik dari sektor pertanian pertambangan maupun perikanan. Selain itu, wilayah Kalimantan memiliki potensi yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara), kehutanan (kayu), perkebunan (sawit, karet), serta perikanan laut dan darat. Pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan diarahkan sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam Koridor Ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, telah diidentifikasi beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan di masa depan, yaitu: besi baja, bauksit, dan perkayuan Sebagai wilayah yang cukup luas, beberapa pusat kegiatan ekonomi utama dalam struktur tata ruang Kalimantan akan dihubungkan melalui jaringan jalan raya dan jalur rel kereta api trans Kalimantan yang terintegrasi dengan angkutan sungai. Dengan banyak perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertambangan di Kalimantan, maka pengembangan infrastruktur di Kalimantan juga dilakukan melalui model pengembangan infrastruktur konsorsium. Melalui model ini, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan khususnya batubara, saling berbagi dalam pengembangan dan penggunaan infrastruktur seperti rel kereta api dan jalan sehingga dapat meningkatkan efisiensi.<sup>5</sup>

### **D. Pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi**

Wilayah Sulawesi merupakan pusat pembangunan di Indonesia Bagian Timur dan memiliki letak yang strategis dan mendukung bagi kerjasama antar daerah. Selain itu, wilayah tersebut memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai baik dari sektor pertanian, pertambangan maupun perikanan. Wilayah Pulau Sulawesi memiliki potensi yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor perkebunan (kakao, cengkeh, kopi, jambu mete), perikanan laut (tuna dan cakalang), tanaman pangan (padi dan jagung), serta pertambangan (nikel, aspal dan marmer). Berdasarkan berbagai potensi yang ada, maka pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi diarahkan sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional".

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pengembangan infrastruktur di wilayah Sumatera diarahkan pada pola pergerakan barang dari hasil perkebunan maupun tambang menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri, yang kemudian berlanjut menuju ke pelabuhan. Hal yang sama juga dilakukan dalam pembangunan infrastruktur air dan energi. Pengembangan infrastruktur air dan energi dilakukan untuk mendukung produksi pertanian dan perkebunan maupun pertambangan yang ada di setiap provinsi. Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi akan berkembang seiring dengan pembangunan dan keberadaan jalan raya trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi bagian selatan hingga utara. Selain itu, mengingat bahwa koridor ini berada di sisi Samudra Pasifik dan jalur pelayaran internasional, maka perlu ditetapkan beberapa lokasi yang akan berfungsi sebagai *hub* internasional. Penetapan *hub* internasional di kawasan Indonesia Timur diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Indonesia Timur yang lebih didominasi oleh kepulauan.<sup>6</sup>

#### **E. Pengembangan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara**

Sebagai satu kesatuan wilayah, wilayah Bali-Nusa Tenggara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama peternakan, perikanan dan pariwisata. Potensi sumber daya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumber daya lahan, hutan dan perkebunan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara diarahkan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”. Dalam jangka panjang, kegiatan kepariwisataan di koridor ini merupakan pendorong pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara melalui diversifikasi produk wisata, perluasan kawasan pariwisata dan pengembangan daya saing tujuan pariwisata secara berkelanjutan, maupun pengembangan pangsa pasar dengan daya beli tinggi. Pengembangan infrastruktur dilakukan sejalan dengan pengembangan tujuan pariwisata dalam koridor. Pengembangan kegiatan peternakan secara konsisten akan diupayakan melalui pengembangan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas bibit sapi, pengintegrasian kegiatan peternakan dan tanaman pangan untuk menjamin sumber pakan ternak, pengembangan industri pengolahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan pelabuhan laut untuk mendistribusikan hasil produksi peternakan. Pengembangan transportasi pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara dikembangkan dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut, dan udara yang menghubungkan baik antar pulau maupun antar provinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis koridor ini yang berupa gugus pulau. Sistem konektivitas ini akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama (pariwisata, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

investasi tinggi. Eksplorasi pertambangan tidak diprioritaskan pada koridor ini karena akan memberikan dampak negatif pada kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan. Prioritas peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara diberikan pada pelabuhan yang telah ada dan berdekatan dengan lokus kegiatan ekonomi utama agar lebih efektif, efisien dan meminimalkan biaya transportasi.<sup>7</sup>

#### **F. Pengembangan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku**

Potensi pengembangan wilayah Kepulauan Maluku yang besar adalah berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumberdaya perikanan laut masih sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Sedangkan wilayah Papua memiliki potensi pengembangan yang masih punya peluang besar untuk dikembangkan juga berbasis sumberdaya alam terutama pertambangan, hutan, perikanan, perkebunan dan wisata bahari. Berdasarkan berbagai potensi yang ada, maka pembangunan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku diarahkan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”. Pengembangan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku akan difokuskan kepada penyiapan konektivitas dari Sofifi–Ambon–Sorong–Manokwari–Timika. *Merauke Integrated Food and Energy Estate* di Merauke yang sedang berkembang perlu ditunjang dengan penyiapan infrastruktur berskala internasional dengan dibangunnya pelabuhan udara dan laut Selain itu, konektivitas darat dari Timika–Jayapura–Merauke juga perlu dikembangkan seiring dengan berkembangnya pusat-pusat ekonomi di setiap simpul koridor. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan ini sangat besar sehingga mungkin diperlukan pelibatan sumber dana asing, maka pemerintah dapat memulai *feasibility study* pengembangan kawasan, sehingga dapat mempermudah memasarkan kawasan untuk menjaring investasi.<sup>8</sup>

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sistem keterkaitan antar wilayah secara nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global sangat diperlukan dalam upaya mendukung integrasi perekonomian nasional. Kurangnya dukungan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antar wilayah (*domestic connectivity*), teknologi, dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

sistem informasi handal mengakibatkan sistem logistik nasional berjalan kurang efisien dan efektif.

Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti tingginya disparitas harga antar wilayah dan masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan koridor-koridor utama ekonomi yang berdaya saing, terutama di kawasan timur Indonesia. Kondisi yang diharapkan dari keterkaitan antar wilayah adalah kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional harus merupakan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

## **B. Saran**

Indonesia mempunyai tantangan dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Konektivitas didukung oleh sistem transportasi nasional dengan pola keterpaduan antar dan intramoda dengan mempertimbangkan karakteristik tiap moda transportasi, pola pengembangan wilayah, aspek geografis, faktor spesifik wilayah, dan pemilihan teknologi yang tepat

Penyusunan kebijakan dan regulasi pada fase pertama ini harus lebih ditekankan pada pengembangan lintas koridor seperti penetapan *global hub* untuk pelabuhan laut dan bandar udara di kawasan barat dan timur Indonesia yang dilaksanakan di dalam koridor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cox, Wendell, Ronald Utt and Janet Corcoran (2003). *Building for Tomorrow: Innovative Infrastructure Solution.*, National Association of Home Builders.
- Departement of the Environment, Transport and the Regions (1998). "A New Deal For Transport- Better For Everyone", Guidance on Provisional Local Transport Plan, Departement of the Environment, Transport and the Regions, UK.
- Eppell, V.A.T. (Tony) and McClurg, Brett A and Bunker, Jonathan M (2001), "A four level road hierarchy for network planning and management". In Jaeger, Vicki, Eds. Proceedings 20th ARRB Conference, Melbourne.
- Anderson, Alan H., dan Dennis. *Effective Enterprise*. Cambridge, Massachuseetes, USA: Blackwale Publiser Inc., 1996.
- Iqbal, Zafar dan Areef Suleman. (2010). "Indonesia: Kendala Kritis Bagi Pembangunan Infrastruktur". Islamic Development Bank.
- Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia (2011). "Membangun Jalan," Edisi 5, Januari.
- Usman, S. (2009). "Studi Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat: Image of The Subject Matter", Magister Pengelolaan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat (PIPM), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia (2011). "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025," Kementerian bidang Perekonomian.
- Vaillancourt, F. and Wingender, P. (2007). *Decentralization and Transport Sector*. Handbook of Transportation Policy and Administration. CRC Press, London.
- Savas, E. E. (1987). *Privatization: The Key to Better Government*. New York: Chatham House Publishers, Inc.
- The Western European Road Directors (WERD). (2003 ). "Data Management For Road Administrations: A Best Practice Guide, Version 2.0."
- The World Bank. (2004). "India Financing Highways. Energy and Infrastructure." Sector Unit South Asia Region. Document of World Bank.
- The World Bank. (2008). "Indian Road Construction Industry : Capacity Issues, Constraints & Recommendations." New Delhi: Colorcom Advertising.
- United Nation (2001). "World Urbanization Prospects: The 2009 Revision." Economic and Social Affairs.

Wahab, Abdul. (2009). "Dampak Peingkatan Kualitas Jalan Lingkar Barat Enrekang Terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro.

Willis, Joe and Brian Dollery. 2001. "Government Failure, Social Capital and the Appropriateness of the New Zealand Model for Public Sector Reform in Developing Countries." *World Development*, Vol. 29, No. 2, pp. 245-263.

BAGIAN 8

**INVESTASI ASING DALAM KERANGKA *MASTERPLAN* PERCEPATAN  
DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA:  
PELUANG DAN TANTANGAN**

*oleh: Sony Hendra Permana\**

---

\* Penulis adalah Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Meskipun kinerja sektor makro ekonomi Indonesia di kawasan tersebut relatif sangat baik namun secara keseluruhan posisi Indonesia masih terbelakang. Berdasarkan laporan *Global Competitiveness Report* (GCR) yang disampaikan pada *World Economic Forum* periode tahun 2011-2012, peringkat daya saing Indonesia turun 2 rangking dibandingkan tahun sebelumnya dari peringkat 44 menjadi peringkat 46 dari 142 negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Peringkat Indonesia ini masih jauh di bawah peringkat negara-negara tetangga seperti Singapura yang menempati peringkat 2, Malaysia di peringkat 21, Brunei Darrussalam di peringkat 28 dan Thailand di peringkat 39.<sup>1</sup>

Penurunan peringkat daya saing Indonesia ini, selain disebabkan oleh faktor birokrasi yang berbelit-belit juga lebih banyak disebabkan oleh lambatnya pembenahan pada infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu pilar dari 12 pilar dalam GCR dan juga persyaratan dasar yang harus dimiliki dalam menciptakan daya saing suatu negara. Pada komponen infrastruktur, fasilitas pelabuhan Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, dimana posisi Indonesia masih berada di rangking 103. Kondisi pasokan listrik juga masih belum bisa diandalkan, hanya menempati peringkat 89. Hal ini diperparah dengan kesiapan teknologi Indonesia yang menempati rangking 94 dan dinilai masih sangat lamban dibandingkan negara tetangga.<sup>2</sup>

Kondisi infrastruktur yang belum baik ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan oleh Indonesia kalah bersaing dengan produk dari negara-negara pesaing, karena biaya distribusi yang tinggi. Sebagai contoh buah nenas Indonesia memiliki keunggulan dari sisi iklim dan murahness harga lahan di luar Jawa. Akan tetapi, bagi produsen kecil, biaya pengapalan, sebagai contoh Lampung, sekitar \$0,47 per kardus lebih tinggi dari Thailand menyebabkan daya saing Indonesia rendah di pasar internasional. Meskipun Indonesia memiliki tarif pelabuhan yang relatif rendah, namun efisiensi sistem pelabuhan masih buruk sehingga biaya pengapalan menjadi tinggi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2011-2012*, [www.worldeconomicforum.org](http://www.worldeconomicforum.org), diunduh tanggal 12 September 2011.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Indonesia Policy Briefs: Memulihkan Daya Saing*, <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/competitiveness.pdf>, diunduh tanggal 26 Mei 2012

Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia ini, pemerintah meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek MP3EI merupakan sebuah langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>4</sup> Program ini diharapkan akan memberikan perbaikan pelayanan jalur transportasi dalam dan antar pulau sehingga dapat menghubungkan wilayah Indonesia dengan pasar internasional.

MP3EI akan dilakukan melalui pendekatan *breaktrugh* yang didasari oleh semangat "*Not Business As Ussual*". Pendekatan ini diarahkan kepada adanya perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Khusus bagi pihak swasta, akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sementara pemerintah akan bertindak sebagai regulator, fasilitator dan katalisator.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

Di dalam kerangka MP3EI, pelaksanaan pengembangan enam koridor ekonomi Indonesia akan dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Komitmen Pemerintah dalam mencapai program MP3EI ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk memperlancar kegiatan tersebut diperkirakan memerlukan investasi total sekitar Rp4.012 triliun. Dengan kebutuhan investasi yang sangat besar ini, tidak mungkin hanya mengandalkan dari kemampuan finansial pemerintah saja, namun juga diperlukan komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta untuk berpartisipasi. Kebutuhan partisipasi dari pihak swasta terkait proyek MP3EI diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun, sementara komitmen BUMN sebesar Rp839 triliun.<sup>6</sup>

Dalam kerangka MP3EI, pemerintah menawarkan 79 proyek infrastruktur senilai 53,4 miliar dolar AS, yang meliputi 13 proyek yang merupakan proyek yang siap ditawarkan senilai 27,52 miliar dolar, 21 proyek merupakan proyek prioritas dengan nilai 10,38 miliar dolar dan 45 proyek merupakan proyek

---

<sup>4</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. Hal 10.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal 10

<sup>6</sup> "2012, MP3EI Bangun 84 Proyek Dengan Investasi Rp. 536,3 triliun", <http://www.setkab.go.id/mp3ei-3884-2012-mp3ei-bangun-84-proyek-dengan-investasi-rp-5363-triliun.html>, diunduh tanggal 16 Mei 2012

potensial senilai 15,5 miliar dolar.<sup>7</sup> Dalam rangka mengundang partisipasi, khususnya pihak swasta, pemerintah telah meluncurkan program kerjasama investasi pemerintah-swasta yang dikenal dengan *public private partnership* (PPP). Namun pada pelaksanaannya program ini kurang dapat berjalan dengan maksimal. Mayoritas pembangunan proyek hanya ditangani oleh pemerintah dan BUMN. Pada *showcase* PPP tahap pertama, terdapat 5 proyek infrastruktur yang ditawarkan, namun yang dapat berjalan hanya proyek sistem penyediaan air minum umbulan, Jawa Timur senilai US\$ 200 juta dan proyek pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2x1.000 megawatt di Jawa Tengah senilai US\$ 3 miliar. Sementara itu proyek *terminal cruise* di Karangasem, Bali senilai US\$ 30 juta, kereta api Manggarai-Bandar Udara Soekarno Hatta, Banten senilai US\$ 735 juta, dan proyek Bandar Udara Kualanamu di Sumatera Utara senilai US\$ 475 juta, masih belum dapat berjalan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, sebanyak 94 proyek kegiatan utama dan infrastruktur senilai 490,5 triliun rupiah yang sudah *groundbreaking* di tahun 2011, masih belum bisa mendapat jaminan bahwa proyek tersebut akan berjalan sesuai rencana dan selesai sesuai dengan target, karena masih ada potensi terhenti di tengah jalan. Realisasi proyek MP3EI yang belum optimal ini disebabkan karena masalah pembebasan lahan, pembiayaan, dan hambatan birokrasi dan regulasi.<sup>9</sup>

### C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang fokus pembangunan kegiatan ekonomi dan kebutuhan investasi dalam kerangka MP3EI. Selain itu tulisan ini juga menganalisis tentang peluang dan tantangan masuknya aliran investasi asing dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan MP3EI. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anggota Dewan maupun pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait investasi asing untuk mendukung MP3EI.

### D. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan analisa terhadap data-data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Penggalan data sekunder dilakukan di sejumlah lembaga terkait yang memiliki perhatian dan kepentingan dengan isu tulisan yang diangkat seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, World Economic Forum, dan lain-lain.

<sup>7</sup> "Summary of PPP" <http://pkps.bappenas.go.id/index.php/proyek-infrastruktur/summary-of-PPP>, diunduh tanggal 13 Juni 2012

<sup>8</sup> "Tiga Proyek Showcase PPP Tahap Pertama Mandek" Indonesia Finance Today, 21 September 2011

<sup>9</sup> "Realisasi Proyek MP3EI Tak Optimal" Bisnis Indonesia, 28 Mei 2012

## E. Tinjauan Pustaka

MP3EI yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera dengan PDB sekitar USD 4,3 triliun dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-9 dunia. Pelaksanaan MP3EI akan melalui pengembangan 8 (delapan) program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategis masing-masing koridor. Strategi pelaksanaan MP3EI akan dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi di wilayah 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global; (3) memperluas kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.<sup>10</sup> Berikut adalah pemetaan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi utama dan masing-masing koridor:

Kegiatan Ekonomi Utama	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Papua-Kep. Maluku
Besi Baja	√		√			
Makanan Minuman		√				
Tekstil		√				
Peralatan Transportasi		√				
Perkapalan	√	√				
Nikel				√		√
Tembaga						√
Bauksit			√			
Kelapa Sawit	√		√			
Karet	√					
Pertanian Pangan				√		√
Pariwisata					√	
Telematika		√				
Batu Bara	√		√			
Migas			√	√		√
Jabodetabek Area		√				
KSN Selat Sunda	√					
Alutsista		√				

<sup>10</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Op. Cit.* Hal 10.

Peternakan					√	
Perkayuan			√			
Kakao				√		
Perikanan				√	√	√

Sumber: Dokumen MP3EI

Pembangunan enam koridor ekonomi akan dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Adapun tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- Koridor ekonomi Sumatera bertema sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”
- Koridor ekonomi Jawa bertema sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
- Koridor ekonomi Kalimantan bertema sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”
- Koridor ekonomi Sulawesi bertema sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”
- Koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara bertema sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
- Koridor ekonomi Papua – Kepulauan Maluku bertema sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

Selanjutnya dalam rangka pembiayaan proyek MP3EI, Indonesia membutuhkan peran serta dari swasta, khususnya investor asing. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk menarik investor asing berinvestasi dalam 22 kegiatan ekonomi utama yang tertuang dalam proyek MP3EI. Hal ini perlu dilakukan karena masih terbatasnya tabungan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan kebutuhan investasi, sehingga Indonesia harus berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi dalam upaya menumbuhkan perekonomian.

Investasi asing, salah satunya *foreign direct investment* (FDI) merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial, karena masuknya FDI akan diikuti dengan *transfer of technology*, keterampilan tehnik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, tehnik-tehnik produksi maju, pembaharuan produk, serta melatih tenaga kerja setempat pada keahlian-keahlian baru.<sup>12</sup>

Pengertian *FDI* adalah investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku dan persediaan dimana investor terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. *FDI* ini biasanya dimulai dengan pendirian *subsidiary* atau pembelian saham mayoritas suatu perusahaan. Didalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh *Multi National Corporation*

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 46-47

<sup>12</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004. Hal. 481

(MNC). MNC melakukan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber daya alam, inndustri jasa dan sebagainya.<sup>13</sup>

Bagi negara penerima, aliran modal asing akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sementara MNC menanamkan modalnya juga disertai dengan beberapa motif, antara lain: *Attract New Sources of Demand, Enter Market in which superior profits are possible, Fully Benefit from Economies of Scale; Use Foreign Factor of Production; Use Foreign Materials; Use Foreign Technology; Exploit Monopolistic Advantages; React to Exchange Rate Movement; React to Trade Restriction; dan Diversify internationally.*<sup>14</sup>

## II. PEMBAHASAN

Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Strategi pelaksanaan MP3EI akan dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yang dijabarkan dalam penyusunan rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang multiplier-nya meliputi seluruh wilayah tanah air.

### A. Koridor Ekonomi Sumatera

Secara geografis Sumatera diharapkan dapat menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia selatan, Asia timur, dan Australia. Koridor ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara. Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang terkonsentrasi di Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan terutama setelah adanya pembangunan jembatan selat sunda. Namun demikian ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam koridor ini, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan dalam koridor, baik antar perkotaan dan perdesaan maupun antar provinsi dalam koridor;
- b. Pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi yang sangat rendah serta cadangan yang semakin menipis;
- c. Investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Infrastruktur yang kurang memadai untuk pengembangan industri, antara lain jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak dan tua, pelabuhan laut

<sup>13</sup> Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. Cetakan kedua. Hal 92.

<sup>14</sup> Jeff Madura, *International Financial, Management*, South - Western College Publishing. 6<sup>th</sup> Edition.

<sup>15</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Op. Cit.* Hal. 52

yang kurang efisien serta kurangnya tenaga listrik untuk mendukung industri.

Pembangunan koridor ekonomi Sumatera teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama serta infrastruktur pendukung sebesar sekitar 714 triliun rupiah. Selain itu ada pula beberapa kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi utama tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti pariwisata, pertanian pangan, migas, perikanan, serta perikanan dengan jumlah investasi sebesar 100,2 triliun rupiah. Selanjutnya ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar kegiatan ekonomi utama sebesar 44 triliun rupiah. Inisiatif investasi dihimpun dari dana pemerintah, swasta dan BUMN, serta campuran dari ketiganya.<sup>16</sup>

## **B. Koridor Ekonomi Jawa**

Koridor ekonomi Jawa memiliki potensi untuk berkembang dalam rantai nilai dari ekonomi berbasis manufaktur ke jasa. Fokus pembangunan ekonomi koridor ini adalah pada kegiatan utama makanan-minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Selain itu juga terdapat aspirasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi utama perkapalan, telematika, dan alat utama sistem senjata (alutsista). Koridor ekonomi Jawa memiliki hal-hal yang harus dibenahi, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Tingginya tingkat kesenjangan PDRB dan kesenjangan kesejahteraan di antara provinsi di dalam koridor;
- b. Pertumbuhan tidak merata sepanjang rantai nilai, kemajuan sektor manufaktur tidak diikuti kemajuan sektor-sektor yang lain;
- c. Kurangnya investasi domestik maupun asing;
- d. Kurang memadainya infrastruktur dasar.

Dalam pembangunan koridor ekonomi Jawa teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama serta infrastruktur pendukung mencapai 1.290 triliun rupiah. Selain itu terdapat pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi utama tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti besi baja, tembaga, pariwisata yang difokuskan pada 10 destinasi pariwisata nasional, serta migas dengan jumlah investasi sebesar 168,58 triliun rupiah. Selanjutnya terdapat pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan sebesar 18,00 triliun rupiah.<sup>18</sup>

## **C. Koridor Ekonomi Kalimantan**

Pengembangan koridor ekonomi Kalimantan akan melalui kegiatan ekonomi utama energi dan mineral. Pada koridor ini teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi, batubara, kelapa sawit, besi baja, bauksit, perikanan, serta infrastruktur pendukung sebesar 945 triliun rupiah.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 70-71

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 75

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 92-93

Sementara itu, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi utama tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti tembaga, karet, pertanian pangan, perikanan, dan peternakan dengan investasi sebesar 20,5 triliun rupiah. Selanjutnya ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama sebesar 72 triliun rupiah.<sup>19</sup>

Kegiatan ekonomi utama dalam koridor ini akan berpusat pada empat pusat ekonomi yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Untuk itu, ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terkait pengembangan perekonomian koridor ini, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Adanya tren menurun pada total nilai produksi sektor migas dari tahun ke tahun, sehingga perlu pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya guna mengimbangi penurunan kinerja sektor migas, sehingga perekonomian Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya;
- b. Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik antara wilayah penghasil migas dengan non-penghasil migas, maupun antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
- c. Terdapat kesenjangan antara infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, kelistrikan, akses air bersih, dan lain-lain; dan non-fisik (sosial) seperti pendidikan dan layanan kesehatan;
- d. Realisasi investasi pembangunan di koridor ekonomi Kalimantan yang sejauh ini masih tergolong rendah.

#### **D. Koridor Ekonomi Sulawesi**

Pembangunan koridor ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan, kakao, perikanan, dan nikel. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus dibenahi dalam koridor ini antara lain:<sup>21</sup>

- a. Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;
- b. Kegiatan ekonomi utama pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30 persen), tumbuh dengan lambat;
- c. Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain;
- d. Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang tersedia dan belum memadai.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 114-115

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 97

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 121

Pada koridor ekonomi Sulawesi teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur pendukungnya mencapai 309 triliun rupiah, dengan mayoritas investasi pada pertambangan nikel. Selanjutnya terdapat beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi utama tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi seperti tembaga, besi baja, makanan-minuman, kelapa sawit, karet, tekstil, perikanan dan pariwisata dengan jumlah investasi sebesar 30,5 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan seperti emas dan petrokimia sebesar 15 triliun rupiah.<sup>22</sup>

#### **E. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara**

Pembangunan koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara difokuskan pada 3 (tiga) kegiatan ekonomi utama, yaitu: pariwisata, perikanan, dan peternakan. Namun demikian ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain populasi penduduk yang tidak merata, tingkat investasi yang rendah, serta ketersediaan infrastruktur dasar yang masih sangat terbatas.<sup>23</sup>

Pada koridor ini teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur pendukung sebesar 133 triliun rupiah. Selanjutnya ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi utama pada koridor ini, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama yaitu tembaga dan migas dengan jumlah investasi sebesar 34,9 triliun rupiah. Selain itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama dalam MP3EI seperti emas dan sektor lainnya sebesar 42 triliun rupiah.<sup>24</sup>

#### **F. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku**

Koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara umum, koridor ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Laju pertumbuhan PDRB relatif kecil dibanding dengan koridor lainnya;
- b. Disparitas PDRB yang besar terjadi di antara kabupaten;
- c. Tingginya risiko berusaha dan rendahnya kepastian usaha;
- d. Produktivitas sektor pertanian belum optimal, salah satunya karena keterbatasan sarana pengairan;
- e. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi;
- f. Jumlah penduduk yang rendah dengan mobilitas yang tinggi.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 136

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 141

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 152-153

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 157-158

Pada koridor ekonomi Papua–Kepulauan Maluku teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi utama migas, nikel, perikanan, pertanian pangan, tembaga serta infrastruktur pendukung sebesar 622 triliun rupiah. Selain itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan dalam MP3EI seperti emas sebesar 18,80 triliun rupiah.<sup>26</sup>

## G. Peluang Investasi

Keberhasilan proyek MP3EI tidak akan terlepas dari peran investor swasta, khususnya investor asing, sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pada saat ini ada beberapa kondisi yang dapat dimanfaatkan dalam menarik minat investor asing untuk ikut terlibat pada 22 kegiatan ekonomi utama proyek MP3EI. Beberapa faktor yang mendukung iklim investasi, khususnya asing, di Indonesia adalah:

### 1. Stabilitas Makro Ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing ke suatu negara adalah terjaganya stabilitas makro ekonomi suatu negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shakrani Saharudin Mohd, Zainol Zairy, Sahlan Rizaudin (2002) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan FDI, artinya semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan semakin baik (tinggi) pula aliran FDI ke negara tersebut.<sup>27</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Sarwedi (2002) juga mengatakan bahwa Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat memberikan dampak yang positif terhadap masuknya aliran FDI ke Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan kondisi ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2008, saat krisis keuangan global terjadi, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang tetap memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2006 hingga 2010, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,7 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sebesar 6,1 persen (y-o-y) melebihi pertumbuhan rata-rata dunia yang hanya 5,1 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Amerika yang hanya sebesar 2,85 persen dan Eropa yang hanya sebesar 1,7 persen.<sup>29</sup> Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh positif dan stabil ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menarik minat bagi investor untuk berpartisipasi dalam program MP3EI.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 172

<sup>27</sup> Shakrani Saharudin Mohd, Zainol Zairy, Sahlan Rizaudin, "Hipotesis Pertumbuhan Pacuan FDI: Uji Sebab – Akibat (Causality) di Malaysia". 2000

<sup>28</sup> Sarwedi, "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya". Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4 No.1. 2002

<sup>29</sup> Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

## 2. Predikat *Investment Grade* dari Lembaga Pemeringkat Internasional

Pada bulan Januari tahun 2012, Indonesia telah memperoleh predikat sebagai negara layak tujuan investasi (*investment grade*) oleh lembaga pemeringkat Moody's. Sebelumnya, pada bulan Desember tahun 2011, Indonesia juga telah memperoleh peningkatan peringkat hutang sehingga memperoleh predikat *Investment Grade* dari lembaga pemeringkat *Fitch Rating*.<sup>30</sup> Selanjutnya, walaupun lembaga pemeringkat S&P belum memberikan predikat *investment grade* akibat adanya penundaan kenaikan tarif listrik dan ketidakmampuan Indonesia untuk menerapkan pemotongan anggaran subsidi bahan bakar, dan ketidakpastian kebijakan dalam bidang industri dan perdagangan, namun diperkirakan Indonesia berpeluang untuk meraih predikan *investment grade* dari lembaga ini di tahun depan.<sup>31</sup>

Dengan predikat *investment grade* yang diberikan oleh dua lembaga pemeringkat ini, diprediksikan bahwa akan ada peningkatan investasi sebesar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>32</sup> Pada April 2012, aliran dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai 12 triliun rupiah semenjak ditetapkannya Indonesia dalam *investment grade*.<sup>33</sup> Kondisi ini merupakan suatu kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan predikat tersebut dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program MP3EI. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk mengoptimalkan aliran investasi ke sektor pembangunan infrastruktur.

## 3. Krisis Eropa dan Stagnasi Ekonomi Amerika

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Eropa dan pertumbuhan ekonomi Amerika yang stagnan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan investasi ke Indonesia. Kondisi yang melanda Eropa dan Amerika ini membuat kecenderungan investasi beralih ke kawasan Asia dan ASEAN, salah satunya Indonesia. Hal ini terlihat dari aliran FDI yang masuk ke kawasan Eropa dan Amerika selama kurun waktu tahun 2008 sampai 2010 yang terus menurun, sebaliknya untuk kawasan Asia meningkat. Selain itu, Asia, khususnya ASEAN memiliki tiga kelebihan untuk menarik investasi yaitu potensi ekonomi, stabilitas politik, dan kerukunan budaya. Adanya potensi ekonomi ini terbukti

<sup>30</sup> "Sidang Kabinet, SBY Bahas 'Investment Grade' Versi Moody's" <http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/sidang-kabinet-sby-bahas-investment-grade-versi-moodys/16184>, diunduh tgl 5 Juni 2012

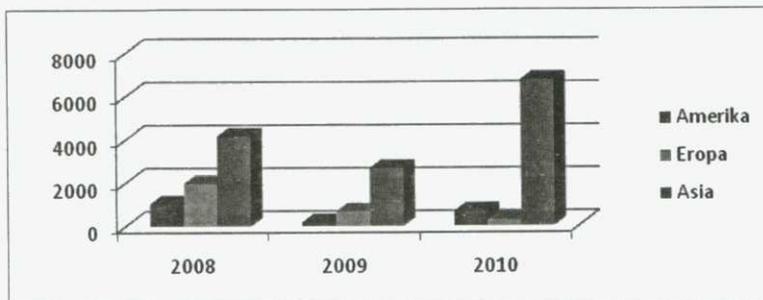
<sup>31</sup> "Kepastian Kebijakan Energi Nasional, Faktor Penting Meraih Investment Grade S&P" <http://financeroll.co.id/news/35056/kepastian-kebijakan-energi-nasional-faktor-penting-meraih-investment-grade-sp>, diunduh tanggal 5 Juni 2012

<sup>32</sup> "Pasca Investment Grade, Utang Indonesia Berkurang", [http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=44124&Itemid=152](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44124&Itemid=152), diunduh tgl 5 Juni 2012

<sup>33</sup> "Peringkat S&P Tak Pengaruhi Aliran Modal Asing di Pasar Modal", <http://www.infobanknews.com/2012/04/peringkat-sp-tak-pengaruhi-aliran-modal-asing-di-pasar-modal/>, diunduh tanggal 5 Juni 2012

dengan kerjasama ekonomi ASEAN yang terjalin dengan China dan Jepang.<sup>34</sup> Kecenderungan investasi yang mengalir ke Asia ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk menarik investor lebih banyak dalam rangka untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pada setiap koridor ekonomi dan kegiatan ekonomi utama program MP3EI.

**Gambar. 1. Aliran FDI ke Amerika, Eropa, dan Asia Tahun 2008 – 2010**  
(Dalam Juta USD)



Sumber: Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## H. Tantangan Investasi

MP3EI diharapkan dapat memberikan akselerasi transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan mengurangi minat investor untuk turut terlibat dalam proyek MP3EI ini. Beberapa faktor yang menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor infrastruktur, di Indonesia adalah:<sup>35</sup>

### 1. Peraturan yang Tumpang Tindih

Adanya ketidakjelasan perangkat hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program MP3EI. Pada saat ini terdapat potensi persinggungan berbagai peraturan perundang-undangan seperti kewenangan otonomi daerah, tata ruang daerah, agraria menyangkut pelepasan maupun pencabutan hak atas tanah, masalah kehutanan dan penerapan ramah lingkungan. Akibat dari peraturan yang tumpang tindih tersebut sudah lebih dari 50 persen kepala daerah di Indonesia yang terkena implikasi hukum akibat dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, padahal langkah-langkah kebijakan tersebut umumnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> "KRISIS EROPA: Asia jadi tujuan investasi", <http://en.bisnis.com/articles/krisis-eropa-asia-jadi-tujuan-investasi>, diunduh tanggal 2 Juli 2012

<sup>35</sup> "LIPI Kritik Pemerintah Tak Serious Ajak Swasta Garap Infrastruktur" <http://finance.detik.com/read/2012/01/19/115311/1819737/4/lipi-kritik-pemerintah-tak-serious-ajak-swasta-garap-infrastruktur?f9911023>, diunduh tgl 19 Januari 2012

<sup>36</sup> "Program MP3EI bisa gagal", [http://waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=249530:program-mp3ei-bisa-gagal&catid=77:fokusutama&Itemid=131](http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=249530:program-mp3ei-bisa-gagal&catid=77:fokusutama&Itemid=131), diunduh tanggal 1 Juli 2012

## **2. Tidak Ada Jaminan Penggantian Biaya Investasi Bila Proyek Menghadapi Kendala**

Pelaksanaan proyek dalam kerangka MP3EI, khususnya di bidang infrastruktur saat ini masih memiliki tingkat ketidakpastian dan resiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan program PPP belum dilengkapi dengan jaminan penggantian investasi dari pemerintah bila proyek infrastruktur tersendat ditengah jalan karena masalah pengadaan lahan ataupun munculnya konflik dengan masyarakat di sekitar proyek. Dengan kondisi seperti ini akan berpotensi untuk menghambat minat investor untuk berpartisipasi dalam proyek MP3EI khususnya proyek infrastruktur.

## **3. Proyek Infrastruktur yang Ditawarkan Tidak Dipersiapkan Secara Matang**

Potensi kendala yang mungkin muncul menghambat masuknya investasi khususnya pembangunan infrastruktur adalah karena proyek yang ditawarkan tidak dipersiapkan secara matang. Dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh penanggung jawab kerja sama (PJPK) masih dinilai lebih teknis dan belum memasukkan isu-isu yang terkait dengan masalah hukum, ekonomi dan keuangan, resiko, kebutuhan dan dukungan yang akan diberikan pemerintah, serta masalah yang mungkin muncul jika swasta terlibat dalam proyek PPP. Hal ini terjadi karena PJPK di Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD belum memiliki pengalaman bagaimana mempersiapkan proyek yang akan ditawarkan kepada pihak swasta akibat dari PJPK yang lebih terbiasa mempersiapkan proyek-proyek yang didanai oleh APBN/APBD.<sup>37</sup>

## **4. Komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Masih Rendah**

Selanjutnya yang menjadi kendala adalah terdapat beberapa kerjasama pemerintah dan swasta yang terhenti ditengah jalan karena PJPK mengalihkan pembiayaan dari skema PPP menjadi skema APBN. Hal ini dikarenakan PJPK lebih menyukai penggunaan APBN dari pada menawarkan kepada swasta dengan argumentasi pembiayaan oleh swasta memiliki beban bunga yang harus ditanggung, padahal kemampuan finansial pemerintah terbatas sementara sektor swasta memiliki kemampuan membangun infrastruktur secara efektif dan efisien.<sup>38</sup> Dengan demikian sektor swasta akan menilai komitmen PJPK yang masih rendah sehingga mengurangi minat investor untuk masuk dalam proyek.

## **5. Proses Pembebasan Lahan yang Rumit**

Masalah klasik dari tersendatnya berbagai proyek yang ditangani dalam kerangka MP3EI adalah masalah rumitnya pembebasan lahan. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang diharapkan menjadi salah satu

<sup>37</sup> "Kerja Sama Kaya Problem", Seputar Indonesia, 15 Desember 2011

<sup>38</sup> *Ibid.*

solusi pembebasan lahan, juga mendapat tantangan dari beberapa pihak dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai contoh adanya kerancuan pada definisi kepentingan umum, dan memasukkan kepentingan swasta menjadi kepentingan umum.<sup>39</sup> Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor sehingga berpotensi untuk menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia, pemerintah meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pelaksanaan MP3EI akan melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategis masing-masing koridor. Untuk memperlancar kegiatan tersebut diperkirakan memerlukan investasi total sekitar Rp4.012 triliun. Dengan kebutuhan investasi yang sangat besar ini, tidak memungkinkan hanya mengandalkan dari kemampuan finansial pemerintah saja, namun juga diperlukan komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta untuk berpartisipasi. Partisipasi dari pihak swasta terkait proyek MP3EI diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun, sementara komitmen BUMN sebesar Rp839 triliun. Untuk itu perlu diciptakan suatu iklim investasi yang baik sehingga dapat merangsang masuknya aliran dana ke Indonesia.

Pada saat ini ada beberapa kondisi yang dapat dimanfaatkan dalam menarik minat investor asing untuk ikut terlibat pada 22 kegiatan ekonomi utama proyek MP3EI. Beberapa faktor yang mendukung iklim investasi, khususnya asing, di Indonesia adalah Stabilitas Makro Ekonomi, Predikat Investment Grade dari Lembaga Pemeringkat Internasional, Kecenderungan beralihnya investasi ke kawasan Asia akibat krisis Eropa dan stagnasi ekonomi Amerika. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan mengurangi minat investor untuk turut terlibat dalam proyek MP3EI ini. Beberapa faktor yang menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor infrastruktur, di Indonesia adalah peraturan yang tumpang tindih,

<sup>39</sup> "UU Pengadaan Tanah Dinilai Tak Berpihak Masyarakat", <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/11/063409895/UU-Pengadaan-Tanah-Dinilai-Tak-Berpihak-Masyarakat>, diunduh tanggal 1 Juli 2012

tidak ada jaminan penggantian biaya investasi bila proyek menghadapi kendala, proyek infrastruktur tidak dipersiapkan secara matang, komitmen penanggung jawab proyek yang masih rendah, serta proses pembebasan lahan yang rumit.

## **B. Saran**

Dalam rangka memperlancar terlaksananya program MP3EI diperlukan suatu upaya dalam hal pelonggaran aturan (*debottlenecking*) yang memiliki fungsi fasilitatif bagi dunia usaha dan investasi, pembangunan birokrasi untuk terlaksananya visi dan misi konektivitas nasional, penataan menyeluruh antara pusat dan daerah akibat perberlakuan UU atau regulasi bermuatan sentralisasi, penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan MP3EI, menegakkan secara konsisten perundang-undangan yang mempunyai fungsi memperlancar pelaksanaan MP3EI, dan membentuk tim kerja MP3EI di tingkat provinsi, kabupaten dan kota terutama yang secara langsung terkait pada enam koridor ekonomi MP3EI. Dalam hal permasalahan lahan, perlu adanya suatu aturan turunan atau peraturan presiden yang mengatur tentang pengadaan lahan agar dapat memecahkan permasalahan pembebasan lahan yang sangat rumit saat ini sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Hamdy Hady. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*. Cetakan kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Jeff Madura. *International Financial, Management*. 6th Edition. South – Western College Publishing.

M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

### **Dokumen Resmi:**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia". Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

**Jurnal:**

Sarwedi, "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya". Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4 No.1. 2002

Shakrani Saharudin Mohd, Zainol Zairy, Sahlan Rizaudin, "Hypothesis Pertumbuhan Pacuan FDI: Uji Sebab – Akibat (Causality) di Malaysia". 2000

**Internet:**

Achmad Aris. "KRISIS EROPA: Asia jadi tujuan investasi." 13 Juni 2012. (<http://en.bisnis.com/articles/krisis-eropa-asia-jadi-tujuan-investasi>, diakses 2 Juli 2012)

Anonim. "Indonesia Policy Briefs: Memulihkan Daya Saing." (<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/competitiveness.pdf>, diakses 26 Mei 2012)

Desk Informasi, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia "2012, MP3EI Bangun 84 Proyek Dengan Investasi Rp. 536,3 triliun." 20 Maret 2012 "<http://www.setkab.go.id/mp3ei-3884-2012-mp3ei-bangun-84-proyek-dengan-investasi-rp-5363-triliun.html> diakses 16 Mei 2012)

Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Summary of PPP" <http://pkps.bappenas.go.id/index.php/proyek-infrastruktur/summary-of-PPP>, diakses 13 Juni 2012)

Dwitya Putra. "Peringkat S&P Tak Pengaruhi Aliran Modal Asing di Pasar Modal." 24 April 2012. (<http://www.infobanknews.com/2012/04/peringkat-sp-tak-pengaruhi-aliran-modal-asing-di-pasar-modal/>, diakses 5 Juni 2012)

Istman MP. "UU Pengadaan Tanah Dinilai Tak Berpihak Masyarakat." 11 Juni 2012. (<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/11/063409895/uu-pengadaan-tanah-dinilai-tak-berpihak-masyarakat>, diunduh tanggal 1 Juli 2012)

Narita Indrastiti. "Pasca Investment Grade, Utang Indonesia Berkurang." 14 Januari 2012. (<http://nasional.kontan.co.id/news/pasca-investment-grade-utang-indonesia-berkurang>, diakses 5 Juni 2012)

Rista Rama Dhany. "LIPI Kritik Pemerintah Takk Serius Ajak Swasta Garap Infrastruktur." 19 Januari 2012. (<http://finance.detik.com/read/2012/01/19/115311/1819737/4/lipi-kritik-pemerintah-takk-serius-ajak-swasta-garap-infrastruktur?f9911023>, diakses 5 Juni 2012)

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), <http://www.bi.go.id>

Sugeng Riyadi. "Kepastian Kebijakan Energi Nasional, Faktor Penting Meraih Investment Grade S&P." 14 Mei 2012 (<http://financeroll.co.id/news/35056/kepastian-kebijakan-energi-nasional-faktor-penting-meraih-investment-grade-sp>, diakses 5 Juni 2012)

Tim Redaksi. "Sidang Kabinet, SBY Bahas 'Investment Grade' Versi Moody's." 18 Januari 2012. (<http://www.suarapembaruan.com/ekonomi-dan-bisnis/sidang-kabinet-sby-bahas-investment-grade-versi-moodys/16184>, diakses 5 Juni 2012)

Warta. "Program MP3EI bisa gagal." 8 Juni 2012. ([http://waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=249530:program-mp3ei-bisa-gagal&catid=77:fokusutama&Itemid=131](http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=249530:program-mp3ei-bisa-gagal&catid=77:fokusutama&Itemid=131), diakses 1 Juli 2012)

World Economic Forum. "Global Competitiveness Report 2011-2012." ([www.worldeconomicforum.org](http://www.worldeconomicforum.org), diakses 12 September 2011)

#### **Surat Kabar:**

"Kerja Sama Kaya Problem", *Seputar Indonesia*, 15 Desember 2011

"Realisasi Proyek MP3EI Tak Optimal" *Bisnis Indonesia*, 28 Mei 2012

"Tiga Proyek Showcase PPP Tahap Pertama Mandek" *Indonesia Finance Today*, 21 September 2011

BAGIAN 9

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN  
KUALITAS INFRASTRUKTUR  
DALAM PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL**

*oleh: T. Ade Surya\**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dalam percaturan ekonomi global. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang melimpah sumber daya alamnya, kaya akan keanekaragaman hayati, jumlah manusia produktif yang cukup banyak dimana Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, memiliki keberagaman budaya, serta letaknya yang sangat strategis yang berada pada salah satu jalur tersibuk mobilitas perdagangan dunia.

Namun, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi global bukanlah perkara mudah, karena segala sumber daya yang mendukung tersebut haruslah dikelola dengan benar, terintegrasi, dan terarah. Belum lagi tantangan yang akan dihadapi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Berdasarkan pengalaman selama ini, perubahan tatanan ekonomi global terjadi sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipatif. Berdasar fakta tersebut, pemerintah telah menyusun *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* yang dimaksudkan sebagai arahan untuk mempercepat berbagai program pembangunan, khususnya yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas cakupan pembangunan ekonomi sehingga dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. MP3EI juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional sehingga Indonesia tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global jika terjadi krisis.

Pengembangan MP3EI ini dilakukan dengan pendekatan *breakthrough* yang didasari oleh semangat "*Not Business As Usual*", melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.<sup>1</sup>

Pelaksanaan MP3EI difokuskan pada pengembangan delapan program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*", Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Hal. 10.

telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Ke-delapan program utama ini terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Adapun strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu: 1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia; 2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); 3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Penetapan salah satu elemen utama dalam pelaksanaan MP3EI yaitu memperkuat konektivitas yang terintegrasi dikarenakan suksesnya pelaksanaan MP3EI tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Elemen ini begitu penting untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia sehingga disparitas ekonomi antar wilayah yang begitu mencolok dapat dihilangkan. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting sebagai faktor utama untuk mendorong terciptanya konektivitas antar wilayah tersebut.

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan infrastruktur di tanah air masih belum merata ke semua daerah dan kualitasnya pun masih sangat buruk. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* dalam *The Global Competitiveness Report 2012-2013*<sup>2</sup>, kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan hanya menempati peringkat 92 dari 144 negara. Dan jika dilihat dari kualitas infrastruktur per sektornya seperti jalan, jalur kereta api, pelabuhan, maupun bandara, juga tidak ada satu pun yang memiliki kualitas yang cukup baik. Tentunya hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah agar ketersediaan dan kualitas infrastruktur nasional dapat diperbaiki atau ditingkatkan, sehingga mampu menunjang penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

## B. Perumusan Masalah

Pentingnya upaya untuk memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi terbentur oleh kendala terbatasnya infrastruktur yang dimiliki, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun kondisi ekonomi makro saat ini sangat baik, namun kedepannya akan sulit untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi jika kondisi infrastruktur kita masih tetap seperti sekarang ini. Idealnya, perkembangan ekonomi makro harus sejalan dengan perkembangan infrastruktur, karena kedua faktor ini saling menstimulasi satu sama lain.

Menyadari hal tersebut, pemerintah memfokuskan salah satu prioritas pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional melalui pembangunan dan perbaikan jaringan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan tujuan dari

<sup>2</sup> World Economic Forum, "*The Global Competitiveness Report 2012-2013*", (Geneva: World Economic Forum, 2012), p. 13.

MP3EI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang termasuk ke dalam sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025 dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengkaji kebijakan dalam pembangunan dan perbaikan kualitas jaringan infrastruktur dalam upaya penguatan konektivitas nasional.

### C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan yang tepat dan diperlukan dalam membangun dan memperbaiki jaringan infrastruktur nasional. Diharapkan kedepannya, dengan kebijakan yang tepat, jaringan infrastruktur yang terbangun benar-benar jaringan yang terintegrasi dengan kualitas yang baik, sehingga penguatan konektivitas dan percepatan serta pemerataan pembangunan dapat terwujud.

### D. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis terhadap data-data sekunder dan publikasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan dokumen yang berasal dari lembaga terkait, serta sumber-sumber data lainnya seperti jurnal, buku, dan internet.

### E. Tinjauan Pustaka

Infrastruktur memang merupakan salah satu masalah substansial yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dapat bergerak lebih cepat. Ketersediaan infrastruktur masih sangat terbatas dan kualitasnya pun masih jauh dari yang diharapkan. Pentingnya keberadaan infrastruktur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dikarenakan infrastruktur dapat meningkatkan laju investasi, meningkatkan arus mobilitas barang dan jasa, menghubungkan pusat-pusat ekonomi, serta dapat pemeratakan kesejahteraan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan.

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah atau negara. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan, semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, dapat dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat.<sup>3</sup>

Kodoatie (2003) menyatakan bahwa Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-

<sup>3</sup> Faisal Basri dan Haris Munandar, *"Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia"*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), Hal. 129.

hari masyarakat, maka infrastruktur secara lebih jelas merupakan fasilitas-fasilitas dan struktur-struktur fisik yang dibangun guna berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi menunjuk pada suatu keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dimana infrastruktur fisik mewadahi interaksi antara aktivitas manusia dengan lingkungannya.<sup>4</sup>

Untuk dapat mempercepat perluasan dan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang memadai dan terencana sangatlah diperlukan. Hal ini tentunya akan berdampak pada penguatan konektivitas antar wilayah. Penguatan konektivitas yang optimal dapat menurunkan disparitas harga dan pelayanan, mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi ekonomi biaya tinggi untuk meningkatkan daya saing.

Terdapat tiga prinsip konsep konektivitas, pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan; kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui intermoda *supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.<sup>5</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

Prioritas utama yang harus dilakukan dalam penguatan konektivitas nasional adalah dengan membangun dan memperbaiki jaringan infrastruktur. Wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan jaringan infrastruktur sangat penting untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu pulau ke pulau lainnya, agar dapat mempermudah arus barang dan sumber daya manusia untuk menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Selama ini, keterhubungan antar wilayah atau pulau masih belum kuat dan belum terintegrasi, terlihat dari kesenjangan ekonomi yang terjadi terutama untuk kawasan timur Indonesia.

Buruknya infrastruktur nasional disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam membangun dan mengelola infrastruktur. Selama ini pemerintah hanya disibukkan

<sup>4</sup> Robert J. Kodoatie, "Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>5</sup> Bappenas, "Tiga Prinsip Penguatan Konektivitas Nasional", (<http://www.bappenas.go.id/node/116/3364/tiga-prinsip-penguatan-konektivitas-nasional--/>, diakses 30 September 2012).

untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik, pemerintah baru menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur yang ada saat ini masih sangat kurang, itupun dengan kualitas yang masih buruk. Padahal infrastruktur sangat penting fungsinya untuk dapat lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi stagnasi.

Hal utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk membenahi infrastruktur nasional dalam rangka penguatan konektivitas adalah dengan membangun jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan, serta bandara. Jaringan infrastruktur transportasi ini harus dapat menggapai simpul-simpul transportasi tersebut karena simpul-simpul ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan, serta tempat pemindahan intramoda dan antarmoda, dimana semua itu merupakan bagian dari aktivitas kegiatan ekonomi.

Selain infrastruktur jaringan transportasinya, infrastruktur dari simpul-simpul transportasi tersebut juga harus dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Simpul-simpul tersebut harus dibangun mencakup ke semua wilayah sehingga aktivitas ekonomi tidak terpusat untuk satu atau sebagian wilayah saja. Oleh karena itu, pembangunan jaringan infrastruktur transportasi dan simpul-simpul transportasi harus direncanakan secara matang dan terskema dengan rapi, agar penguatan konektivitas yang dimaksudkan dalam MP3EI dapat tercapai.

Bentuk dari jaringan infrastruktur yang sangat diutamakan untuk dibangun dan diperbaiki kualitasnya adalah jaringan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh pusat kegiatan, baik kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanan dihubungkan oleh jaringan jalan. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Kondisi dan perkembangan infrastruktur jalan saat ini belum bisa dikatakan baik. Walaupun penambahan panjang jalan nasional mengalami peningkatan secara signifikan dalam satu dekade terakhir, tetapi jika dilihat perbandingan antara ketersediaan jalan dengan luas wilayah Indonesia masih sangat kurang dan tidak merata. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pembangunan jalan lebih banyak dilakukan pada wilayah Indonesia Barat yang memang aktivitas kegiatan ekonominya lebih banyak, sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur, ketersediaan jalan masih sangat kurang dan terbatas. Oleh karena itu, dalam rangka pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas, infrastruktur jalan juga harus dibangun di wilayah Indonesia Timur dan wilayah-wilayah lainnya yang masih kekurangan

---

<sup>6</sup> Departemen Pekerjaan Umum, "Buku Pintar", (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2009), Hal. 72.

infrastruktur jalan, sehingga diharapkan aktivitas kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dapat terstimulasi dan berkembang.

**Tabel 1.** Sebaran Panjang Jalan di Indonesia menurut Pulau, Tahun 2009.

No.	Pulau	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jalan Tol (km)	Jalan Nasional (km)	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)
1.	Sumatera	446.732	43	10.589	16.398	99.739
2.	Jawa	129.306	628	5.119	9.072	70.838
3.	Bali	5.449	0	502	883	5.576
4.	Nusa Tenggara	65.847	0	1.875	4.703	18.031
5.	Kalimantan	507.412	0	5.706	5.545	31.376
6.	Sulawesi	193.847	18	7.092	7.428	41.404
7.	Maluku - Papua	503.371	0	3.747	4.652	21.221
Total		1.851.964	688	34.629	48.681	288.185

Sumber: Max Antameng, 2011<sup>7</sup>.

Permasalahan yang paling sering ditemui dalam membangun jaringan infrastruktur transportasi terutama infrastruktur jalan adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan dan membangun daerahnya sendiri. Namun seringkali, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pembangunan jaringan infrastruktur transportasi tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan untuk membangun jaringan infrastruktur transportasi di daerahnya, sebaiknya selalu berkoordinasi dahulu dengan pemerintah pusat agar perencanaan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi daerah sejalan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membangun jaringan infrastruktur nasional.

## B. Penguatan Konektivitas Intra dan Antar Koridor Ekonomi

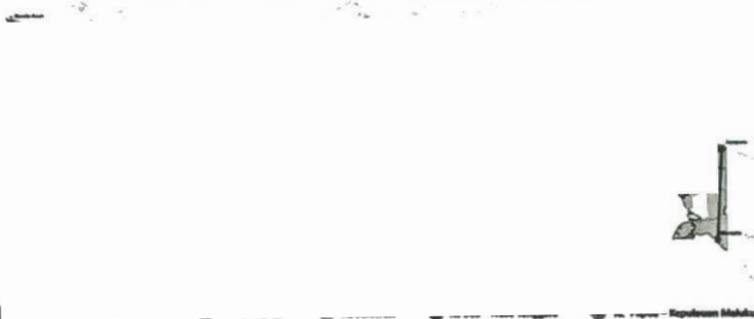
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Antameng, M., "Isu Penyelenggaraan Jalan di Indonesia", dipresentasikan pada pertemuan dengan tim pendampingan RUU tentang Jalan, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 Mei 2011.

<sup>8</sup> Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, *Op.Cit.*, hal. 31

Dalam MP3EI, pemerintah telah membagi atau membentuk koridor ekonomi Indonesia berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah ke dalam enam koridor ekonomi, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Koridor-koridor ekonomi tersebut adalah koridor ekonomi Sumatera yang berbasis “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”, koridor ekonomi Jawa yang berbasis “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”, koridor ekonomi Kalimantan yang berbasis “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan lumbung Energi Nasional”, koridor ekonomi Sulawesi yang berbasis “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”, koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara yang berbasis “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”, dan koridor ekonomi Papua – Kepulauan Maluku yang berbasis “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Pada setiap koridor-koridor ekonomi tersebut akan dikembangkan konektivitas atau keterhubungan intra wilayah dan antar wilayah dengan tujuan menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama yang ada di dalam setiap koridor dan antar koridor.

**Gambar 1.** Peta Koridor Ekonomi Indonesia



Sumber: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, 2011.

Penguatan konektivitas nasional agar tercapainya konektivitas intra koridor ekonomi dilakukan dengan meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas dalam koridor. Di samping itu juga melalui pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian penumpang/barang dan meningkatkan jalan akses lokal antara pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya. Juga dengan meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis, dan pembangunan jaringan *extension backbone* hingga pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama. Adapun untuk menguatkan konektivitas antar koridor ekonomi dilakukan dengan memperlancar arus pengiriman barang/jasa secara efisien dan efektif. Dilakukan juga dengan menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi. Pengembangan interkoneksi, di antara pelabuhan utama (pusat koleksi dan distribusi) dengan pelabuhan lokal

dan pelabuhan hubungan internasional, serta penguatan infrastruktur *backbone* serat optik.<sup>9</sup>

Penguatan konektivitas antar wilayah tidak hanya dilakukan dengan mengembangkan konektivitas intra dan antar koridor ekonomi saja, tetapi juga harus mencakup pembuatan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi. Selain itu, juga harus dilakukan pengidentifikasian terhadap simpul-simpul transportasi dan pusat distribusi untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang. Dan terakhir, penguatan konektivitas dilakukan dengan meningkatkan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu pilar utama yang harus dilakukan agar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat segera terwujud. Hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk menguatkan konektivitas nasional adalah dengan membangun dan memperbaiki kualitas jaringan infrastruktur, serta membangun dan memperbaiki kualitas dari infrastruktur simpul-simpul transportasi yang mencakup keseluruhan wilayah.

Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang harus segera dibenahi karena kondisi dan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia saat ini masih belum baik. Ketersediaan infrastruktur jalan masih kurang dan tidak merata, serta tidak sebanding dengan keseluruhan luas wilayah Indonesia. Padahal fungsi infrastruktur jalan untuk dapat meningkatkan penguatan konektivitas nasional adalah sangat penting.

Penguatan konektivitas nasional harus dilakukan dengan menciptakan keterhubungan intra wilayah dan antar wilayah dengan tujuan menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama yang ada di dalam setiap koridor dan antar koridor ekonomi. Sehingga diharapkan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan dapat segera diwujudkan.

---

<sup>9</sup> "Konektivitas Nasional untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi", (<http://www.gatra.com/ekonomi/46-ekonomi/5184-konektivitas-nasional-untuk-percepatan-pembangunan-ekonomi>, diakses 12 Agustus 2011).

## **B. Saran**

Pemerintah daerah harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam membangun dan memperbaiki jaringan infrastruktur dan infrastruktur dari simpul-simpul transportasi di wilayahnya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas nasional dapat terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Pemerintah harus dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam membangun dan memperbaiki jaringan infrastruktur nasional karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Diharapkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar sesuai rancangan MP3EI sehingga penguatan konektivitas nasional dapat segera terwujud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Basri, F. dan Haris Munandar, *"Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia"*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009.

Departemen Pekerjaan Umum, *"Buku Pintar"*, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2009.

Kodoatie, Robert J. *"Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

World Economic Forum, *"The Global Competitiveness Report 2012-2013"*, Geneva: World Economic Forum, 2012.

### **Artikel dalam Seminar/Pertemuan:**

Antameng, M., "Isu Penyelenggaraan Jalan di Indonesia", dipresentasikan pada pertemuan dengan tim pendampingan RUU tentang Jalan, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 Mei 2011.

### **Dokumen Resmi:**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *"Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia"*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

**Internet:**

Bappenas, "Tiga Prinsip Penguatan Konektivitas Nasional", (<http://www.bappenas.go.id/node/116/3364/tiga-prinsip-penguatan-konektivitas-nasional--/>, diakses 30 September 2012).

"Konektivitas Nasional untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi", (<http://www.gatra.com/ekonomi/46-ekonomi/5184-konektivitas-nasional-untuk-percepatan-pembangunan-ekonomi>, diakses 12 Agustus 2012).

## BIOGRAFI PENULIS

**Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.Si.**, Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Pendidikan S1 Fisika diselesaikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada tahun 1997, dan Pendidikan S2 Keuangan Pusat dan Daerah diselesaikan di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2008 sebagai Tenaga Ahli pada Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Sejak 2009 memulai karir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi Terapan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping dalam pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI Tahun 2010-2014, Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2011, Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI, Pedoman Umum Pengelolaan Kehumasan DPR RI, Pedoman Umum Peliputan Media Massa pada Kegiatan DPR RI, Pembentukan Badan Fungsional Keahlian, Tata Tertib Penghunian dan Pengelolaan RJA, Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kerumahtanggaan, Pedoman Pengawasan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran DPR RI dan pendalaman Anggaran DPR RI berdasarkan Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Pagu Definitif dan DIPA serta realisasi anggaran DPR RI berdasarkan Triwulan.

**Asep Ahmad Saefuloh**, Penulis lahir di Tasikmalaya 1 September 1971, menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1996, Magister Kajian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia pada Universitas Indonesia (UI) tahun 2003, dan Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2012. Mulai tahun 1997 sampai sekarang bekerja sebagai Peneliti Bidang Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI. Berbagai topik penelitian tentang kebijakan publik termasuk ketenagakerjaan dan SDM telah dilakukan oleh penulis, dan penulis juga aktif menghasilkan karya-karya ilmiah dan populer dalam bentuk buku dan artikel yang dimuat dalam jurnal, majalah dan surat kabar.

**Edmira Rivani, S.Si, M.Stat.**, Lahir di Jakarta pada 10 September 1986. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran dalam bidang statistika pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran dalam bidang statistika terapan dari 2008 sampai 2009. Saat ini bekerja sebagai peneliti ekonomi dan kebijakan publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Hilma Meilani, S.T, MBA.**, Lahir di Kudus, 08 Mei 1977. Pendidikan S1 Teknik Kimia diselesaikan di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002. Pendidikan

S2 *Finance* diselesaikan di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR RI, antara lain RUU tentang Perubahan UU tentang Minyak dan Gas Bumi, dan RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Resi Gudang. Saat ini terlibat dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik.

**Lukman Adam**, Penulis adalah Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan studi sarjana dan magister di Institut Pertanian Bogor. Sejak tahun 2007, aktif terlibat sebagai tim asistensi dalam penyusunan dan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang. Pada tahun 2006 pernah membawakan makalah pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari tahun 2000 sampai saat ini terlibat dalam berbagai penelitian bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertanian, dan perikanan.

**Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.**, Lahir di Jakarta tanggal 3 Juli 1978. Pendidikan D3 Perbankan diselesaikan di Politeknik Universitas Indonesia pada tahun 1999, Pendidikan S1 Manajemen diselesaikan di Universitas Mercu Buana Fakultas Ekonomi pada tahun 2003 dan Pendidikan S2 Magister Manajemen diselesaikan di Universitas Mercu Buana pada tahun 2006. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2005 sebagai Staf di Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dan mulai tahun 2010 memulai karir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi Terapan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

**Niken Paramita Purwanto, SE., M.Ak.**, Lahir di Jakarta, 25 Juni 1977. Pendidikan S1 Manajemen diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2000, dan Pendidikan S2 Akutansi diselesaikan di Magister Akutansi Universitas Indonesia pada tahun 2004. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR-RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Pangkat / Golongan saat ini adalah Penata Muda Tingkat I / golongan IIIb. Ditugaskan sebagai Tim Pendamping Pansus RUU di DPR-RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tim Penyusun RUU tentang Perbankan dan Tim Penyusun RUU tentang Lalu Lintas Devisa serta terlibat dalam Penelitian Tim Hubungan International mengenai Transnasional Crimes, Tim Penelitian Ekonomi Kebijakan Publik Tentang Perdagangan dan Ekonomi Kreatif.

**Sony hendra Permana**, Penulis lahir di Jakarta 17 Februari 1981, menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI tahun 2003 dan Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada Universitas Indonesia

tahun 2007. Mulai tahun 2010 sampai sekarang bekerja sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.

**T. Ade Surya, ST., MM.,** Lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Maret 1981. Pendidikan S1 Teknik Industri diselesaikan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pendidikan S2 *General Management* diselesaikan di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Bekerja sebagai peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik.